

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Pada Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Menempuh Ujian Akhir Program Sarjana (S1)
Program Studi Akuntansi STIE STAN – Indonesia Mandiri

Disusun Oleh:
YOANE ASTRIA
371942005



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN – INDONESIA MANDIRI
BANDUNG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Pada Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020)

PENULIS : YOANE ASTRIA

NIM : 371942005

Bandung, 14 Juni 2022

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing,

Ketua Program Studi,

(Ferdiansyah, S.E., M.Ak.)

(Dani Sopian, S.E., M.Ak.)

Mengetahui,

Wakil Ketua I Bidang Akademik

(Intan Pramesti Dewi, S.E., M.Ak., Ak., CA.)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoane Astria

NIM : 371942005

Jurusan : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Pada Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020)**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan atau duplikasi dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dengan ketentuan yang berlaku.

Bandung, 06 Juni 2022

(Yoane Astria)

NIM: 371942005

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**
(Studi Pada Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020)

***“THE EFFECT OF THE PROPORTION OF INDEPENDENT
COMMISSIONERS, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AND FIRM
SIZE ON TAX AVOIDANCE***
(*Study of Agricultural and Mining Companies Sector Listed on Indonesia Stock
Exchange for the Period of 2016 – 2020*)”

Telah melakukan sidang tugas akhir pada hari Selasa, 14 Juni 2022 dan telah
melakukan revisi sesuai dengan masukan pada saat sidang tugas akhir.

Menyetujui,

No.	Nama	Penguji	Tanda Tangan
1.	Ferdiansyah, S.E., M.Ak.	Pembimbing	
2.	Dani Sopian, S.E., M.Ak	Penguji 1	
3.	Intan Pramesti Dewi, S.E., M.Ak., Ak., CA	Penguji 2	

Bandung, 21 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dani Sopian, S.E., M.Ak.

NIDN: 0410068702

MOTTO

“Ada kuasa yang lebih besar dari rencana manusia. Semua tepat sesuai porsinya, semua lewat sesuai mampunya. Sang Pencipta, luar biasa ya”

(Marchella FP)

“If you can dream it, you can do it”

(Walt Disney)

Persembahan

“Karya sederhana ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 – 2020.

Populasi pada penelitian ini sebanyak 72 perusahaan dan sampel sebanyak 43 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang dilanjutkan dengan uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas, dan analisis korelasi. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan dua perhitungan, (*Effective Tax Rate*) ETR dan (*Cash Effective Tax Rate*) CETR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik secara ETR dan CETR. Hasil uji secara parsial proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak baik ETR dan CETR.

Kata Kunci: Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak, ETR, CETR.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the proportion of independent commissioners, institutional ownership, and company size on tax avoidance in agricultural and mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016 – 2020.

The population in this study were 72 companies and a sample of 43 companies in a period of 5 years. The sampling technique used is using purposive sampling technique. The method used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis followed by autocorrelation test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, and correlation analysis. In this study, tax avoidance was measured using two calculations, (Effective Tax Rate) ETR and (Cash Effective Tax Rate) CETR.

The results showed that simultaneously the proportion of independent commissioners, institutional ownership, and firm size had no effect on tax avoidance either by ETR and CETR. The partial test results showed that the proportion of independent commissioners had a significant negative effect, institutional ownership, and firm size had no effect on tax avoidance, both ETR and CETR.

Keywords: Proportion of Independent Commissioners, Institutional Ownership, Company Size, Tax Avoidance, ETR, CETR.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah bagi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK” (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020).**

Skripsi ini disusun untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan saya ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, hikmat, kekuatan dan kemudahan serta telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik adanya.
2. Kedua Orang tua yang menjadi salah satu motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mendukung dan mendoakan baik secara moril maupun materil.
3. Bapak Ferdiansyah. S.E., M. Ak. selaku dosen pembimbing dan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Mandiri Bandung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, saran, nasihat dan arahan semasa bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Nur Hayati, S.E., M.Si, selaku ketua STIE-STAN Indonesia Mandiri.
5. Ibu Intan Pramesti Dewi, S.E., M.Ak., Ak. CA, selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE-STAN Indonesia Mandiri.
6. Bapak Dani Sopian, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE-STAN Indonesia Mandiri.
7. Seluruh dosen dan staff yang telah membantu dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana di kampus STIE-STAN Indonesia Mandiri.
8. Sosok terkasih, terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, kebijaksanaan, dan yang tidak pernah lelah mengingatkan saya akan pentingnya integritas diri.
9. Sahabat sesama bimbingan Pupung Jatnika dan Riska Nurjanah yang saling memotivasi, memberikan saran, berbagi pengetahuan, dan bertukar informasi.
10. Teman seperjuangan Akuntansi S1, Diana Dewi Yanti. Terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama dalam menyelesaikan Pendidikan di STIE-STAN Indonesia Mandiri.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, teman-teman kantor, saudara, dan pihak lainnya.

Atas segala kekurangan dari skripsi ini, saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, saya mengharapkan banyak masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun. Cukup banyak kesulitan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini, puji serta syukur dapat diatasi dengan baik.

Akhir kata, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini, saya juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Amin.

Bandung, 06 Juni 2022

Yoane Astria

NIM: 371942005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1. Kegunaan Teoritis	11
1.4.2. Kegunaan Praktis	12
BAB II	13

**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN
HIPOTESIS 13**

2.1.	Tinjauan Pustaka	13
2.1.1.	Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
2.1.1.1.	Pengertian Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.2.	Pajak.....	17
2.1.2.1.	Pengertian Pajak.....	17
2.1.2.2.	Landasan Hukum Pajak di Indonesia.....	18
2.1.2.3.	Fungsi dan Manfaat Pajak.....	19
2.1.2.4.	Jenis-Jenis Pajak	21
2.1.2.5.	Pengelompokan Pajak	26
2.1.2.6.	Tarif Pajak.....	27
2.1.2.7.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	28
2.1.2.8.	Pajak Badan.....	36
2.1.3.	Penghindaran Pajak.....	41
2.1.3.1.	Pengertian Penghindaran Pajak.....	41
2.1.3.2.	Jenis Penghindaran Pajak.....	42
2.1.3.3.	Karakter Penghindaran Pajak.....	43
2.1.3.4.	<i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tax Evasion</i>	44
2.1.3.5.	Pengukuran Penghindaran Pajak.....	45
2.1.3.	Proporsi Komisaris Independen	48
2.1.3.1.	Pengertian Proporsi Komisaris Independen.....	48
2.1.3.2.	Kriteria Komisaris Independen	49
2.1.3.3.	Komposisi Komisaris Independen	49
2.1.3.4.	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen.....	50
2.1.3.5.	Pengukuran Proporsi Komisaris Independen.....	52
2.1.4.	Kepemilikan Institusional	52
2.1.4.1.	Pengertian Kepemilikan Institusional	52
2.1.4.2.	Peranan Kepemilikan Institusional	53
2.1.4.3.	Wewenang Kepemilikan Institusional	54
2.1.4.4.	Kelebihan Kepemilikan Institusional.....	55

2.1.4.5. Pengukuran Kepemilikan Institusional	56
2.1.5. Ukuran Perusahaan.....	57
2.1.5.1. Pengertian Ukuran Perusahaan	57
2.1.5.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan	58
2.1.5.3. Fungsi Ukuran Perusahaan.....	60
2.1.5.4. Pengukuran Ukuran Perusahaan	60
2.2. Penelitian-Penelitian Terdahulu	61
2.3. Kerangka Teoritis	71
2.3.1. Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak	72
2.3.2. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak	72
2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak	73
2.4. Model Analisis	74
2.5. Pengembangan Hipotesis	74
BAB III.....	75
OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	75
3.1 Objek Penelitian	75
3.2 Lokasi Penelitian	76
3.3 Metode Penelitian.....	77
3.3.1. Unit Analisis	78
3.3.2. Populasi dan Sampel	78
3.3.2.1. Populasi.....	78
3.3.2.2. Sampel.....	81
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Ukuran Sampel	82
3.3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	86
3.3.5. Jenis dan Sumber Data	88
3.3.5.1. Jenis Data	88
3.3.5.2. Sumber Data.....	88
3.3.6. Operasionalisasi Variabel.....	89
3.3.6.1. Variabel Independen	89
3.3.6.2. Variabel Dependen.....	92

3.3.7.	Teknik Analisis Data.....	95
3.3.7.1.	Statistik Deskriptif	95
3.3.7.2.	Uji Asumsi Klasik.....	98
3.3.8.	Uji Korelasi	100
3.3.9.	Pengujian Hipotesis.....	103
3.3.9.1.	Uji Analisis Regresi Linear Berganda	104
3.3.9.2.	Uji-F	106
3.3.9.3.	Uji Parsial (Uji-t).....	107
3.3.9.4.	Uji Koefisien Determinasi.....	109
BAB IV	111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	111
4.1.	Hasil Penelitian.....	111
4.1.1.	Sampel Penelitian.....	111
4.1.2.	Analisis Deskriptif	114
4.1.2.1.	Proporsi Komisararis Independen.....	115
4.1.2.2.	Kepemilikan Institusional	118
4.1.2.3.	Ukuran Perusahaan	121
4.1.2.4.	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Proksi ETR	124
4.1.2.4.	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Proksi CETR.....	127
4.1.2.5.	Rata-Rata dan Standar Deviasi	130
4.2.	Uji Asumsi Klasik	131
4.2.1.	Uji Normalitas	132
4.2.2.	Uji Multikolinieritas.....	135
4.2.3.	Uji Autokorelasi	137
4.2.4.	Uji Heteroskedastisitas.....	139
4.3.	Analisis Korelasi	140
4.4.	Pengujian Hipotesis	144
4.4.1.	Uji Statistik F	144
4.4.2.	Uji Statistik T	147
4.4.3.	Uji Koefisien Determinasi	150
4.5.	Pembahasan, Implikasi, dan Keterbatasan	152

4.5.1. Pembahasan.....	152
4.5.2. Implikasi.....	157
4.5.2.1. Implikasi Teoritis	157
4.5.2.2. Implikasi Praktis	158
4.5.3. Keterbatasan	159
BAB V.....	160
KESIMPULAN DAN SARAN	160
5.1. Kesimpulan.....	160
5.2. Saran	162
5.2.1. Saran Teoritis	162
5.2.2. Saran Praktis	163
DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu	66
3.1 Populasi Penelitian	79
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	95
4.1 Hasil Pengambilan Sampel	111
4.2 Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan	112
4.3 Proporsi Komisaris Independen	115
4.4 Kepemilikan Institusional	118
4.5 Ukuran Perusahaan.....	121
4.6 Penghindaran Pajak (ETR).....	124
4.7 Penghindaran pajak (CETR)	127
4.8 Hasil Analisis Deskriptif	130
4.9 One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test (ETR)	133
4.10 One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test (CETR)	134
4.11 Hasil Uji Multikolonieritas (ETR)	135
4.12 Hasil Uji Multikolonieritas (CETR)	136
4.13 Hasil Uji Autokorelasi (ETR)	137
4.14 Durbin-Watson Test Bound	137
4.15 Hasil Uji Autokorelasi (CETR).....	138
4.16 Durbin-Watson Test Bound	138
4.17 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi	141

4.18 Hasil Uji Korelasi.....	141
4.19 Uji Simultan (Uji-F) (ETR).....	145
4.20 Uji Simultan (Uji-F) (CETR).....	146
4.21 Uji Parsial (Uji-T) (ETR).....	148
4.22 Uji Parsial (Uji-T) (CETR).....	149
4.23 Uji Koefisien Determinasi (ETR).....	150
4.24 Uji Koefisien Determinasi (CETR).....	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Grafik Perkembangan Rata-Rata Proporsi Komisaris Independen.....	117
4.2 Grafik Perkembangan Rata-Rata Kepemilikan Institusional	120
4.3 Grafik Perkembangan Rata-Rata Ukuran Perusahaan	123
4.4 Grafik Perkembangan Rata-Rata Penghindaran Pajak (ETR)	126
4.5 Grafik Perkembangan Rata-Rata Penghindaran Pajak (CETR).....	129
4.6 Uji Normalitas (ETR).....	132
4.7 Uji Normalitas (CETR)	133
4.8 Uji Heteroskedastisitas (ETR).....	139
4.9 Uji Heteroskedastisitas (CETR).....	140

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Hadir Bimbingan
- Lampiran 2. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2016
- Lampiran 3. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017
- Lampiran 4. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018
- Lampiran 5. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019
- Lampiran 6. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020
- Lampiran 7. Laporan Laba Rugi Tahun 2016
- Lampiran 8. Laporan Laba Rugi Tahun 2017
- Lampiran 9. Laporan Laba Rugi Tahun 2018
- Lampiran 10. Laporan Laba Rugi Tahun 2019
- Lampiran 11. Laporan Laba Rugi Tahun 2020
- Lampiran 12. Laporan Arus Kas Tahun 2016
- Lampiran 13. Laporan Arus Kas Tahun 2017
- Lampiran 14. Laporan Arus Kas Tahun 2018
- Lampiran 15. Laporan Arus Kas Tahun 2019
- Lampiran 16. Laporan Arus Kas Tahun 2020
- Lampiran 17. Komisaris Independen Dalam Laporan Keuangan 2016
- Lampiran 18. Komisaris Independen Dalam Laporan Keuangan 2017
- Lampiran 19. Komisaris Independen Dalam Laporan Keuangan 2018
- Lampiran 20. Komisaris Independen Dalam Laporan Keuangan 2019
- Lampiran 21. Komisaris Independen Dalam Laporan Keuangan 2020

- Lampiran 22. Catatan Atas Laporan Keuangan 2016
- Lampiran 23. Catatan Atas Laporan Keuangan 2017
- Lampiran 24. Catatan Atas Laporan Keuangan 2018
- Lampiran 25. Catatan Atas Laporan Keuangan 2019
- Lampiran 26. Catatan Atas Laporan Keuangan 2020
- Lampiran 27. Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan
- Lampiran 28. Data Hasil Perhitungan Proporsi Komisaris Independen
- Lampiran 29. Data Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional
- Lampiran 30. Data Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan
- Lampiran 31. Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)
- Lampiran 32. Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)
- Lampiran 33. Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen
- Lampiran 34. Data Perhitungan Kepemilikan Institusional
- Lampiran 35. Data Perhitungan Ukuran Perusahaan
- Lampiran 36. Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)
- Lampiran 37. Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)
- Lampiran 38. Hasil Analisis Deskriptif
- Lampiran 39. Hasil Uji Normalitas (ETR)
- Lampiran 40. Hasil Uji Normalitas (CETR)
- Lampiran 41. Hasil Uji Multikolonieritas (ETR)
- Lampiran 42. Hasil Uji Multikolonieritas (CETR)
- Lampiran 43. Hasil Uji Autokorelasi (ETR)

- Lampiran 44. Hasil Uji Autokorelasi (CETR)
- Lampiran 45. Durbin-Watson Test Bound
- Lampiran 46. Hasil Uji Heteroskedastisitas (ETR)
- Lampiran 47. Hasil Uji Heteroskedastisitas (CETR)
- Lampiran 48. Hasil Uji Korelasi
- Lampiran 49. Hasil Uji Simultan (Uji-F) ETR
- Lampiran 50. Hasil Uji Simultan (Uji-F) CETR
- Lampiran 51. Hasil Uji Parsial (Uji-t) ETR
- Lampiran 52. Hasil Uji Parsial (Uji-t) CETR
- Lampiran 53. Hasil Uji Koefisien Determinasi (ETR)
- Lampiran 54. Hasil Uji Koefisien Determinasi (CETR)
- Lampiran 55. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2021). Di mata negara, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan di mata perusahaan (wajib pajak) merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh sebab itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan dipungut untuk kepentingan rakyat (Rozak et al., 2018).

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk dapat menghindari kewajibannya (Fadilah et al., 2019). Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara kepentingan negara dan kepentingan perusahaan sehingga menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajaknya dikenal dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu bentuk usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untung meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara (Sulistiono, 2018). Pada dasarnya *tax avoidance* ini

mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia (Rozak et al., 2018).

Menurut (Sinambela, 2019) *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.

Menurut Pohan (2017) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh para wajib pajak saat SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan dan secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan. Sehingga penting untuk diperhatikan karena mungkin saja dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak yang akan berdampak negatif bagi negara (Catrine, 2021).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang utama yang harus dipenuhi oleh orang pribadi dan pajak badan. Akan tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti et al. 2017). Untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Kurniasih (2016) dalam Abdullah (2020), menyatakan bahwa “Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.” Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan, secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara ditetapkannya tarif PPh Badan pada tingkat 22% ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan yang telah disalurkan pada beberapa kebijakan Pajak Penghasilan lainnya. Dengan demikian, berdasarkan perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP, tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 adalah 22%.

Menurut Wijayani (2016) *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang – undang yang ada. Seringkali praktik penghindaran pajak menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari adanya praktik penghindaran pajak dapat secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dalam lingkup yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yaitu wajib pajak dapat meminimalisir pembayaran atau beban pajak yang dibayarkan kepada negara, sementara dampak negatif dari adanya praktik penghindaran pajak dirasakan oleh negara yaitu adanya selisih kepentingan antara wajib pajak dengan negara dan seringkali praktik

penghindaran pajak dijadikan wadah untuk para wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Sehingga penghindaran pajak sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh penulis.

Faktor-faktor yang mengakibatkan adanya *tax avoidance* menurut Puspita et al. (2017) menyatakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*, yaitu ukuran perusahaan, *return on asset*, *leverage*, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, komposisi (proporsi) komisaris independen. Moeljono (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah profitabilitas (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusional dan resiko perusahaan. Dan menurut Novriyanti et al. (2020) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa faktor yang mengakibatkan adanya *tax avoidance* diantaranya adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan.

Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 3 (tiga) faktor yang dijadikan variabel independen yang adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan.

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan, komisaris independen cenderung akan bertindak lebih independen dan menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham minoritas sehingga dapat memonitor dan mengontrol manajemen (Armeida, 2020). Komisaris independen dalam perusahaan dapat memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk

mengelola perusahaan dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak yang akan dilakukan perusahaan (Wijayanti et al, 2017). Semakin banyak jumlah komisaris independen diharapkan akan memperketat bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Rani, 2017). Adanya komisaris independen dalam struktur perusahaan bertujuan untuk mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan dalam perusahaan. Dengan jumlah komisaris independen yang banyak maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* (Pratomo et al., 2021).

Selain komisaris independen, kepemilikan institusional dapat memengaruhi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain yang dapat diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun (Rosalia dan Sapari, 2017). Menurut Cahyo et al., 2016 kepemilikan institusional merupakan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri, biasanya intuisi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemimpinan institusional memiliki tugas untuk memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan adanya kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan

adanya pengawasan dan pihak institusi yang memiliki saham di dalam perusahaan dalam memonitoring kinerja manajemen, termasuk salah satunya yaitu penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Simorangkir et al., 2020).

Ukuran perusahaan juga dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Menurut Kreshna et al., (2016) semakin besar ukuran satu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan-kecendrungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Jasmine (2017) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan.” Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Hal tersebut yang dapat digunakan dari pihak perusahaan untuk menggunakan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak.

Terdapat berbagai bentuk fenomena yang terjadi dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penulis akan memaparkan secara singkat contoh fenomena mengenai penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Fenomena tentang penghindaran pajak yang akan dibahas merupakan kasus perusahaan pertambangan unggulan dan produsen batu bara terbedar di Indonesia yakni PT. Adaro Energy. Tbk (ADRO) di tahun 2019. Munculnya

kasus ini dilatarbelakangi oleh laporan yang dibuat *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*. Dalam laporan itu menuding bahwa PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura *Coaltrade Service International* sejak 2009 hingga 2017. Dampaknya PT. Adaro dapat membayar pajak US\$ 125 juta atau Rp. 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya di bayarkan ke Indonesia. Skema penghindaran pajak PT. Adaro dilakukan dengan menjual batu baranya ke anak perusahaan *Coaltrade Service International* layaknya pembeli dengan harga yang lebih murah. Kemudian *Coaltrade Service International* akan menjual batu bara itu ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Dengan praktik seperti itu, profit dan pemasaran PT. Adaro Energy menjadi kecil yang berimbas pada mengecilnya pendapatan kena pajak PT. Adaro di Indonesia (tirta.id dimuat oleh Friana (2019)).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan inkonsistensi hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, kepemimpinan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahule (2016) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Walaupun demikian, Prasetyo et al., (2018) menyatakan bahwa secara proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini diperkuat oleh Sinurat (2021) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Tamara et al.,

(2021) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki hubungan yang negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyo et al., (2016), Feranika (2017), dan Prasetyo et al., (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan Cahyono et al., (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) dan Prapita et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara menurut Fitriana (2018) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Aulia dan Endang (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sehingga penelitian yang akan diangkat oleh penulis penting untuk dilakukan untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen, kepemimpinan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* di Indonesia pada perusahaan sektor penghasil bahan baku (bidang pertanian dan pertambangan) dikarenakan pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021 mencapai Rp16,97 kuadriliun. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kedua setelah industri pengolahan adalah sektor pertanian dengan nilai total Rp2,25 kuadriliun (13,28%), diikuti perdagangan besar dan eceran senilai Rp2,2 kuadriliun (12,97%), dan konstruksi senilai Rp1,77

kuadriliun (10,44%). Sepanjang tahun 2021 sektor pertambangan dan penggalian berhasil menyumbang Rp1,52 kuadriliun (8,98%), sektor informasi dan komunikasi Rp748,75 triliun (4,41%), jasa keuangan dan asuransi Rp736,19 triliun (4,34%), kemudian transportasi dan pergudangan Rp719,63 triliun (4,24%). (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan data diatas, sektor pertanian dan pertambangan memiliki kontribusi yang cukup tinggi sehingga memungkinkan adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi juga dikarenakan laba bersihnya cukup tinggi.

Penelitian yang akan diangkat oleh penulis disajikan berbeda dengan penelitian serupa atau penelitian sebelumnya dikarenakan penulis mengangkat judul yang sering diteliti serta penulis menggunakan dua metode dalam perhitungan penghindaran pajak yang berbeda dengan perhitungan pada penelitian sebelumnya diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dan *Effective Tax Rate (ETR)*. CETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi. CETR dan ETR diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun temporer (dapat dilihat dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas).

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap**

Penghindaran Pajak” (Studi pada Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan, Klasifikasi Sektor Penghasil Bahan Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Periode 2016-2020).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk masa mendatang dan berpengaruh positif sehingga dapat berguna serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan di Bursa Efek Indonesia, dapat lebih

memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan penghindaran pajak di STIE STAN INDONESIA MANDIRI dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi. Diharapkan juga dapat berguna untuk mengembangkan teori bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam penelitian dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Investor

Dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang diinvestasikannya.

3. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

2.1.1.1. Pengertian Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yang memiliki perilaku, perspektif dan kepentingan yang berbeda beda. Teori ini menjelaskan bahwa pihak agen akan fokus pada kepentingan pribadi yang mana akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dengan inilah pihak prinsipal akan memberlakukan mekanisme-mekanisme untuk memantau dan mengekang perilaku agen demi keselarasan kepentingan kedua belah pihak (Ulum et al., 2019).

Kemudian, teori ini memperluas informasi tradisional dengan mengakui bahwa beberapa kekuatan yang turut bermain dalam organisasi dapat mempengaruhi bagaimana informasi bekerja. Ada perbedaan atau ketidakselarasan informasi apabila beberapa pihak memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan lainnya. Maka dari itu teori ini percaya ada intensif bagi manajer untuk membuat pengungkapan tambahan (Ulum et al., 2019) Dua pihak yang memiliki perbedaan perspektif dan kepentingan dalam penelitian ini adalah manajer sebagai agen dan juga pemerintah sebagai pihak *principal*. Perbedaan yang ditimbulkan adalah besar pajak yang terutang. Manajer sebagai agen menginginkan

pembayaran pajak yang terutang seminimal mungkin agar dapat menguntungkan bagi perusahaan yang dikelolanya, sedangkan pemerintah ingin mendapatkan pendapatan pajak sebesar mungkin guna menutupi pembiayaan negara (Auliya et al., 2021).

Teori keagenan (*Agency Theory*) memandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* yaitu para pemegang saham dan *agent* yaitu manajer atau pengelola perusahaan. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati (Tandiontong, 2016).

Aplikasi pada teori keagenan bisa berbentuk kontrak kerja yang akan mengendalikan proporsi hak serta kewajiban manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) dengan memperhitungkan manfaat guna secara keseluruhan. Apabila agen serta prinsipal mempunyai kepentingan yang sama, maka agen akan bertindak sesuai dengan kehendak prinsipal. Tetapi, pada kenyataannya agen serta *principal* cenderung mempunyai selisih kepentingan. Terdapatnya perbedaan kepentingan tersebut hendak menimbulkan dua permasalahan antara manajemen serta pemegang saham, Hal ini akan munculkan adanya asimetri informasi serta akan terjadi konflik kepentingan antara pihak yang bersangkutan. Adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan

datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Handayani, 2018). Maka dari itu dibutuhkan kontrak kerja yang efektif serta efisien supaya tidak terdapat informasi yang tersembunyi antara agen dan prinsipal atau antara pihak terpaut (Pratomo dan Rana, 2021).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa *agency theory* merupakan tempat terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dan praktik-praktik kecurangan, salah satunya terkait dengan penghindaran pajak maka dalam sebuah perusahaan diwajibkan memiliki dewan komisaris independen. Komisaris independen bekerja untuk prinsipal atau pemegang saham, sehingga komisaris independen diharapkan dapat memastikan bahwa agen mengelola perusahaan secara benar sesuai dengan keinginan dari para pemegang saham. Salah satunya terkait dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, karena meskipun tetap dilegalkan namun praktik penghindaran pajak ini akan berakibat kurang baik terhadap citra dari perusahaan yang bersangkutan (Mulyana et al., 2020).

Saat kepentingan antara prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka akan tercipta kontrak yang efisien, sebaliknya ketika prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda maka kontrak yang efisien tidak dapat terjadi. Jika pihak agen lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan perusahaan, pengawasan terhadap pihak agen dapat dilakukan salah satunya dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan

sehingga perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak dapat diminimalisir. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017).

Selain itu perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berukuran besar dapat menarik perhatian dan pengawasan dari pihak fiskus untuk memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan diatas, kontrak yang efisien dapat terlaksana apabila tidak terdapat perbedaan informasi antara prinsipal dan agen. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Pembayaran pajak oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar dapat mendapatkan perhatian yang besar dari pihak pemerintah sesuai dengan laba yang diperoleh, maka dapat menarik perhatian pihak fiskus untuk memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan dapat mengurangi risiko yang terjadi karena adanya pemeriksaan atau sanksi lain yang dilakukan oleh pihak fiskus dengan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan citra perusahaan kepada para investor (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017).

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara menurut Ayza (2017) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut pengaturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Partha dan Noviari (2016) juga menyebutkan bahwa pajak dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh dalam operasional dengan pandangan dari seorang manajer, bahwa pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan ingin membayarkannya serendah mungkin.

Mardiasmo (2019:3) menjelaskan bahwa pengertian pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2. Landasan Hukum Pajak di Indonesia

Di Indonesia, pajak dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai landasan hukum, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Namun belakangan pemerintah melakukan beberapa revisi dan tambahan atau UU KUP melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sudah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan akan berlaku secara penuh di bulan Januari 2022.

Pemerintah mengartikan pajak adalah sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang. Dimana pajak tersebut merupakan imbalan atau manfaat secara tidak langsung yang diperoleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran (Rusdiono, 2021).

Selain UU KUP, aturan perpajakan di Indonesia dibagi ke dalam Undang-Undang lain seperti UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) atau UU No.42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.1.2.3. Fungsi dan Manfaat Pajak

Rusdiono (2021) mengemukakan bahwa pajak memiliki 4 fungsi umum yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran

Pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan dalam melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya pembangunan fasilitas kesehatan, transportasi, dan pendidikan.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Misalnya tercapainya pertumbuhan ekonomi negara. Contoh: Berlakunya PP 23/2008 tentang tarif PPh final.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak berperan sebagai penyeimbang situasi ekonomi negara. Misalnya, Semakin banyak penerimaan negara, maka semakin stabil perekonomian

negara. Semakin stabil perekonomian maka tingkat inflasi menjadi rendah. Inflasi yang rendah mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat. Misalnya, kesempatan wirausaha atau bertambahnya lapangan pekerjaan.

Dari keempat fungsi pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki manfaat baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri.

Secara sederhana, jika mengacu pada keempat fungsi pajak tersebut, maka didapat beberapa manfaat pajak bagi negara sebagai berikut:

1. Pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran belanja negara.
2. Pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, subsidi usaha atau program pengairan sawah.
3. Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self-liquidating*. Misalnya objek rekreasi.
4. Pajak bermanfaat dalam membiayai pengeluaran tidak produktif seperti infrastruktur, pertanahan, lingkungan hidup, budaya, pemilu, atau keamanan negara.

Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat berikut:

1. Masyarakat mampu menikmati kemudahan dalam berusaha. Program pembangunan usaha yang dilakukan pemerintah melalui pajak juga hanya bisa dinikmati oleh pengusaha yang membayar pajak.

2. Masyarakat mampu melakukan segala aktivitas dengan mudah. Kepemilikan NPWP biasanya menjadi syarat tertentu dalam melakukan aktivitas tertentu. Pinjaman misalnya.
3. Masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja dan usaha.
4. Bagi perusahaan, kewajiban pajak mampu mempermudah perusahaan dalam mengembangkan usahanya.
5. Melindungi masyarakat dari produksi luar negeri agar bisa lebih bersaing di dalam negeri. Misalnya pemberlakuan pajak impor atau barang mewah.
6. Masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi genting. Misalnya subsidi atau bantuan sosial.

2.1.2.4. Jenis-Jenis Pajak

Melansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (pajak.go.id) tahun 2021, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini Sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan.

Jenis-jenis pajak pusat meliputi:

- Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN.

- Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

- **Bea Meterai**

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

- **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil dari pemungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pajak daerah meliputi:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Pajak Kabupaten yang terdiri dari:
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Sementara itu, jenis-jenis pajak juga dapat dikelompokkan berdasarkan golongannya, dalam hal ini pajak dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pajak Langsung.

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

Pengelompokkan pajak yang terakhir, pajak dikelompokkan menurut sifatnya, dalam hal ini pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2.1.2.5. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2019:8)

1. Menurut Golongannya

- Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

2.1.2.6. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:13) ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional (*A Proportional Tax Rate*)

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap (*A Fixed Tax Rate*)

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif (*A Progressive Tax Rate*)

Presentase tariif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- Tarif progresif profresif : kenaikan presentase semakin besar.
- Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap.
- Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil.

4. Tarif Degresif (*A Degressive Tax Rate*)

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2.7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:161) yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Mardiasmo (2019:162) subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri atas:

- Subjek pajak orang pribaaadi, yaitu:
 - Orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- Subjek pajak badan, yaitu:
 - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- Subjek pajak warisan, yaitu:
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri atas:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia).
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2019:164) yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
 - Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - Indonesia menjadi anggota tersebut.
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah dan dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - Bukan warga Negara Indonesia.
 - Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2019:165) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harga termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - Keuntungan karena pengalihan harta berubah hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda urut serta pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 14. Premi asuransi.
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia.

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sementara itu, bagi wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal di Indonesia saja.

Menurut Mardiasmo (2019:167) yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*demand profit*).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dengan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan Kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

2.1.2.8. Pajak Badan

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya (Mekari, 2021).

Berikut adalah subjek pajak penghasilan badan (subjek PPh Badan) dan objek pajak penghasilan badan (Mekari, 2021):

1. Subjek Pajak Badan (PPh Badan)

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut:

- Perseroan Terbatas (PT)
- Perseroan Lainnya
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Firma
- Kongsi
- Koperasi
- Dana Pensiun
- Persekutuan
- Perkumpulan
- Yayasan
- Organisasi Masyarakat
- Organisasi Sosial Politik
- Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
- Lembaga dan bentuk badan lainnya
- Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- Bentuk Usaha Tetap

2. Objek PPh Badan (Objek Pajak Badan)

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek Pajak Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi (Mekari, 2021):

- Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
- Laba usaha

- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan)
- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- Dividen
- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
- Peraturan Pemerintah
- Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
- Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- Surplus Bank Indonesia

Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan atau PPh Badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau WP Badan, di antaranya:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan, dan harus dibayarkan setiap bulannya.

Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada:

- Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
- Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
- sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

4. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

5. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

6. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan.

7. Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada:

- Sektor pelayaran atau penerbangan internasional.
- Perusahaan asuransi luar negeri.
- Pengeboran minyak, gas dan geothermal.
- Perusahaan dagang asing.
- Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

8. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari:

- Bunga deposito dan tabungan lainnya.
- Bunga obligasi dan surat utang negara.
- Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi.

- Hadiah undian.
- Transaksi saham dan sekuritas lainnya.
- Serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020, berbunyi: “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.”

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Melalui peraturan baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap yakni 22% berlaku pada 2020 dan 2021.

2.1.3. Penghindaran Pajak

2.1.3.1. Pengertian Penghindaran Pajak

Pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Tindakan penyelewengan dan penghindaran merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai

cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan tax evasion (Puspita dan Febriyani, 2017).

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (ATPETS, 2022). Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Catrine, 2020).

Dengan demikian penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak terutang yang secara moral pun tidak dianggap salah karena masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan (Monica et al., 2021).

2.1.3.2. Jenis Penghindaran Pajak

Dilansir melalui situs resmi Ayo!Pajak (2021) yang terfatar dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Acceptable Tax Avoidance*

Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik penghindaran pajak ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.

2. *Unacceptable Tax Avoidance*

Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak.

2.1.3.3. Karakter Penghindaran Pajak

Menurut Tandean (2016), komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono dkk., 2016).

2.1.3.4. Tax Avoidance dan Tax Evasion

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak terutang yang secara moral pun tidak dianggap salah karena masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan (Saragih et al., 2021).

Sementara *tax evasion* bentuk pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dengan sengaja mengurangi jumlah pajak terutang bahkan meniadakan kewajiban membayar pajaknya secara ilegal. *Tax evasion* sering disebut juga dengan *tax fraud* atau penggelapan pajak (Rusdiono, 2021).

Pada dasarnya *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah sama-sama disebut sebagai pelanggaran dalam perpajakan, yang membedakan *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan sisi legalitasnya. *Tax avoidance* memiliki sifat legal sedangkan *tax evasion* memiliki sifat illegal. Tidak hanya demikian, dalam praktiknya pengelompokan keduanya biasa terjadi atas dasar interpretasi otoritas pajak dalam masing-masing negara yang bersangkutan. Maka itu untuk dapat menyimpulkannya yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, sedangkan dari sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya *tax avoidance* ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia (Catrine, 2020).

Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan sebaliknya penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, dan melakukan transaksi palsu (Caterine, 2020).

Pada umumnya *tax avoidance* dan *tax evasion* mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan illegal atau perbuatan melanggar hukum. Penyebab wajib pajak melakukan *tax evasion* diantaranya adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul pula konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara (Indriani dan Juniarti, 2020).

2.1.2.5. Pengukuran Penghindaran Pajak

Terdapat banyak pengukuran untuk mengukur penghindaran pajak, diantaranya adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Current Effective Tax Rate* (CuETR). *Effective Tax Rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR menunjukkan pajak yang benar-benar telah

dibayar. *Current Effective Tax Rate* (CuETR) merupakan perbandingan pajak kini perusahaan dengan laba sebelum pajak. CuETR menunjukkan besaran pajak kini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final (Dewi dan Noviari, 2017).

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan presentase besarnya beban pajak efektif yang harus dibayarkan suatu perusahaan pada tahun berjalan. ETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan (Andriyani dan Hutabarat, 2020). Nilai ETR berkisar 0 sampai dengan 1, alasan menggunakan proksi ETR adalah karena dengan menggunakan ETR dapat diketahui adanya pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi. Satuan ukuran yang digunakan yaitu satuan angka itu sendiri. Nilai ETR yang semakin rendah menunjukkan adanya tindakan *tax avoidance* yang semakin tinggi yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Nulansari, 2021). Cara pengukurannya:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Pajak Penghasilan (Beban Pajak Kini)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang

mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak (Kas untuk Bayar Pajak)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Current Effective Tax Rate* (CUETR)

Current Effective Tax Rate (CUETR) merupakan pengukuran yang dihitung berdasarkan perbandingan beban pajak kini terhadap total laba sebelum pajak (Rombe et al., 2017). CUETR menunjukkan besaran pajak kini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final (Saragih dan Halawa, 2022).

$$\text{CUETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3. Proporsi Komisaris Independen

2.1.3.1. Pengertian Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seorang yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan direksi atau dewan komisaris, serta tidak pula menjadi direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (Badao, 2020).

Proporsi dewan komisaris independen merupakan ukuran dewan komisaris yang bukan anggota pemegang saham mayoritas, pejabat yang berhubungan dengan pemegang saham mayoritas maupun manajemen dari suatu perusahaan, adanya dewan komisaris independen bertujuan untuk membentuk keseimbangan antara para stakeholder yang ada dalam perusahaan dan manajemen perusahaan (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Effendi (2016) adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya misalnya investor.

Dewan komisaris independen dalam perusahaan membantu investor mengelola perusahaan dan mencegah manajemen perusahaan mengambil tindakan optimis yang akan merugikan investor (Auliya, 2021).

2.1.3.2. Kriteria Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen yang ada di perseroan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Adapun kriteria penentuan komisaris independen perseroan sesuai dengan POJK Nomor 33/ POJK.04.2014 yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perseroan pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perseroan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

2.1.3.3. Komposisi Komisaris Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen. Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dewan

komisaris membentuk komite-komite yang berperan sebagai perangkat pendukung fungsi pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perseroan.

2.1.3.4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen

Menurut Subrata (2019), komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dilakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Paling tidak hal-hal yang dapat dilakukan seorang komisaris independen adalah:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola secara baik.

6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dipatuhi dan diterapkan secara baik.

Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), maka tugas komisaris independen adalah:

- Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.
- Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- Mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- Menjamin akuntabilitas organ perseroan (organ perseroan misalnya rapat umum pemegang saham).

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris Independen mengetuai komite audit dan komite nominasi. Komite audit adalah komite yang bertugas melakukan audit terhadap organisasi. Sementara komite nominasi bertugas membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang berapa jumlah komisaris independen. Berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian, seorang komisaris independen berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lain dan pendapatnya dicatat di dalam berita acara rapat dewan komisaris dan apabila pendapatnya berbeda secara material maka hal itu wajib dimasukkan ke dalam laporan tahunan.

2.1.3.5. Pengukuran Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan pokok dari *corporate governance* guna menjalankan supervisi kepada ketetapan pegawai instansi serta mengasih nasihat pada direksi serta supervisi kepada pengaplikasian konsep jangka lama (Khairani, 2019). Antara dewan komisaris yang tinggi dapat mengurangi kelicikan pada laporan perencanaan pajak hingga menaikkan integritas nilai informasi keuangan (Press, 2019). Secara global dewan komisaris diutus serta dikasih tanggung jawab dalam supervisi tingkat keterangan yang tercantum pada pelaporan perbankan (Wardani dan Juliani, 2018).

Komisaris independen merupakan salah satu pihak di dalam perusahaan yang memiliki fungsi monitoring dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan-kebjakan direksi yang dianggap dapat merugikan perusahaan maupun citra perusahaan di masa depan (Putriningsih et al., 2018). Komisaris independen dilambangkan dengan KI dan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

2.1.4. Kepemilikan Institusional

2.1.4.1. Pengertian Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain yang dapat diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun (Rosalia & Sapari, 2017).

Menurut Edison (2017) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar kepada manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan” (Nisa, 2017).

Dengan adanya kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan adanya pengawasan dan pihak institusi yang memiliki saham di dalam perusahaan dalam memonitoring kinerja manajemen, termasuk salah satunya yaitu penghindaran pajak (Rachmawati, 2021).

2.1.4.2. Peranan Kepemilikan Institusional

Menurut Febrianto (2020) kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional sebagai berikut:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan

mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Febrianto, 2020).

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Febrianto, 2020).

2.1.4.3. Wewenang Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan (Febrianto, 2020).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi (Kadir, 2016). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemilikan institusional yang memantau secara profesional perkembangan investasinya akan mengakibatkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Komang, 2017).

Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor non institusional. Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Randi, 2016).

Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan (Harnida, 2016).

2.1.4.4. Kelebihan Kepemilikan Institusional

Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen

perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyalurkan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Berikut adalah kelebihan-kelebihan kepemilikan institusional (Riadi, 2019):

1. Memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
5. Lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

2.1.4.5. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan (Pasaribu, 2016:156). Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat pada perusahaan (I Wayan,2016:177).

Sedangkan menurut Yuniati (2016:35) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury, 2016):

$$INST = \frac{\sum \text{Saham Institusional}}{\sum \text{Saham Beredar}}$$

2.1.5. Ukuran Perusahaan

2.1.5.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Wardani et al. (2016), yaitu besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva. Menurut Putriningsih et al. (2018), ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif dalam perpajakan.

Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan Ardiana, 2016). Menurut Ayu dan Gerianta (2018), mengemukakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya.

2.1.5.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional terbagi menjadi 3 jenis (Veronika, 2020):

1. Perusahaan Besar Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.
2. Perusahaan Menengah Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.
3. Perusahaan Kecil Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

2.1.5.3. Fungsi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar (Manis, 2020).

2.1.5.4. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan berbagai nilai seperti total aktiva, penjualan, modal, laba dan yang lainnya, nilai tersebut dapat menentukan besar kecilnya perusahaan. Indikator ukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$Size = \ln(\text{Total Assets})$$

2. Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini laba perusahaan akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$Size = \ln(\text{Total Penjualan})$$

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan, dengan melihat besarnya total aset, penjualan, log size, harga pasar saham, dan kapitalisasi pasar (Kimsen et al, 2018). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dilambangkan dengan SIZE dan proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan mengacu pada penelitian milik Puspita dan Febrianti (2017) sebagai berikut:

$$Size = \ln(\text{Total Assets})$$

2.2. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap penghindaran pajak. Terdapat beberapa hal penting dari penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penelitian ini. Berikut beberapa ikhtisar penelitian terdahulu:

1. Wardoyo et al., pada tahun 2022. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Profitabilitas pada *Tax Avoidance*". Metode pemilihan sampel didapatkan melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan dari 15 perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017 sampai dengan 2019 yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 42 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Monica et al., pada tahun (2021) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*". Populasi dalam penelitian ini adalah direksi, komisaris independen, dan manajer dari 45 perusahaan sektor industri manufaktur yang termasuk dalam indeks saham LQ45 periode tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 8 emiten perusahaan dan karakteristik responden dengan periode penelitian 2014-2018. Peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang berisi beberapa pernyataan. Kuesioner disebarkan kepada 40 orang responden dengan kriteria jabatan, yaitu direksi, komisaris, dan manajer dari 8 perusahaan sektor manufaktur yang masuk dalam indeks saham LQ45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki hubungan yang negatif terhadap *tax avoidance*.
3. Ardiyanto dan Marfiana pada tahun 2021. "Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi pada Penghindaran Pajak Perusahaan". Penelitian ini menggunakan

populasi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Dengan metode *purposive sampling*, sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 26 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

4. Junaedi et al., pada tahun 2021. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*". Populasi yang digunakan adalah 179 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019 menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
5. Wijayanti dan Merkusiwati pada tahun (2017) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak". Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 1.319 perusahaan dengan periode penelitian 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.
6. Dewi dan Oktaviani pada tahun 2021. "Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*". Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Populasi dari

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Sebanyak 75 sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

7. Simorangkir et al., pada tahun (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak”. Pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu panel data *regression*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 123 perusahaan dengan periode penelitian 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
8. Gita pada tahun 2021. "Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*". Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data berasal dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Metode yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah 59 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

9. Aulia dan Endang pada tahun (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*”. Pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 65 perusahaan dengan periode penelitian 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
10. Sulaeman pada tahun 2021. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". Penelitian ini memilih objek penelitian berupa laporan keuangan dari perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling* dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
11. Amaliah dan Tanjung pada tahun 2021. "*The Influence of Institutional Ownership and Firm Size on Tax Avoidance*". Pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Sampel penelitian terdiri atas 17 perusahaan dengan menggunakan metode sampling jenuh atau sensus. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Metode analisis yang

digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan Software STATA versi 16. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

12. Aulia dan Mahpudin pada tahun 2020. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*". Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian sebanyak 65 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan yakni, *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
1.	Wardoyo et al.,	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Profitabilitas pada <i>Tax Avoidance/2022</i>	Perusahaan sektor pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Menggunakan <i>purposive sampling</i> dan diperoleh 15 perusahaan	Analisis regresi linear berganda	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Monica et al.,	Pengaruh Komisaris Independen dan	Perusahaan sektor industri manufaktur yang	Analisis regresi	Komisaris independen memiliki

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
		Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> /2021	termasuk dalam indeks saham LQ45 tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menggunakan <i>purposive sampling</i> dan diperoleh 8 perusahaan	linear berganda	hubungan yang negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Ardiyanto dan Marfiana	Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi pada Penghindaran Pajak Perusahaan/2021	Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Dengan metode <i>purposive sampling</i> , sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 26 perusahaan	Analisis regresi linear berganda	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak
4.	Junaedi et al.,	Analisis Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan	Populasi yang digunakan adalah 179 perusahaan yang terdaftar di BEI 2017-2019 menggunakan <i>purposive sampling</i> .	Analisis regresi linear berganda	Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan ukuran

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
		terhadap <i>Tax Avoidance</i> /2021			perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak
5.	Wijayanti dan Merkusiwati	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak/2017	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015. Menggunakan <i>purposive sampling</i> dan diperoleh 1.319 perusahaan	Analisis regresi linear berganda	Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak
6.	Dewi dan Oktaviani	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional	Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-	Analisis regresi data panel	Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
		terhadap <i>Tax Avoidance/2021</i>	2020. Sebanyak 75 sampel dipilih dengan metode <i>purposive sampling</i>		
7.	Simorangkir et al.,	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak/2020	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019. Menggunakan <i>purposive sampling</i> dan diperoleh 123 perusahaan	Panel data <i>regression</i>	Proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
8.	Gita	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> , Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance/2021</i>	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Metode yang digunakan yaitu <i>purposive sampling</i> yang menjadi sampel adalah 59 perusahaan	Analisis regresi linear berganda	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	Aulia dan Endang	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran	Perusahaan manufaktur subsektor <i>property</i> dan <i>real</i>	Analisis regresi linear berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
		Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> /2020	<i>estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2018. Menggunakan <i>purposive sampling</i> dan diperoleh 65 perusahaan		penghindaran pajak
10.	Sulaeman	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)/2021	Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan yang diperoleh dengan metode <i>purposive sampling</i>	Analisis regresi linear berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
11.	Amaliah dan Tanjung	<i>The Influence of Institutional Ownership and Firm Size on Tax Avoidance</i> /2021	Pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Sampel penelitian terdiri atas 17	Analisis regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul/Tahun Penelitian	Populasi/Teknik Sampling	Uji Hipotesis	Hasil Penelitian
			perusahaan dengan menggunakan metode sampling jenuh atau sensus		
12.	Aulia dan Mahpudin	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance/2020</i>	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Populasi penelitian sebanyak 65 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan yakni, <i>purposive sampling</i> .	Analisis regresi linear berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

2.3. Kerangka Teoritis

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu: proporsi komisaris independent, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Peneliti mengharapkan adanya pengaruh signifikan antara variabel proporsi komisaris independent, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan, klasifikasi sektor penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020.

2.3.1. Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Penghindaran

Pajak

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017. Dengan banyaknya jumlah komisaris independen diharapkan dapat memperketat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka pengelolaan perusahaan terhadap pajak akan semakin baik dan tindakan penghindaran pajak akan semakin rendah.

2.3.2. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan perusahaan merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga luar perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat. Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen sehingga dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan. Adanya pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak

dikarenakan komisaris independen ikut memperhatikan manajemen dalam melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga kepemilikan instutusional dimungkinkan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak.

2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

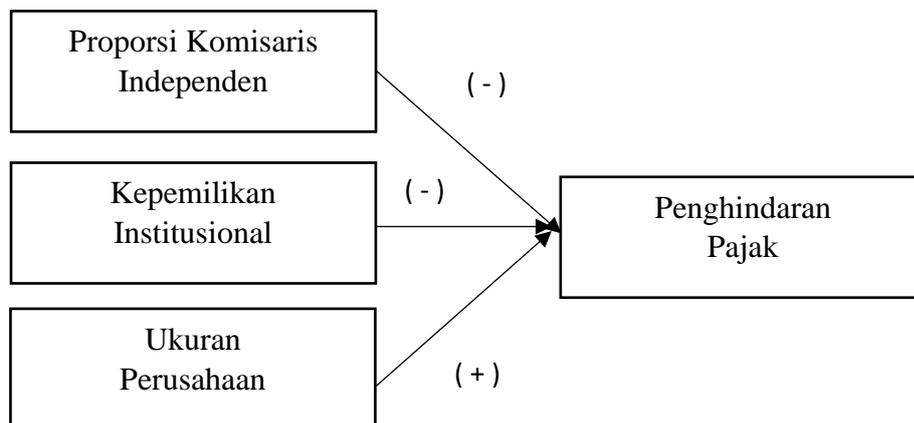
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba serta berlaku sebaliknya. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah stabil akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan selain memiliki fleksibilitas yang tinggi, transaksi yang terjadi pun akan semakin kompleks dan aset yang akan dihasilkan pun semakin besar sehingga perusahaan dengan ukuran yang besar

memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada agar dapat meminimalisir pembayaran pajak perusahaan.

2.4. Model Analisis

Berdasarkan pada kerangka teoritis yang telah dipaparkan oleh penulis maka berikut gambar model analisisnya:



2.5. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis, dapat dikemukakan hipotesis penelitian berikut:

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang harus diperhatikan untuk pertama kali adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut berisikan masalah yang dijadikan sebuah bahan untuk diteliti dan dicari pemecahannya. Menurut Satibi (2017) objek penelitian merupakan sesuatu yang secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif, yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliabel* tentang suatu hal (variabel tertentu).

Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek penelitian merupakan suatu gambaran yang dijadikan sasaran ilmiah untuk dapat diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahan masalahnya. Adapun objek penelitian yang akan diteliti terdiri atas variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Terdapat tiga variabel independen yang terdiri atas proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Serta satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menemukan fenomena tertentu disana dan ditetapkan sebagai suatu latar untuk diteliti. Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021 mencapai Rp16,97 kuadriliun. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kedua setelah industri pengolahan adalah sektor pertanian dengan nilai total Rp2,25 kuadriliun (13,28%), diikuti perdagangan besar dan eceran senilai Rp2,2 kuadriliun (12,97%), dan konstruksi senilai Rp1,77 kuadriliun (10,44%). Sepanjang tahun 2021 sektor pertambangan dan penggalian berhasil menyumbang Rp1,52 kuadriliun (8,98%), sektor informasi dan komunikasi Rp748,75 triliun (4,41%), jasa keuangan dan asuransi Rp736,19 triliun (4,34%), kemudian transportasi dan pergudangan Rp719,63 triliun (4,24%). (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan data diatas, sektor pertanian dan pertambangan memiliki kontribusi yang cukup tinggi sehingga memungkinkan adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi juga dikarenakan laba bersihnya cukup tinggi.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan (klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Peneliti memilih perusahaan dengan sektor tersebut dikarenakan sektor pertanian dan pertambangan memberikan

kontribusi yang cukup besar pada tahun 2021 yang memungkinkan adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi dikarenakan laba bersihnya cukup tinggi.

Peneliti mengambil data perusahaan yang bersumber dari www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara atau Teknik ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang terikait dengan objek dari penelitian dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel yang lain. Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk menguji teori dengan pengujian atau pembuktian hipotesis. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak (Sugiyono, 2018).

3.3.1. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan focus/komponen yang diteliti. Unit analisis dalam suatu penelitian biasanya juga menjadi unit observasi (Rabbani, 2020). Unit analisis dapat dibagi menjadi beberapa seperti individu, kelompok, organisasi, kategori sosial, institusi dan masyarakat (Priyono, 2016).

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan (klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

3.3.2. Populasi dan Sampel

3.3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan (Riadi, 2020). Menurut Handayani (2020) populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi adalah suatu himpunan individu dengan sifat-sifat yang ditentukan atau dipilih oleh peneliti sehingga setiap individu dapat menjadi anggota populasi atau tidak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan (klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
Pertanian (<i>Agriculture</i>)		
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2.	ANDI	Andira Agro Tbk.
3.	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
4.	BEEF	Estika Tata Tiara Tbk.
5.	BISI	BISI International Tbk.
6.	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.
7.	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk.
8.	DSFI	Dharma Samudera Fishing Indust
9.	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
10.	FAPA	FAP Agri Tbk.
11.	GOLL	Golden Plantation Tbk.
12.	GZCO	Gozco Plantations Tbk.
13.	JAWA	Jaya Agra Wattie Tbk.
14.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb
15.	MAGP	Multi Agro Gemilang Plantation
16.	MGRO	Mahkota Group Tbk.
17.	PALM	Provident Agro Tbk.
18.	PGUN	Pradiksi Gunatama Tbk.
19.	PNGO	Pinago Utama Tbk.
20.	PSGO	Palma Serasih Tbk.
21.	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
22.	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk.
23.	SMAR	Smart Tbk.
24.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
25.	UNSP	Bakrie Sumatera Plantations Tb

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
Pertambangan (<i>Mining</i>)		
26.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
27.	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
28.	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk.
29.	ARII	Atlas Resources Tbk.
30.	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk.
31.	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur
32.	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
33.	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk.
34.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
35.	BUMI	Bumi Resources Tbk.
36.	BYAN	Bayan Resources Tbk.
37.	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.
38.	CTTH	Citatah Tbk.
39.	DEWA	Darma Henwa Tbk.
40.	DKFT	Central Omega Resources Tbk.
41.	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.
42.	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.
43.	ELSA	Elnusa Tbk.
44.	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
45.	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk.
46.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
47.	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk
48.	HRUM	Harum Energy Tbk.
49.	IFSH	Ifishdeco Tbk.
50.	INCO	Vale Indonesia Tbk.
51.	INDY	Indika Energy Tbk.
52.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
53.	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.
54.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
55.	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
56.	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
57.	MITI	Mitra Investindo Tbk.
58.	MTFN	Capitalinc Investment Tbk.
59.	MYOH	Samindo Resources Tbk.
60.	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
61.	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk.
62.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
63.	PTRO	Petrosea Tbk.
64.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
65.	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.
66.	SMRU	SMR Utama Tbk.
67.	SURE	Super Energy Tbk.
68.	TINS	Timah Tbk.
69.	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
70.	TRAM	Trada Alam Minera Tbk.
71.	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk.
72.	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia yang telah diolah, 2021

Jumlah populasi yang akan diteliti oleh penulis adalah 72 perusahaan dengan sektor pertanian dan pertambangan (klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

3.3.2.2. Sampel

Menurut Silaen (2018) sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya. Sampel dapat juga diartikan sebagai wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili (Riadi, 2020).

Pada dasarnya, penarikan sampel (*sampling*) tidak perlu melibatkan semua populasi. Penarikan sampel dapat disebabkan oleh jumlah populasi yang berjumlah besar dan peneliti memiliki keterbatasan dalam meneliti semua populasi.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Ukuran Sampel

Menurut Handayani (2020) teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan *sampling* adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi.

Teknik *sampling* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling* (Fisipol, 2022). Adapun penjelasan dan jenis-jenis teknik pengambilan sampel atau *sampling* adalah sebagai berikut:

1. *Probability Sampling* (Sampel secara Probabilitas)

Probability sampling merupakan metode pengambilan sampel secara *random* atau acak. Semua anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Metode ini terbagi menjadi beberapa jenis yang lebih khusus, antara lain:

- Sampel Acak Sederhana (*Simple Random Sampling*)

Dikatakan *simple* atau sederhana dikarenakan pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan jika anggota populasi yang kecil dan dianggap homogen. Cara paling

populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel random sederhana adalah dengan melalui undian. Hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang tinggi namun tidak se-efisien *stratified sampling*.

Kelebihan metode ini dapat mengurangi bias serta dapat mengetahui *standard error* penelitian. Sementara kekurangannya yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel yang terpilih adalah benar dapat merepresentasikan populasi yang dimaksud.

- Sampel Sistematis (*Systematic Sampling*)

Hampir sama dengan *random sampling*, hanya saja sistematis memilih angka random dari tabel. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus (nomor urut) yang ke sekian dari daftar populasi. Sampling jenis ini mudah untuk digunakan bila sampel *frame* populasinya baik. Kelemahannya adalah dapat terjadi bias yang cukup tinggi.

- Sampling secara rambang proporsional (*Proportionate stratified random sampling*)

Salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Populasi harus diartikan sesuai segmennya: Proporsional diambil dari anggota populasi yang sebenarnya Populasi diambil dari anggota populasi lainnya.

- *Sampling* secara kluster (*Cluster Sampling*)

Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah, berupa kelompok kluster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut *cluster sampling* atau *multi-stage sampling*. Teknik *sampling* ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi atau dari suatu kabupaten.

2. *Non-Probability Sampling* (Teknik *sampling* secara non-probabilitas)

Teknik *sampling* non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. *Sampling* ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Adapun jenis-jenis teknik *sampling* secara non-probabilitas adalah sebagai berikut:

- *Sampling* Sistematis

Suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.

- *Sampling* Kuota

Teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan.

- *Sampling* Aksidental

Suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel, jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data.

- *Purposive Sampling*

Suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.

- *Sampling Jenuh*

Suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil.

- *Sampling Snowball*

Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar. Atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya.

Proses pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili sehingga sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi dari mana data diambil secara langsung. Generalisasi ialah penarikan kesimpulan dari suatu hal yang jumlah elemennya lebih sedikit sampel, ke suatu hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau lebih luas populasi (Riadi, 2020).

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang akan digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Alasan penggunaan teknik *purposive sampling* pada penelitian ini dikarenakan tidak semua sampel memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan sampel penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini:

1. Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2016-2020.
2. Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang telah mempublikasikan seluruh laporan keuangan secara lengkap selama periode 2016-2020.
3. Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian penghindaran pajak.

3.3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya (Aditya, 2021).

Menurut Pratama (2021) dalam proses pengumpulan data, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh seorang peneliti, yaitu:

1. Mengumpulkan data selengkap-lengkapya, bukan sebanyak-banyaknya.
2. Mempertimbangkan ketepatan data yang meliputi: jenis data, kegunaan data, waktu pengumpulan data, serta relevansi data.
3. Memperhatikan kebenaran data baik dari sumber maupun data itu sendiri.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data dokumen. Data dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan metode yang lebih mudah daripada metode-metode lain karena jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap. Objek yang diamati pada metode dokumentasi bukanlah benda hidup melainkan benda mati.

Menurut Handayani (2020). Dokumen sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan tertulis yang dibuat oleh seseorang.

2. Dokumen Resmi

Dokumen resmi adalah dokumen yang dimiliki oleh suatu institusi, organisasi, atau lembaga.

Data dokumen yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan (klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

3.3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017).

Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta masing-masing website resmi perusahaan selama periode 2016-2020.

3.3.5.1. Jenis Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa data kuantitatif, Data Kuantitatif merupakan data yang dapat dinyatakan dalam angka dan dapat diukur ukurannya (Pintek, 2021).

3.3.5.2. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak kedua (informen penguat data), dan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding atau rujukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017).

3.3.6. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau karakteristik dari sebuah objek penelitian yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Pratama, 2021). Dengan kata lain, variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, dan nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) variabel penelitian, yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Sedangkan penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

3.3.6.1. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut juga sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel bebas (independen) adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel bebas yang digunakan terdiri dari proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan.

1. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak memiliki saham secara langsung maupun tidak langsung pada emiten, tidak berafiliasi dengan emiten, anggota dewan komisaris lain, anggota direksi maupun pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan usaha atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen sehingga dapat mewakili kepentingan pemegang saham minoritas maupun pemangku kepentingan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan).

Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi komisaris independen adalah presentase jumlah komisaris independen dari total anggota dewan komisaris. Jumlah komisaris independen dan total anggota dewan komisaris dapat diketahui dari catatan atas laporan keuangan perusahaan. Menurut Putriningsih et al., (2018) komisaris independen dilambangkan dengan KI dan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

Keterangan:

KI	: Proporsi komisaris independen
Σ Komisaris Independen	: Total komisaris independen
Σ Dewan Komisaris	: Total komisaris perusahaan

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen (Edison, 2017). Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury, 2016):

$$INST = \frac{\Sigma \text{ Saham Institusional}}{\Sigma \text{ Saham Beredar}}$$

Keterangan:

INST	: Kepemilikan institusional
Σ Saham Institusional	: Total saham institusional
Σ Saham Beredar	: Total saham beredar

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya sebuah perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki. Menurut Palepu et al. (2019), ukuran perusahaan (*size*) dapat dinilai dengan logaritma natural dari total aset.

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Assets})$$

Keterangan:

Size : Ukuran perusahaan

Ln Total Aset : Logaritma natural total asset

3.3.6.2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama peneliti dan variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen dengan arah positif atau negatif (Sekaran dan Bougie, 2016). Menurut Hayati (2022) variabel dependen juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang tergantung pada faktor-faktor lain, dengan kata lain variabel yang berubah karena berubahnya variabel independen.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah

(*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (ATPETS, 2022).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini diproksikan menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan presentase besarnya beban pajak efektif yang harus dibayarkan suatu perusahaan pada tahun berjalan. ETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan (Andriyani dan Hutabarat, 2020). Nilai ETR yang semakin rendah menunjukkan adanya tindakan *tax avoidance* yang semakin tinggi yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Nulansari, 2021). Cara pengukurannya:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Pajak Penghasilan (Beban Pajak Kini)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

ETR : *Effective Tax Rate*

2. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak (Kas untuk Bayar Pajak)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Variabel independen proporsi komisaris independen	Dalam penelitian ini rasio proporsi komisaris independen dihitung dengan menggunakan perhitungan: $KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$	Rasio
Variabel independen kepemilikan institusional	Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan: $INST = \frac{\sum \text{Saham Institusional}}{\sum \text{Saham Beredar}}$	Rasio
Variabel independen ukuran perusahaan	Pengukuran variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan: $\text{Size} = \ln(\text{Total Assets})$	Rasio
Variabel dependen penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Pengukuran penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) perhitungan yaitu, ETR dan CETR. $ETR = \frac{\text{Pajak Penghasilan (Beban Pajak Kini)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ $CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak (Kas untuk Bayar Pajak)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

3.3.7. Teknik Analisis Data

3.3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016). Statistik deskriptif yaitu merupakan metode – metode yang juga berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Metode Statistik deskriptif hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah dimiliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel diagram grafik dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian – uraian singkat dan juga terbatas.

1. Rata-Rata (*Mean*)

Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. *Mean* dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan *mean* dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data (Qothrunnada, 2021).

$$Me = \frac{\sum Xi}{n}$$

Keterangan:

Me	: Rata-rata
\sum	: Epsilon (jumlah)
Xi	: Observasi ke-n
n	: Jumlah sampel

2. Standar Deviasi

Nilai *standard deviation* merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling baik, karena menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit observasi (Ghozali, 2016). Standar deviasi adalah nilai akar kuadrat dari suatu varians dimana digunakan untuk menilai rata-rata atau yang diharapkan. Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun dalam table frekuensi. Nilai *standard deviation* merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean (Sekaran & Bougie, 2016).

$$S = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{(n - 1)}}$$

Keterangan:

S : Simpangan baku sampel
n : Jumlah sampel
x : Rata-rata (*mean*)

3.3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS karena itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal (Asfihan, 2022). Jenis-jenis uji asumsi klasik menurut Asfihan (2022):

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk nilai residual. Seringkali kesalahan terjadi yaitu bahwa tes normalitas dilakukan untuk setiap variabel. Ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas dalam nilai residual bukan dalam variabel penelitian.

Tes normalitas dapat dilakukan dengan tes histogram, tes normal P-Plot, tes Chi-square, tes Skewness dan Kurtosis atau tes Kolmogorov-Smirnov. Tidak ada metode terbaik atau paling tepat. Sarannya adalah bahwa pengujian metode charting sering menyebabkan persepsi yang berbeda pada beberapa pengamat. Oleh karena itu, penggunaan uji normalitas dengan uji statistik tidak diragukan meskipun tidak dapat dijamin bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari pada pengujian dengan metode diagram.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Jika ada

korelasi yang tinggi antara variabel independen hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu.

Alat statistik yang biasanya digunakan untuk menguji gangguan multikolinieritas adalah *Variance Inflation Factor* (VIF), korelasi Pearson antara variabel independen atau pertimbangan nilai eigen dan indeks kondisi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas, diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Salah satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dalam varians antara residu dari satu pengamatan dan lainnya yang disebut *homoscedasticity*.

Bukti heteroskedastisitas dapat dibuat dengan menggunakan metode scatterplot dengan memplot nilai ZPRED (Nilai Prediktif) dengan SRESID (Nilai Sisa). Model yang baik adalah ketika grafik tidak mengandung pola tertentu, seperti Berkumpul di tengah, menyempit dan memperbesar atau sebaliknya Memperbesar dan memperkecil. Tes Glejser, tes Park atau tes Wei dapat digunakan sebagai tes statistik.

Beberapa solusi alternatif, jika model tersebut melanggar asumsi heteroskedastisitas adalah mengubahnya menjadi bentuk logaritmik. Ini hanya mungkin jika semua data positif. Atau semua variabel dapat dibagi dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana, analisis regresi

terdiri dari menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya.

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Model regresi dalam penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periode lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi.

Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan Run Test dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier. Beberapa cara untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah mengubah data atau mengubah model regresi menjadi persamaan perbedaan umum. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1.

3.3.8. Uji Korelasi

Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Misalnya tinggi dan berat, oleh karena itulah jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian (Hayati, 2020).

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan korelasi pearson. Korelasi Pearson (r) adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linier (Hayati, 2020).

$$r_{xy} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - (\sum_{i=1}^n y_i)^2}}$$

Keterangan:

r	: Koefisien korelasi pearson
n	: Jumlah sampel
$\sum_{i=1}^n x_i y_i$: Jumlah perkalian variabel X dan Y
$\sum_{i=1}^n x_i$: Jumlah nilai variabel X
$\sum_{i=1}^n y_i$: Jumlah nilai variabel Y

Koefisien korelasi (r_{xy}) dapat bernilai positif (+) atau negatif (-) dan berada pada rentang -1 dan 1 . Jika r_{xy} mendekati -1 atau 1 maka hubungan keeratan dua variabel semakin kuat. Jika nilainya mendekati 0 , maka hubungan keeratan dua variabel semakin lemah. Berikut ini adalah interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi.

1. $0 - 0,2$: menyatakan hubungan keeratan sangat lemah,
2. $0,2 - 0,4$: menyatakan hubungan keeratan lemah,
3. $0,4 - 0,7$: menyatakan hubungan keeratan cukup kuat,
4. $0,7 - 0,9$: menyatakan hubungan keeratan kuat,
5. $0,9 - 1$: menyatakan hubungan keeratan sangat kuat.

Tanda positif dan negatif pada koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan. Koefisien korelasi bertanda positif artinya hubungannya berbanding lurus, dimana semakin tinggi nilai variabel x maka nilai variabel y juga semakin tinggi dan semakin rendah nilai variabel x maka nilai variabel y juga semakin rendah. Koefisien korelasi bertanda negatif artinya hubungannya berbanding terbalik, dimana semakin tinggi nilai variabel x maka nilai variabel y semakin rendah dan semakin rendah nilai variabel x maka nilai variabel y semakin tinggi.

Ditinjau dari kemungkinan hasil studi, setidaknya ada tiga jenis korelasi yang dihasilkan, yaitu (Hayati, 2020):

1. Korelasi Positif

Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya, atau satu variabel menurun sedangkan variabel lainnya menurun.

Korelasi positif berkisar dari 0 hingga +1; batas atas yaitu +1 adalah koefisien korelasi positif sempurna. Korelasi positif sempurna menentukan bahwa, untuk setiap peningkatan unit dalam satu variabel, ada peningkatan proporsional di variabel lainnya.

2. Korelasi Negatif

Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya.

Korelasi negatif berkisar dari 0 hingga -1 ; batas bawah memberikan korelasi negatif yang sempurna. Korelasi negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk

setiap kenaikan satuan di satu variabel, ada penurunan satuan proporsional di variabel lainnya.

3. Korelasi Nol

Korelasi nol ada jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan. Korelasi nol adalah titik tengah rentang -1 hingga $+1$.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji korelasi pearson dikarenakan korelasi pearson dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Harus diingat bahwa nilai koefisien korelasi yang kecil (tidak signifikan) bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan.

3.3.9. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, baik secara parsial dan simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Pada dasarnya sebuah hipotesis berfungsi untuk membatasi dan memperkecil ruang

lingkup suatu penelitian sehingga memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data. (Prawiro, 2019)

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis dimulai dengan menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikansi dan penetapan kriteria pengujian. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji F, uji t dan koefisien determinan.

3.3.9.1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Menurut Hidayat (2016) uji regresi linear berganda pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas.
2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi
3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas diluar jangkauan sampel.

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/ *response* (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/ *predictor* (X_1, X_2, \dots, X_n). Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk

memprediksi nilai variable tak bebas/ *response* (Y) apabila nilai-nilai variabel bebasnya/ *predictor* (X_1, X_2, \dots, X_n) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel - variabel bebasnya. Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Variabel tak bebas
a	: Konstanta
b_1, b_2, b_3	: Nilai koefisien regresi variabel independen
X_1	: Proporsi komisaris independen
X_2	: Kepemilikan institusional
X_3	: Ukuran perusahaan
e	: Variabel lain yang tidak teridentifikasi

Keadaan-keadaan bila koefisien regresi (b_1, b_2, \dots, b_n) mempunyai nilai:

1. Nilai = 0. Dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X_1, X_2, \dots, X_n .
2. Nilainya negatif. Disini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel-variabel X_1, X_2, \dots, X_n .
3. Nilainya positif. Disini terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_n .

Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3.3.9.2. Uji-F

Uji-F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2016):

1. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan (simultan) terhadap variabel dependen/terikat.

2. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan (simultan) terhadap variabel dependen/terikat.

Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n-k), dimana n: jumlah pengamatan dan k: jumlah variabel. Nilai F dapat di hitung dengan menggunakan bantuan SPSS. Ketentuan yang digunakan dalam Uji-F sebagai berikut:

H_0 : $b_1, b_2, b_3 = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H_0 : $b_1, b_2, b_3 \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan dari proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3.3.9.3. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan Uji F (lihat perhitungan SPSS pada *Coefficient Regression Full Model/Enter*). Atau bisa diganti dengan Uji metode *Stepwise* (Hidayat, 2016).

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau

satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis alternatif (H_1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, maka pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H_0 : $b_1 = 0$, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H_a : $b_1 > 0$, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H_0 : $b_2 = 0$, kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H_a : $b_2 > 0$, kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H_0 : $b_3 = 0$, ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H_a : $b_3 > 0$, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas untuk menentukan tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel –

variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

Adapun kriteria yang ditunjukkan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai sig-t kurang dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti variabel independen secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sig-t lebih dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti variabel independen secara individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.3.9.4. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil (mendekati 0) berarti kemampuan variabel-variabel independen (perputaran modal kerja, struktur modal dan ukuran perusahaan) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (profitabilitas) amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum dapat dikatakan bahwa koefisien determinasi ganda (R^2) besarnya antara $0 < R^2 < 1$.

Koefisien determinasi parsial (r^2) digunakan untuk mengukur faktor manakah yang paling berpengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai r^2 yang besar menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Tujuan menghitung koefisien

determinasi parsial (r^2) adalah untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016).

Analisis koefisien determinasi diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya, yaitu:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd : Koefisien determinasi

r^2 : Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertanian dan pertambangan (klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*, atas dasar kesesuaian karakteristik dengan kriteria pemilihan yang ditentukan oleh peneliti sehingga diperoleh sampel perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	72
2.	Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang tidak berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020	(14)
3.	Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang tidak mempublikasikan seluruh laporan keuangan secara lengkap selama periode 2016-2020 (laporan keuangan dan laporan tahunan tidak ditemukan)	(3)
4.	Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang tidak menyediakan data terkait yang diperlukan untuk penelitian	(0)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel		55
Periode penelitian		5
Jumlah sampel pengamatan		275

Dari kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 55 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 275 data. Berikut ini adalah daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.2
Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan

No.	Kode	Nama Perusahaan
Pertanian (<i>Agriculture</i>)		
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2.	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
3.	BISI	BISI International Tbk.
4.	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.
5.	DSFI	Dharma Samudera Fishing Indust
6.	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
7.	GZCO	Gozco Plantations Tbk.
8.	JAWA	Jaya Agra Wattie Tbk.
9.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb
10.	MAGP	Multi Agro Gemilang Plantation
11.	PALM	Provident Agro Tbk.
12.	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
13.	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk.
14.	SMAR	Smart Tbk.
15.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
16.	UNSP	Bakrie Sumatera Plantations Tb
Pertambangan (<i>Mining</i>)		
17.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
18.	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
19.	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk.
20.	ARII	Atlas Resources Tbk.
21.	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk
22.	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastrukt
23.	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk.
24.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
25.	BUMI	Bumi Resources Tbk.
26.	BYAN	Bayan Resources Tbk.
27.	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.
28.	CTTH	Citatah Tbk.

Tabel 4.2
Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan

No.	Kode	Nama Perusahaan
29.	DEWA	Darma Henwa Tbk
30.	DKFT	Central Omega Resources Tbk.
31.	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.
32.	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk
33.	ELSA	Elnusa Tbk.
34.	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
35.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
36.	HRUM	Harum Energy Tbk.
37.	INCO	Vale Indonesia Tbk.
38.	INDY	Indika Energy Tbk.
39.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
40.	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk
41.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
42.	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
43.	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
44.	MITI	Mitra Investindo Tbk.
45.	MTFN	Capitalinc Investment Tbk.
46.	MYOH	Samindo Resources Tbk.
47.	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk
48.	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk.
49.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
50.	PTRO	Petrosea Tbk.
51.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
52.	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.
53.	SMRU	SMR Utama Tbk.
54.	TINS	Timah Tbk.
55.	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia yang telah diolah, 2021

Berdasarkan hasil sampling diatas terdapat 55 perusahaan yang lolos dalam teknik *purposive sampling*. Perusahaan hasil sampling diatas tidak seluruhnya dapat diolah dalam penelitian ini, dikarenakan ada beberapa perusahaan seperti MAGP, MITI, BUMI, dan lainnya yang termasuk dalam data outlier. Data outlier merupakan kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai

ekstrim. Sehingga dari 55 perusahaan diatas, data yang dapat dipergunakan hanya 43 perusahaan saja.

4.1.2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan sebuah gambaran mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI. Maka dilakukan perhitungan statistik terhadap data-data tersebut. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dalam hal ini statistik berhubungan dengan pengumpulan, peringkasan dan penyajian data dari peringkasan data tersebut.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI, selanjutnya bisa dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel yang diteliti pada tabel dibawah ini:

4.1.2.1. Proporsi Komisaris Independen

Tabel 4.3
Proporsi Komisaris Independen

No.	Kode	Proporsi Komisaris Independen					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (<i>Agriculture</i>)							
1	AALI	0.400	0.400	0.500	0.500	0.600	0.480
2	ANJT	0.250	0.250	0.250	0.286	0.286	0.264
3	BISI	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
4	BWPT	0.500	0.400	0.400	0.500	0.333	0.427
5	DSFI	0.500	0.500	0.500	0.400	0.400	0.460
6	DSNG	0.375	0.300	0.333	0.333	0.333	0.335
7	GZCO	0.250	0.333	0.250	0.333	0.333	0.300
8	JAWA	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
9	LSIP	0.333	0.333	0.333	0.400	0.400	0.360
10	PALM	0.500	0.400	0.400	0.400	0.333	0.407
11	SGRO	0.333	0.333	0.333	0.333	0.500	0.367
12	SIMP	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
13	SMAR	0.500	0.500	0.429	0.429	0.429	0.457
14	SSMS	0.333	0.333	0.250	0.250	0.250	0.283
15	UNSP	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	0.420
Pertambangan (<i>Mining</i>)							
16	ADRO	0.400	0.400	0.250	0.400	0.400	0.370
17	ANTM	0.333	0.333	0.400	0.333	0.333	0.347
18	APEX	0.667	0.333	0.333	0.333	0.333	0.400
19	ARTI	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
20	BRMS	0.333	0.667	0.667	0.667	0.333	0.533
21	BSSR	0.375	0.500	0.375	0.375	0.375	0.400
22	BYAN	0.400	0.400	0.333	0.400	0.400	0.387
23	CITA	0.333	0.333	0.333	0.400	0.500	0.380
24	CTTH	0.333	0.500	0.500	0.500	0.333	0.433
25	DOID	0.571	0.667	0.571	0.571	0.571	0.590
26	DSSA	0.500	0.500	0.500	0.600	0.600	0.540
27	ELSA	0.400	0.400	0.400	0.400	0.500	0.420
28	ENRG	0.500	0.500	0.400	0.600	0.600	0.520
29	GEMS	0.500	0.500	0.500	0.500	0.400	0.480
30	HRUM	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
31	INCO	0.300	0.300	0.333	0.200	0.300	0.287
32	INDY	0.500	0.500	0.400	0.400	0.400	0.440

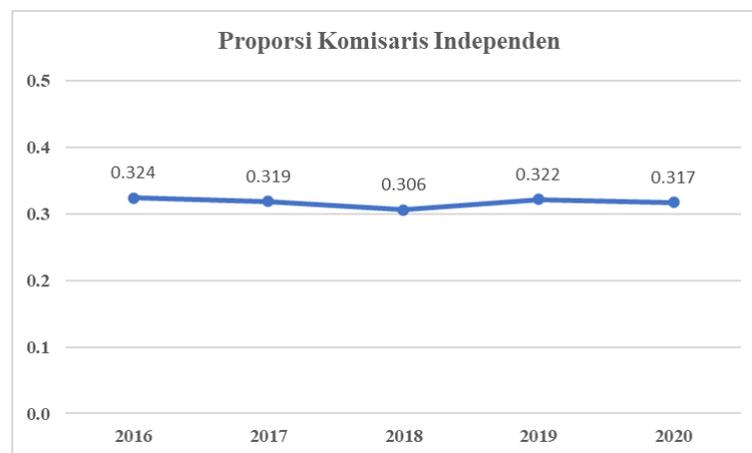
Tabel 4.3
Proporsi Komisaris Independen

No.	Kode	Proporsi Komisaris Independen					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
33	ITMG	0.400	0.286	0.400	0.500	0.429	0.403
34	KKGI	0.400	0.400	0.400	0.333	0.400	0.387
35	MBAP	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
36	MDKA	0.500	0.500	0.333	0.333	0.333	0.400
37	MEDC	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
38	MTFN	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
39	MYOH	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
40	PTRO	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
41	RUIS	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
42	SMRU	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
43	TOBA	0.667	0.400	0.400	0.667	0.667	0.560
	Max	0.667	0.667	0.667	0.667	0.667	0.590
	Min	0.250	0.250	0.250	0.200	0.250	0.264
	Mean	0.324	0.319	0.306	0.322	0.317	0.318

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, nilai proporsi komisaris independen tertinggi pada tahun 2016 dialami oleh Apexindo Pratama Duta Tbk dan TBS Energi Utama Tbk. Pada tahun 2017 nilai tertinggi dialami oleh dua perusahaan yaitu Bumi Resources Minerals Tbk dan Delta Dunia Makmur Tbk. Nilai tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh Bumi Resources Minerals Tbk. Sementara pada tahun 2019 terdapat 2 perusahaan yang memiliki nilai proporsi komisaris independen tertinggi yaitu Bumi Resources Minerals Tbk dan TBS Energi Utama Tbk. Sementara pada tahun 2020, TBS Energi Utama Tbk kembali mendapatkan nilai tertinggi. Dengan nilai tertinggi proporsi komisaris independen dari tahun 2016-2020 sama, yaitu 0.667.

Nilai proporsi komisaris independen terendah pada tahun 2016 dialami oleh Austindo Nusantara Jaya Tbk dan Gozco Plantations Tbk dengan nilai sebesar 0.250. Pada tahun 2017-2018, nilai terendah dialami oleh Austindo Nusantara Jaya Tbk dengan nilai 0.250. Pada tahun 2019 nilai terendah dialami oleh Vale Indonesia Tbk dengan nilai sebesar 0.200. Sementara pada tahun 2020 nilai proporsi komisaris independen paling rendah sebesar 0.250 dialami oleh Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Untuk perkembangan nilai rata-rata proporsi komisaris independen pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan periode 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Rata-Rata Proporsi Komisaris Independen

Pada tabel 4.3 dan gambar 4.1 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata proporsi komisaris independen pada tahun 2016 sebesar 0.324, pada tahun 2017 mengalami penurunan pada proporsi komisaris independen menjadi 0.319, pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali menjadi 0.306, sedangkan pada tahun 2019 mengalami

peningkatan menjadi 0.322, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali menjadi 0.317. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan rata-rata maksimal ada di tahun 2016 sedangkan rata-rata minimal ada pada tahun 2018.

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat juga disimpulkan bahwa tingkat proporsi komisaris independen perusahaan sektor pertanian dan pertambangan dengan rata rata 0.318 dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan mengenai dewan komisaris independen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yaitu dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen. Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

4.1.2.2. Kepemilikan Institusional

Tabel 4.4
Kepemilikan Institusional

No.	Kode	Kepemilikan Institusional					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (<i>Agriculture</i>)							
1	AALI	0.797	0.797	0.797	0.797	0.797	0.797
2	ANJT	0.817	0.817	0.817	0.817	0.817	0.817
3	BISI	0.541	0.541	0.541	0.541	0.541	0.541
4	BWPT	0.691	0.746	0.747	0.747	0.747	0.736
5	DSFI	0.740	0.740	0.740	0.693	0.693	0.721
6	DSNG	0.550	0.559	0.559	0.560	0.560	0.557
7	GZCO	0.626	0.284	0.284	0.284	0.284	0.352
8	JAWA	0.705	0.869	0.869	0.800	0.800	0.809
9	LSIP	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596
10	PALM	0.883	0.890	0.890	0.890	0.890	0.889
11	SGRO	0.728	0.727	0.725	0.725	0.670	0.715
12	SIMP	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785

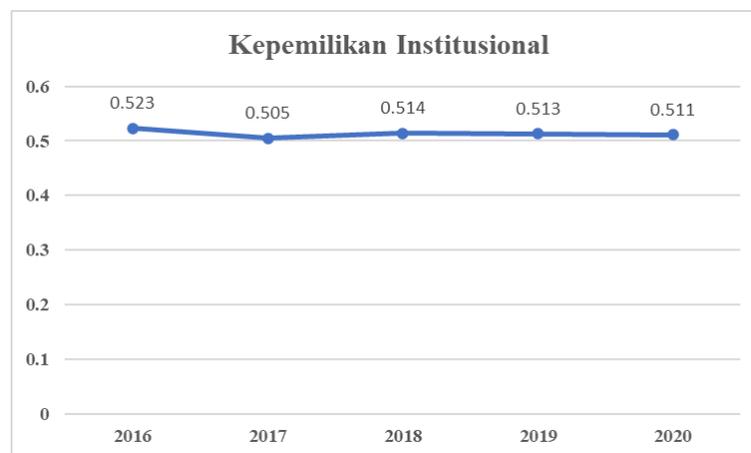
Tabel 4.4
Kepemilikan Institusional

No.	Kode	Kepemilikan Institusional					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
13	SMAR	0.972	0.924	0.924	0.924	0.924	0.934
14	SSMS	0.674	0.666	0.640	0.658	0.682	0.664
15	UNSP	0.031	0.031	0.264	0.173	0.186	0.137
Pertambangan (<i>Mining</i>)							
16	ADRO	0.439	0.439	0.439	0.439	0.439	0.439
17	ANTM	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650
18	APEX	0.840	0.821	0.829	0.840	0.870	0.840
19	ARTI	0.654	0.447	0.447	0.447	0.424	0.484
20	BRMS	0.945	0.807	0.798	0.877	0.887	0.863
21	BSSR	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
22	BYAN	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
23	CITA	0.968	0.974	0.974	0.973	0.977	0.973
24	CTTH	0.519	0.522	0.464	0.528	0.530	0.513
25	DOID	0.392	0.382	0.379	0.379	0.379	0.382
26	DSSA	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599
27	ELSA	0.560	0.560	0.560	0.560	0.560	0.560
28	ENRG	0.319	0.146	0.438	0.438	0.399	0.348
29	GEMS	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
30	HRUM	0.755	0.779	0.781	0.834	0.799	0.789
31	INCO	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795
32	INDY	0.687	0.684	0.684	0.684	0.684	0.685
33	ITMG	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651
34	KKGI	0.649	0.649	0.649	0.649	0.649	0.649
35	MBAP	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900
36	MDKA	0.757	0.610	0.514	0.456	0.434	0.554
37	MEDC	0.808	0.724	0.720	0.716	0.732	0.740
38	MTFN	0.515	0.396	0.448	0.448	0.396	0.441
39	MYOH	0.636	0.636	0.590	0.590	0.590	0.608
40	PTRO	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
41	RUIS	0.280	0.322	0.380	0.382	0.382	0.349
42	SMRU	0.490	0.501	0.589	0.589	0.604	0.555
43	TOBA	0.931	0.933	0.933	0.933	0.933	0.932
Max		0.972	0.974	0.974	0.973	0.977	0.973
Min		0.031	0.031	0.264	0.173	0.186	0.137
Mean		0.523	0.505	0.514	0.513	0.511	0.513

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai kepemilikan institusional tertinggi pada tahun 2016 dialami oleh Smart Tbk dengan nilai 0.972. Sementara pada tahun 2017-2020 nilai kepemilikan institusional tertinggi dialami oleh Cita Mineral Investindo Tbk dengan nilai 0.974, 0.974, 0.973 dan 0.977.

Nilai kepemilikan intitusional terendah pada tahun 2016-2020 dialami oleh Bakrie Sumatera Plantations Tb dengan nilai berturut-turut sebesar 0.031, 0.031, 0.264, 0.173, dan 0.186.

Untuk perkembangan nilai rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan periode 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Rata-Rata Kepemilikan Institusional

Pada tabel 4.4 dan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata kepemilikan institusional pada tahun 2016 sebesar 0.523, pada tahun 2017 mengalami penurunan pada kepemilikan institusional menjadi 0.505, pada tahun

2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 0.514, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dengan nilai kepemilikan institusional 0.513 dan 0.511.

Berdasarkan hasil rata-rata diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepemilikan institusional perusahaan sektor pertanian dan pertambangan dengan rata rata 0.513 dapat dikatakan cukup tinggi karena 51% sahamnya dimiliki institusi sehingga mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

4.1.2.3. Ukuran Perusahaan

Tabel 4.5
Ukuran Perusahaan

No.	Kode	Ukuran Perusahaan					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (<i>Agriculture</i>)							
1	AALI	30.818	30.847	30.922	30.926	30.955	30.894
2	ANJT	29.591	29.666	29.798	29.793	29.824	29.734
3	BISI	28.513	28.595	28.648	28.710	28.701	28.633
4	BWPT	30.419	30.403	30.414	30.391	30.343	30.394
5	DSFI	26.518	26.624	26.727	26.693	26.647	26.642
6	DSNG	29.733	29.752	30.094	30.084	30.281	29.989
7	GZCO	28.897	28.889	28.699	28.297	28.393	28.635
8	JAWA	28.822	28.829	28.867	28.881	28.882	28.856
9	LSIP	29.878	29.908	29.937	29.956	30.022	29.940
10	PALM	28.982	28.678	28.320	28.477	29.028	28.697
11	SGRO	29.751	29.745	29.830	29.879	29.908	29.823
12	SIMP	31.113	31.140	31.177	31.184	31.198	31.162
13	SMAR	30.895	30.931	31.009	30.956	31.187	30.996
14	SSMS	29.600	29.895	30.055	30.103	30.179	29.966
15	UNSP	30.319	30.262	30.224	29.759	29.656	30.044
Pertambangan (<i>Mining</i>)							
16	ADRO	32.110	32.154	32.259	32.239	32.130	32.178
17	ANTM	31.032	31.033	31.137	31.039	31.088	31.066
18	APEX	29.847	29.689	29.639	29.572	29.188	29.587
19	ARTI	28.593	28.550	28.621	28.211	27.472	28.289

Tabel 4.5
Ukuran Perusahaan

No.	Kode	Ukuran Perusahaan					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
20	BRMS	30.308	30.092	29.935	29.924	29.745	30.001
21	BSSR	28.536	28.677	28.898	28.880	28.943	28.787
22	BYAN	30.036	30.119	30.444	30.508	30.760	30.374
23	CITA	28.634	28.616	28.815	28.982	29.050	28.820
24	CTTH	27.146	27.275	27.324	27.333	27.265	27.269
25	DOID	30.109	30.179	30.474	30.429	30.250	30.288
26	DSSA	31.093	31.297	31.510	31.604	31.355	31.372
27	ELSA	29.064	29.211	29.364	29.549	29.654	29.368
28	ENRG	30.295	29.958	29.991	29.876	30.109	30.046
29	GEMS	29.317	29.711	29.948	30.016	30.071	29.812
30	HRUM	29.407	29.513	29.531	29.485	29.595	29.506
31	INCO	31.031	31.023	31.088	31.061	31.112	31.063
32	INDY	30.534	31.224	31.234	28.916	31.185	30.619
33	ITMG	30.419	30.544	30.670	30.453	30.425	30.502
34	KKGI	27.913	27.984	28.161	28.194	28.058	28.062
35	MBAP	28.078	28.410	28.552	28.615	28.574	28.446
36	MDKA	29.045	29.243	30.079	30.212	30.217	29.759
37	MEDC	31.515	31.876	31.963	32.055	32.051	31.892
38	MTFN	26.454	27.371	27.750	27.428	27.309	27.262
39	MYOH	28.313	28.243	28.416	28.432	28.388	28.358
40	PTRO	29.290	29.409	29.704	29.668	29.642	29.543
41	RUIS	27.610	27.590	27.621	27.855	27.928	27.721
42	SMRU	28.517	28.339	28.277	28.147	27.885	28.233
43	TOBA	28.888	29.183	29.614	30.083	30.019	29.557
	Max	32.110	32.154	32.259	32.239	32.130	32.178
	Min	26.454	26.624	26.727	26.693	26.647	26.642
	Mean	23.036	23.103	23.195	23.143	23.176	23.131

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai ukuran perusahaan tertinggi pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dialami oleh Adaro Energy Tbk dengan nilai berturut-turut 32.110, 32.154, 32.259, 32.239, dan 32.130.

Nilai ukuran perusahaan terendah pada tahun 2016 dialami oleh Capitalinc Investment Tbk dengan nilai sebesar 26.454. Sementara pada tahun 2017-2020,

nilai terendah dialami oleh Dharma Samudera Fishing Industries dengan nilai 26.624, 26.727, 26.693 dan 26.647.

Untuk perkembangan nilai rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan periode 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.3. Grafik Perkembangan Rata-Rata Ukuran Perusahaan

Pada tabel 4.5 dan gambar 4.3 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata ukuran perusahaan pada tahun 2016 sebesar 23.036, pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada ukuran perusahaan menjadi 23.103, pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 23.195, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai ukuran perusahaan 23.143, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 23.176.

Berdasarkan hasil rata-rata diatas dapat dilihat bahwa tingkat ukuran perusahaan sektor pertanian dan pertambangan dengan rata rata 23.131 dapat dikatakan rata-rata perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia merupakan

perusahaan berukuran besar dikarenakan ciri dari perusahaan besar adalah memiliki kekayaan bersih lebih bedar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan.

4.1.2.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Proksi ETR

Tabel 4.6
Penghindaran Pajak (ETR)

No.	Kode	Penghindaran Pajak (ETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (<i>Agriculture</i>)							
1	AALI	0.043	0.281	0.311	0.631	0.389	0.331
2	ANJT	0.525	0.352	1.074	1.610	0.853	0.883
3	BISI	0.260	0.223	0.201	0.242	0.245	0.234
4	BWPT	-0.164	-0.131	0.165	0.192	0.036	0.020
5	DSFI	0.253	0.263	0.247	0.233	0.161	0.231
6	DSNG	0.253	0.291	0.293	0.364	0.312	0.303
7	GZCO	0.029	0.196	0.159	0.063	0.178	0.125
8	JAWA	-0.012	0.147	0.014	0.108	0.039	0.059
9	LSIP	0.239	0.241	0.210	0.284	0.189	0.233
10	PALM	0.126	0.096	-0.286	0.012	-0.003	-0.011
11	SGRO	-0.722	0.370	0.555	0.770	2.909	0.777
12	SIMP	0.563	0.417	1.861	-2.257	0.666	0.250
13	SMAR	-0.817	0.018	0.148	0.229	0.262	-0.032
14	SSMS	0.302	0.277	0.745	0.922	0.354	0.520
15	UNSP	-0.888	-0.299	0.058	-0.017	-0.201	-0.270
Pertambangan (<i>Mining</i>)							
16	ADRO	0.377	0.423	0.418	0.340	0.287	0.369
17	ANTM	0.727	0.700	0.309	0.718	0.300	0.551
18	APEX	0.232	0.045	0.055	0.270	-0.014	0.118
19	ARTI	-3.527	0.121	0.283	0.000	-0.038	-0.632
20	BRMS	0.110	-0.436	0.000	-0.029	0.708	0.071
21	BSSR	0.230	0.259	0.260	0.263	0.253	0.253
22	BYAN	0.389	0.195	0.247	0.248	0.193	0.255
23	CITA	0.003	-0.014	0.088	0.225	0.228	0.106
24	CTTH	0.220	0.321	0.443	0.033	-0.119	0.179
25	DOID	0.389	0.461	0.299	0.413	0.038	0.320
26	DSSA	0.337	0.330	0.379	0.461	-9.685	-1.636
27	ELSA	0.244	0.232	0.215	0.236	0.278	0.241

Tabel 4.6
Penghindaran Pajak (ETR)

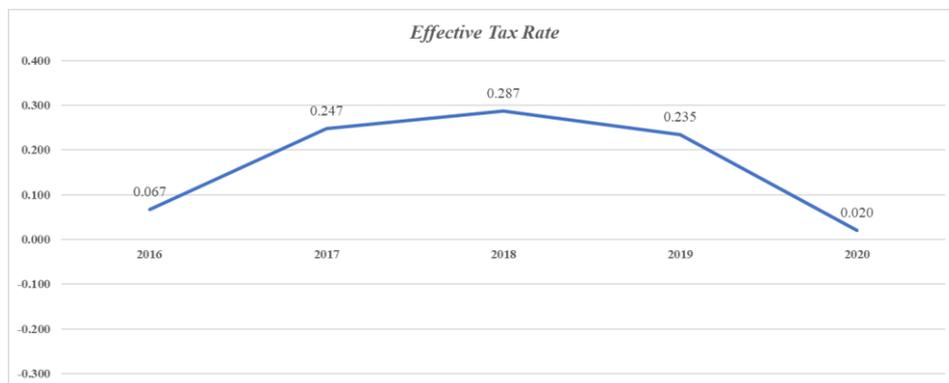
No.	Kode	Penghindaran Pajak (ETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
28	ENRG	-0.083	0.839	1.654	0.723	0.461	0.719
29	GEMS	0.007	0.282	0.258	0.335	0.246	0.226
30	HRUM	0.388	0.237	0.166	0.215	0.060	0.213
31	INCO	0.631	0.337	0.268	0.356	0.209	0.360
32	INDY	0.094	-0.072	0.631	0.908	-0.043	0.304
33	ITMG	0.319	0.302	0.296	0.320	0.479	0.343
34	KKGI	0.346	0.316	0.575	0.326	0.073	0.327
35	MBAP	0.250	0.255	0.256	0.272	0.265	0.260
36	MDKA	0.572	0.316	0.333	0.362	0.486	0.414
37	MEDC	0.241	0.473	0.921	1.113	-0.736	0.403
38	MTFN	-0.001	0.201	0.258	0.307	-0.189	0.115
39	MYOH	0.278	0.277	0.254	0.253	0.223	0.257
40	PTRO	-0.110	0.230	0.329	0.228	0.085	0.152
41	RUIS	0.525	0.462	0.393	0.347	0.427	0.431
42	SMRU	0.071	3.443	0.163	-0.013	0.060	0.745
43	TOBA	0.439	0.313	0.300	0.304	0.149	0.301
	Max	0.727	3.443	1.861	1.610	2.909	0.883
	Min	-3.527	-0.436	-0.286	-2.257	-9.685	-1.636
	Mean	0.067	0.247	0.287	0.235	0.020	0.171

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, nilai ETR tertinggi pada tahun 2016 dialami oleh Aneka Tambang Tbk sebesar 0.727, pada tahun 2017 nilai ETR tertinggi dialami oleh SMR Utama Tbk dengan nilai ETR sebesar 3.443, pada tahun 2018 Salim Ivomas Pratama Tbk memiliki nilai ETR tertinggi yaitu 1.861, sementara pada tahun 2019 perusahaan dengan nilai ETR tertinggi adalah Austindo Nusantara Jaya Tbk dengan nilai ETR sebesar 1.610, sedangkan pada tahun 2020 Sampoerna Agro Tbk memiliki nilai ETR tertinggi yaitu 2.909.

Nilai ETR terendah pada tahun 2016 dialami oleh Ratu Prabu Energi Tbk dengan nilai sebesar -3.527, pada tahun 2017 nilai ETR terendah dialami oleh Bumi Resources Minerals Tbk dengan nilai ETR sebesar -0.436, pada tahun 2018

Provident Agro Tbk memiliki nilai ETR terendah yaitu -0.286 dan pada tahun 2019 Salim Ivomas Pratama Tbk memiliki nilai ETR terendah sebesar -2.257. Sementara pada tahun 2020, nilai terendah dialami oleh Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan nilai ETR sebesar -9.685.

Untuk perkembangan nilai rata-rata ETR pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan periode 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.4. Grafik Perkembangan Rata-Rata Penghindaran Pajak (ETR)

Pada tabel 4.6 dan gambar 4.4 di atas, dapat dilihat nilai rata-rata ETR pada tahun 2016 sebesar 0.067, pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada ETR menjadi 0.247, pada tahun 2018 ETR mengalami peningkatan kembali menjadi 0.287, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai ETR 0.235, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 0.020.

Berdasarkan hasil rata-rata di atas dapat dilihat bahwa tingkat ETR sektor pertanian dan pertambangan dengan rata-rata 0.171 atau sama dengan 17.1%. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai ETR berada diantara 0 sampai dengan 1 menunjukkan bahwa adanya pembayaran beban pajak yang efektif, dan nilainya

tidak kurang dari 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan diatas tidak menunjukkan adanya tindakan *tax avoidance* yang semakin tinggi.

4.1.2.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Proksi CETR

Tabel 4.7
Penghindaran Pajak (CETR)

No.	Kode	Penghindaran Pajak (CETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (<i>Agriculture</i>)							
1	AALI	0.361	0.318	0.494	0.353	-0.383	0.229
2	ANJT	0.735	0.159	3.948	1.094	0.349	1.257
3	BISI	0.220	0.255	0.248	0.325	0.319	0.274
4	BWPT	-0.221	-0.303	-0.128	-0.011	-0.001	-0.133
5	DSFI	0.519	0.316	0.433	0.283	0.000	0.310
6	DSNG	0.493	0.148	0.497	1.107	0.154	0.480
7	GZCO	-0.012	-0.060	0.000	-0.008	0.250	0.034
8	JAWA	-0.001	-0.010	0.000	0.000	0.000	-0.002
9	LSIP	0.164	0.269	0.487	0.134	0.085	0.228
10	PALM	0.025	0.594	-0.116	-0.174	0.000	0.066
11	SGRO	0.729	0.252	1.307	0.611	0.357	0.651
12	SIMP	0.349	0.578	2.719	-1.561	0.222	0.461
13	SMAR	0.258	0.230	0.420	0.162	0.073	0.229
14	SSMS	0.217	0.274	1.210	1.913	0.269	0.777
15	UNSP	-0.625	-0.094	-0.020	-0.005	-0.009	-0.151
Pertambangan (<i>Mining</i>)							
16	ADRO	0.284	0.555	0.496	0.466	0.811	0.522
17	ANTM	0.421	0.431	0.436	1.069	0.204	0.512
18	APEX	-0.124	-0.020	-0.023	0.025	0.009	-0.026
19	ARTI	-5.051	1.729	0.387	-0.002	-0.001	-0.588
20	BRMS	-0.017	-0.023	-0.103	0.275	0.034	0.033
21	BSSR	0.562	0.221	0.424	0.605	0.174	0.397
22	BYAN	1.152	0.101	0.219	0.683	0.141	0.459
23	CITA	0.165	0.143	0.045	0.546	0.718	0.323
24	CTTH	0.239	1.003	0.410	-0.026	-0.031	0.319
25	DOID	0.340	0.461	0.344	0.793	0.756	0.539
26	DSSA	0.085	0.121	0.389	0.379	-5.222	-0.850

Tabel 4.7
Penghindaran Pajak (CETR)

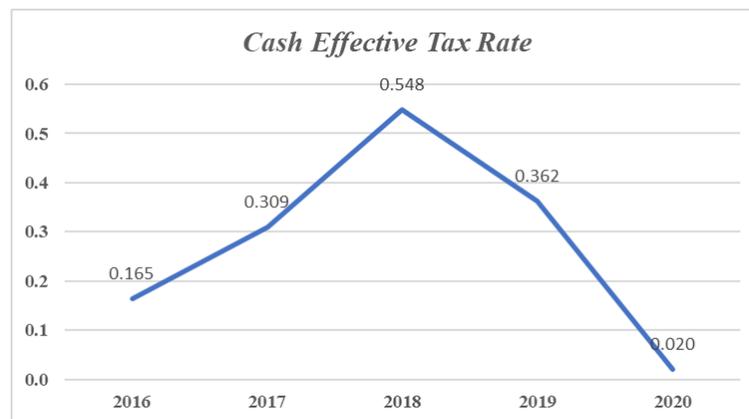
No.	Kode	Penghindaran Pajak (CETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
27	ELSA	0.364	0.430	0.610	0.502	0.744	0.530
28	ENRG	-0.096	1.464	3.968	0.521	0.567	1.285
29	GEMS	0.100	0.108	0.521	0.421	0.168	0.263
30	HRUM	0.047	0.189	0.578	0.574	0.059	0.290
31	INCO	6.550	-0.650	0.440	0.792	0.403	1.507
32	INDY	-0.215	0.163	1.028	4.264	-1.295	0.789
33	ITMG	0.339	0.165	0.297	0.599	0.864	0.453
34	KKGI	0.208	0.314	4.290	0.062	-0.175	0.940
35	MBAP	0.382	0.290	0.365	0.213	0.065	0.263
36	MDKA	-0.872	0.000	0.334	0.474	0.638	0.115
37	MEDC	0.090	0.565	0.849	1.176	-1.472	0.242
38	MTFN	0.000	2.263	0.431	0.012	-0.128	0.516
39	MYOH	0.325	0.434	0.202	0.292	0.230	0.297
40	PTRO	-0.553	0.180	0.091	0.319	0.425	0.092
41	RUIS	0.426	0.611	0.377	0.395	0.423	0.447
42	SMRU	0.200	2.620	0.935	-0.036	0.173	0.778
43	TOBA	0.503	0.219	0.278	0.280	0.147	0.285
	Max	6.550	2.620	4.290	4.264	0.864	1.507
	Min	-5.051	-0.650	-0.128	-1.561	-5.222	-0.850
	Mean	0.165	0.309	0.548	0.362	0.020	0.281

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, nilai CETR tertinggi pada tahun 2016 dialami oleh Vale Indonesia Tbk sebesar 6.550, pada tahun 2017 nilai CETR tertinggi dialami oleh SMR Utama Tbk dengan nilai CETR sebesar 2.620, pada tahun 2018 Resource Alam Indonesia Tbk memiliki nilai CETR tertinggi yaitu 4.290, sementara pada tahun 2019 perusahaan dengan nilai ETR tertinggi adalah Indika Energy Tbk dengan nilai CETR sebesar 4.264, sedangkan pada tahun 2020 Indo Tambangraya Megah Tbk memiliki nilai CETR tertinggi yaitu 0.864.

Nilai CETR terendah pada tahun 2016 dialami oleh Ratu Prabu Energi Tbk dengan nilai sebesar -5.051, pada tahun 2017 nilai CETR terendah dialami oleh

Vale Indonesia Tbk dengan nilai CETR sebesar -0.650, pada tahun 2018 Eagle High Plantations Tbk memiliki nilai CETR terendah yaitu -0.128, pada tahun 2019, Salim Ivomas Pratama Tbk dengan nilai CETR sebesar -1.561. Sementara pada tahun 2020, nilai terendah dialami oleh Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan nilai CETR sebesar -5.222.

Untuk perkembangan nilai rata-rata CETR pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan periode 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.5. Grafik Perkembangan Rata-Rata Penghindaran Pajak (CETR)

Pada tabel 4.7 dan gambar 4.5 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata CETR pada tahun 2016 sebesar 0.165, pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada CETR menjadi 0.309, pada tahun 2018 CETR mengalami peningkatan menjadi 0.548, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai CETR 0.362, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 0.020.

Berdasarkan hasil rata-rata diatas dapat dilihat bahwa tingkat CETR sektor pertanian dan pertambangan dengan rata rata 0.281 atau sama dengan 28.1%. Hal

ini menunjukkan bahwa jika nilai CETR berada di atas 25% menunjukkan bahwa tidak adanya praktik penghindaran pajak.

4.1.2.5. Rata-Rata dan Standar Deviasi

Statistik deskriptif dipergunakan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam suatu penelitian serta dapat menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel penelitian. Deskriptif dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	215	.200	.667	.40618	.096788
INST	215	.031	.977	.65637	.204463
SIZE	215	26.454	32.259	29.58571	1.271686
ETR	215	-9.685	3.443	.21896	.860451
CETR	215	-5.222	6.550	.35909	.986469
Valid N (listwise)	215				

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.8 terdapat informasi mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

1. Variabel penghindaran pajak dengan proksi ETR pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar -9.685, nilai maksimum 3.443, nilai rata-rata 0.21896, dan nilai standar deviasi sebesar 0.860451.

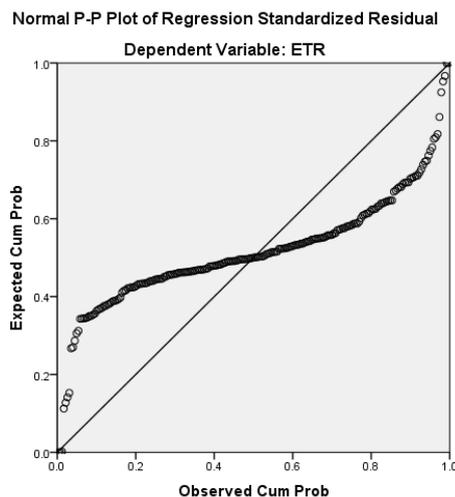
2. Variabel penghindaran pajak dengan proksi CETR pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar - 5.222, nilai maksimum 6.550, nilai rata-rata 0.35909, dan nilai standar deviasi sebesar 0.986469.
3. Variabel proporsi komisaris independen (KI) pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 0.200, nilai maksimum 0.667, nilai rata-rata 0.40618, dan nilai standar deviasi sebesar 0.096788.
4. Variabel kepemilikan institusional (INST) pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 0.031, nilai maksimum 0.977, nilai rata-rata 0.65637, dan nilai standar deviasi sebesar 0.204463.
5. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 26.454, nilai maksimum 32.259, nilai rata-rata 29.58571, dan nilai standar deviasi sebesar 1.271686.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi berganda mengharuskan untuk mencari keabsahannya, penelitian ini akan diuji menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik digunakan untuk memenuhi prasyarat dalam melakukan pengujian analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model

regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.1. Uji Normalitas



Gambar 4.6 Uji Normalitas (ETR)

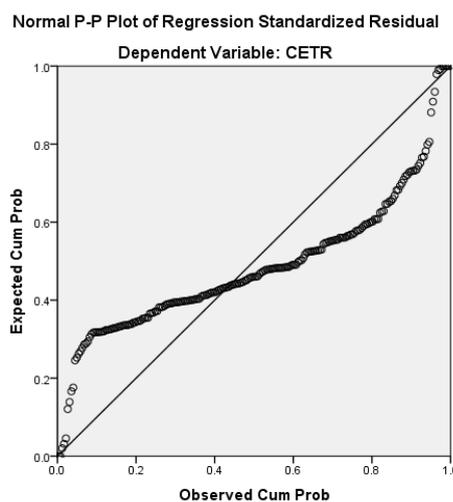
Berdasarkan gambar 4.6 bahwa titik menyebar cukup jauh dari sekitar garis dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka terjadi perselisihan dalam melihat titik-titik dari hasil output Normal P P-Plot tersebut, sehingga nilai residu yang dihasilkan dari data penelitian tersebut bernilai tidak normal. Untuk memastikan apakah nilai residu tersebut normal atau tidak, peneliti akan melakukan penelitian uji normalitas dengan menggunakan metode atau teknik lain, metode yang akan digunakan peneliti untuk menguji permasalahan diatas adalah uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan SPSS guna memastikan jika memang betul data tidak berdistribusi dengan normal.

Tabel 4.9
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		215
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.84958994
Most Extreme Differences	Absolute	.286
	Positive	.209
	Negative	-.286
Test Statistic		.286
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil output uji normalitas Kolmogorov Smirnov pada tabel 4.9 diatas, nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) bernilai 0.000 lebih kecil dari pada 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi dengan normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi tidak terpenuhi.



Gambar 4.7 Uji Normalitas (CETR)

Berdasarkan gambar 4.7 bahwa titik menyebar cukup jauh dari sekitar garis dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka terjadi perselisihan dalam melihat titik-titik dari hasil output Normal P P-Plot tersebut, sehingga nilai residu yang dihasilkan dari data penelitian tersebut bernilai tidak normal. Untuk memastikan apakah nilai residu tersebut normal atau tidak, peneliti akan melakukan penelitian uji normalitas dengan menggunakan metode atau teknik lain, metode yang akan digunakan peneliti untuk menguji permasalahan diatas adalah uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan SPSS guna memastikan jika memang betul data tidak berdistribusi dengan normal.

Tabel 4.10
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		215
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97413048
Most Extreme Differences	Absolute	.228
	Positive	.210
	Negative	-.228
Test Statistic		.228
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil output uji normalitas Kolmogorov Smirnov pada tabel 4.10 diatas, nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) bernilai 0.000 lebih kecil dari pada 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi

dengan normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi tidak terpenuhi.

4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independent dalam model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independent atau dengan kata lain, model regresi berganda yang baik adalah model regresi yang tidak mengalami multikolinieritas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KI	.997	1.003
	INST	.992	1.008
	SIZE	.995	1.005

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel independen > 0.10 yaitu 0.997 untuk variabel proporsi komisaris independen (KI), 0.992 untuk variabel kepemilikan institusional (INST), dan 0.995 untuk variabel ukuran perusahaan.

Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel < dari 0.10 yaitu 1.003 untuk variabel proporsi

komisaris independen, 1.008 untuk variabel kepemilikan institusional, dan 1.005 untuk variabel ukuran perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KI	.997	1.003
	INST	.992	1.008
	SIZE	.995	1.005

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel independen > 0.10 yaitu 0.997 untuk variabel proporsi komisaris independen (KI), 0.992 untuk variabel kepemilikan institusional (INST), dan 0.995 untuk variabel ukuran perusahaan.

Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel < dari 0.10 yaitu 1.003 untuk variabel proporsi komisaris independen, 1.008 untuk variabel kepemilikan institusional, dan 1.005 untuk variabel ukuran perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini.

4.2.3. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak mengalami autokorelasi. Pengujian durbin-watson (DW test) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah data terbebas dari autokorelasi atau tidak. autokorelasi. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai $du \leq d \leq 4-du$.

Tabel 4.13
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.158 ^a	.025	.011	.855608	2.016

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: ETR

Tabel 4.14
Durbin-Watson test Bound

	k=3	
N	dL	dU
215	1.747	1.790

Dari tabel hasil uji autokorelasi diatas, diperoleh nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 2.016. Nilai Durbin-Watson (d) 2.016 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1.790 dan kurang dari (4-dU) $4-1.790=2.210$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji durbin Watson diatas, dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian diatas dapat dilakukan atau dilanjutkan.

Tabel 4.15
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.158 ^a	.025	.011	.981031	2.004

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: CETR

Tabel 4.16
Durbin-Watson test Bound

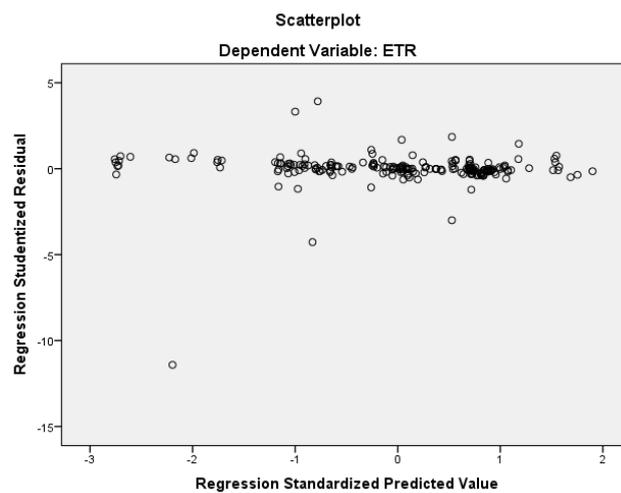
	k=3	
N	dL	dU
215	1.747	1.790

Dari tabel hasil uji autokorelasi diatas, diperoleh nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 2.004. Nilai Durbin-Watson (d) 2.004 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1.790 dan kurang dari (4-dU) $4-1.790=2.210$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji durbin Watson diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian diatas dapat dilakukan atau dilanjutkan.

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

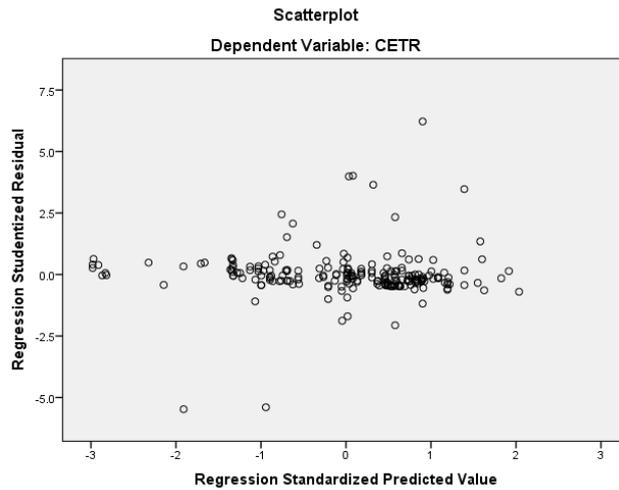
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heteroskedastisitas).

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Scatter Plot*. Dimana apabila tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.8 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat titik-titik tersebut berada pada angka 0 pada sumbu Y dan membentuk pola tertentu. Titik-titik data tidak tersebar sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas.



Gambar 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.9 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat titik-titik tersebut berada pada angka 0 pada sumbu Y dan membentuk pola tertentu. Titik-titik data tidak tersebar luas, namun cukup tersebar, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3. Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan nilai yang menunjukkan keeratan hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen untuk memberikan interpretasi pada koefisien korelasi yang diperoleh. Acuan yang digunakan peneliti untuk menjadi interpretasi gambaran korelasi sebagai berikut:

Tabel 4.17
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat Kuat

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan *software* SPSS:

Tabel 4.18
Hasil Uji Korelasi
Correlations

		KI	INST	SIZE	ETR	CETR
KI	Pearson Correlation	1	-.051	-.001	-.156*	-.153*
	Sig. (2-tailed)		.456	.984	.022	.025
	N	215	215	215	215	215
INST	Pearson Correlation	-.051	1	.072	.002	-.031
	Sig. (2-tailed)	.456		.294	.975	.654
	N	215	215	215	215	215
SIZE	Pearson Correlation	-.001	.072	1	-.026	-.004
	Sig. (2-tailed)	.984	.294		.708	.954
	N	215	215	215	215	215
ETR	Pearson Correlation	-.156*	.002	-.026	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.022	.975	.708		.000
	N	215	215	215	215	215
CETR	Pearson Correlation	-.153*	-.031	-.004	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.025	.654	.954	.000	
	N	215	215	215	215	215

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel output diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate pearson diatas.

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi Sig. (2-tailed)

Dari tabel output diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara proporsi komisaris independen (KI) dengan penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar $0.022 < 0.05$, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel KI dengan ETR. Sementara nilai Sig. (2-tailed) hubungan proporsi komisaris independen (KI) dengan penghindaran pajak (CETR) adalah sebesar $0.025 < 0.05$ maka terdapat korelasi yang signifikan antara variabel KI dengan CETR. Selanjutnya, hubungan antara kepemilikan institusional (INST) dengan penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0.975 > 0.05$ maka tidak terdapat korelasi antara variabel INST dengan ETR. Sementara nilai Sig. (2-tailed) hubungan antara kepemilikan institusional (INST) dengan penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0.654 > 0.05$ maka tidak terdapat korelasi antara variabel INST dengan CETR. Selanjutnya, hubungan antara ukuran perusahaan (SIZE) dengan penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0.708 > 0.05$ maka tidak terdapat korelasi antara variabel SIZE dengan ETR. Sementara nilai Sig. (2-tailed) hubungan antara ukuran perusahaan (SIZE) dengan penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0.954 > 0.05$ maka tidak terdapat korelasi antara variabel SIZE dengan CETR.

2. Berdasarkan Nilai r hitung (*Pearson Correlations*)

Diketahui nilai r hitung untuk hubungan proporsi komisaris independen (KI) dengan penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar $0.156 > r \text{ tabel } 0.133$ maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel KI dengan ETR. Karena r hitung atau *Pearson Correlation* dalam analisis ini bernilai negatif berarti hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat negatif atau dengan kata lain semakin meningkatnya proporsi komisaris independen maka tingkat penghindaran pajak akan menurun. Sementara nilai r hitung untuk hubungan proporsi komisaris independen (KI) dengan penghindaran pajak (CETR) adalah sebesar $0.153 > r \text{ tabel } 0.133$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara variabel KI dengan CETR. Karena r hitung atau *Pearson Correlation* dalam analisis ini bernilai negatif berarti hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat negatif atau dengan kata lain semakin meningkatnya proporsi komisaris independen maka tingkat penghindaran pajak akan menurun. Selanjutnya, nilai r hitung untuk hubungan kepemilikan institusional (INST) dengan penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar $0.002 < r \text{ tabel } 0.133$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel INST dengan ETR. Sementara nilai r hitung untuk hubungan kepemilikan institusional (INST) dengan penghindaran pajak (CETR) adalah sebesar $0.031 < r \text{ tabel } 0.133$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel INST dengan CETR. Selanjutnya, nilai r hitung untuk hubungan ukuran perusahaan (SIZE) dengan penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar $0.026 < r \text{ tabel } 0.133$ maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi antara variabel SIZE dengan ETR. Sementara nilai r hitung untuk hubungan ukuran perusahaan (SIZE) dengan penghindaran pajak (CETR) adalah sebesar $0.004 < r$ tabel 0.133 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel SIZE dengan CETR.

3. Berdasarkan Tanda Bintang (*) SPSS

Dari output diatas diketahui bahwa nilai Pearson Correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai dua tanda bintang (**), ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%.

4.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen pada variabel dependen serta untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independent pada variabel dependen.

4.4.1. Uji Statistik F

Uji-F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji-F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

3. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan (simultan) terhadap variabel dependen/terikat.
4. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan (simultan) terhadap variabel dependen/terikat.

Tabel 4.19
Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.974	3	1.325	1.810	.146 ^b
	Residual	154.466	211	.732		
	Total	158.440	214			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan merujuk pada kedua dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.146.

Karena nilai Sig. $0.146 > 0.05$, maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak atau dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi ETR.

2. Berdasarkan Perbandingan Nilai F Hitung dengan F Tabel

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 1.810. Karena nilai F hitung $1.810 < F \text{ tabel } 2.647$, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak atau dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi ETR.

Tabel 4.20
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.177	3	1.726	1.793	.150 ^b
	Residual	203.071	211	.962		
	Total	208.248	214			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan merujuk pada kedua dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.150. Karena nilai Sig. $0.150 > 0.05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak diterima atau dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan

institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR.

2. Berdasarkan Perbandingan Nilai F Hitung dengan F Tabel

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 1.793. Karena nilai F hitung $1.793 < F \text{ tabel } 2.647$, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak diterima atau dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR.

4.4.2. Uji Statistik T

Uji-t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.

1. Jika nilai signifikansi uji-t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji-t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.21
Uji Parsial (Uji-T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.307	1.388		.942	.347
	KI	-1.391	.605	-.156	-2.298	.023
	INST	-.017	.287	-.004	-.058	.954
	SIZE	-.017	.046	-.026	-.376	.708

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 1.307 + (- 1.391) \text{KI} + (-0.017) \text{INST} + (-0.017) \text{SIZE} + e$$

Berdasarkan tabel 4.21 diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel proporsi komisaris independen (X1) adalah sebesar 0.023. Dikarenakan nilai Sig. $0.023 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat pengaruh proporsi komisaris independen (X1) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y).

Uji-t kedua dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel kepemilikan institusional (X2) adalah sebesar 0.954. Dikarenakan nilai Sig. $0.954 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y).

Uji-t ketiga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y). Berdasarkan tabel diatas,

diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel ukuran perusahaan (X3) adalah sebesar 0.708. Dikarenakan nilai Sig. $0.708 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y).

Tabel 4.22
Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.154	1.592		.725	.469
KI	-1.578	.694	-.155	-2.275	.024
INST	-.186	.329	-.039	-.565	.573
SIZE	-.001	.053	-.001	-.020	.984

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 1.154 + (-1.578) \text{ KI} + (-0.186) \text{ INST} + (-0.001) \text{ SIZE} + e$$

Berdasarkan tabel 4.22 diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel proporsi komisaris independen (X1) adalah sebesar 0.024. Dikarenakan nilai Sig. $0.024 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat pengaruh proporsi komisaris independen (X1) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y).

Uji t kedua dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel kepemilikan

institusional (X2) adalah sebesar 0.573. Dikarenakan nilai Sig. 0.573 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y).

Uji t ketiga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel ukuran perusahaan (X3) adalah sebesar 0.984. Dikarenakan nilai Sig. 0.984 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y).

4.4.3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23
Uji Koefisien Determinasi (ETR)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.158 ^a	.025	.011	.855608

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: ETR

Besarnya koefisien determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Kd &= R^2 \times 100\% \\ &= 0.025 \times 100\% \\ &= 2.5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.23 menunjukkan nilai *Nagelkerke's R. Square* sebesar 0.025 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebesar 2.5% sedangkan 97.5% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variasi variabel penghindaran pajak (ETR) sebesar 2.5%.

Tabel 4.24
Uji Koefisien Determinasi (CETR)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.158 ^a	.025	.011	.981031

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: CETR

Besarnya koefisien determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Kd &= R^2 \times 100\% \\ &= 0.025 \times 100\% \\ &= 2.5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.24 menunjukkan nilai *Nagelkerke's R. Square* sebesar 0.025 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran

perusahaan sebesar 2.5% sedangkan 97.5% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variasi variabel penghindaran pajak (CETR) sebesar 2.5%.

4.5. Pembahasan, Implikasi, dan Keterbatasan

4.5.1. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan melalui beberapa pengujian seperti regresi secara parsial maupun simultan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berikut ini dipaparkan mengenai penjelasan atas jawaban dari hipotesis penelitian:

Hasil penelitian statistik secara simultan (uji-f) menunjukkan bahwa secara bersama-sama proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR) sebagai variabel dependen. Sedangkan hasil penelitian statistik secara simultan (uji-f) menunjukkan bahwa secara bersama-sama proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR) sebagai variabel dependen.

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan diatas tentang pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, berikut adalah pemaparan pengaruh yang terjadi diantara variabel-variabel tersebut:

1. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Hipotesis pertama yaitu proporsi komisaris independen, memberikan nilai signifikansi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan sehingga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima karena hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.20. Koefisien bernilai negatif yang menandakan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang efektif mampu mengurangi kemungkinan adanya perilaku penghindaran pajak. Hal ini sama dengan nilai signifikansi proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak (CETR) menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan, hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima karena hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.21. Koefisien bernilai negatif menandakan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang efektif mampu mengurangi kemungkinan adanya perilaku penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan pengangkatan dewan komisaris independen yang dilakukan untuk memenuhi regulasi dan dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* dan ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% membuat dewan komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan

perusahaan, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardoyo et al., (2022), Monica et al., (2021), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), dan Simorangkir et al., (2020).

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kedua yaitu kepemilikan institusional, memberikan nilai signifikansi yang lebih besar jika dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima karena hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.20 yang berarti terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas perilaku untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Koefisien memiliki arah yang negatif sehingga mengindikasikan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional akan menurunkan perilaku penghindaran pajak, kondisi tersebut terjadi sebab investor institusi aktif melakukan monitoring guna mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan terlebih lagi tentang penghindaran pajak. Hal ini sama dengan nilai signifikansi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (CETR) menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemilikan institusional lebih besar jika dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusannya, yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat

diterima karena hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.21. Koefisien bernilai negatif yang menandakan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional akan menurunkan perilaku penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan teori tentang kepemilikan institusional yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan akan mendorong perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan ketatnya pengawasan institusi terhadap perusahaan. Hipotesis ini bertentangan dengan Ardiyanto dan Marfiana (2021), Junaedi et al., (2021), Dewi dan Oktaviani (2021), Simorangkir et al., (2020), Gita (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara hipotesis ini sejalan dengan Wijayanti dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan yang dinilai dengan logaritma natural total asset, pada tabel 4.20 dengan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusannya yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR). Sama halnya dengan ukuran perusahaan pada tabel 4.21 dengan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusannya yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). Hal ini bertentangan dengan teori ukuran perusahaan yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat perusahaan maka perusahaan akan

sebaik mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang akan menyorot perusahaan, perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan ketika perusahaan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan para regulator sebagai pengambil keputusan kebijakan perusahaan. Karena pada umumnya perusahaan yang berskala besar dengan kas dan modal sebagai bagian dari aset yang besar cukup digunakan untuk melakukan pendanaan aktivitas operasional perusahaan. Koefisien ukuran perusahaan bernilai negatif yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin sedikit penghindaran pajak perusahaan. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan hubungan ini adalah kenyataan bahwa peningkatan ukuran perusahaan biasanya meningkatkan laba perusahaan dan organisasi memiliki tujuan jangka panjang guna memaksimalkan kekayaan pemegang saham, namun melakukan penghindaran pajak akan melumpuhkan hubungan perusahaan dengan pemerintahan dan masyarakat luas dalam jangka pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yunanda (2016), Cahyono, et al (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ini tidak sejalan dengan Aulia dan Endang (2020), Sulaeman (2021), Amaliah dan Tanjung (2021), dan Aulia dan Mahpudin (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.5.2. Implikasi

4.5.2.1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini mendukung dan membantah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardoyo et al., (2022), Monica et al., (2021), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), dan Simorangkir et al., (2020) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti et al., (2017) dan Hudha, et al., (2020), yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan untuk penelitian kepemilikan institusional memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Ardiyanto dan Marfiana (2021), Junaedi et al., (2021), Dewi dan Oktaviani (2021), Simorangkir et al., (2020), Gita (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara hipotesis ini sejalan dengan Wijayanti dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu, untuk penelitian ukuran perusahaan memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil

penelitian ini sejalan dengan Yunanda (2016), Cahyono, et al (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ini tidak sejalan dengan Aulia dan Endang (2020), Sulaeman (2021), Amaliah dan Tanjung (2021), dan Aulia dan Mahpudin (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.5.2.2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, implikasi praktis dari hasil penelitian yaitu bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak, maka perlu memperhatikan proporsi komisaris independen karena hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada hasil penelitian ini proporsi komisaris independen menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Besar kecilnya proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu dibutuhkan ketercukupan jumlah komisaris independen sehingga tidak hanya memenuhi regulasi namun mampu untuk menegakkan *good corporate governance* serta mampu melakukan pengawasan bagi perusahaan lebih lanjut.

4.5.3. Keterbatasan

Setelah melakukan analisis data, pengujian data, dan interpretasi hasil terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 43 perusahaan sektor pertanian dan pertambangan. Jumlah sampel ini sangat sedikit karena jumlah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada 72 perusahaan.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebagian faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Jika variabel ditambah, akan lebih besar kemungkinan untuk memperoleh hasil yang lebih mendekati teori yang telah dipaparkan pada landasan teoritis.
3. Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengamatan yang relatif pendek yaitu selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 43 perusahaan dari 72 populasi. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS *Statistic* 23.

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hipotesis pertama (H_1) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak baik melalui proksi ETR dan CETR. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H_1 diterima. Dengan demikian variabel proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil variabel proporsi komisaris independen menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam sebuah perusahaan akan memperkecil praktik penghindaran pajak suatu perusahaan dikarenakan

adanya anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki tanggung jawab pokok untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sehingga tinggi rendahnya proporsi komisaris independen suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

2. Berdasarkan hipotesis kedua (H_2) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak baik secara ETR dan CETR. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil variabel kepemilikan institusional menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan.
3. Berdasarkan hipotesis ketiga (H_3) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak baik secara ETR dan CETR. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil variabel ukuran perusahaan menjelaskan bahwa besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan.

5.2. Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan serta terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis akan memberikan saran guna mengatasi ketebatasan-keterbatasan yang ada. Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saran Teoritis

Saran teoritis yang dapat diberikan penulis untuk peneliti berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menguji variabel independen lain yang mempengaruhi terjadinya perilaku penghindaran pajak seperti kepemilikan manajerial, kompensasi rugi fiskal, komite audit, dan lain sebagainya.
2. Peneliti selanjutnya dapat memilih objek penelitian lain diluar sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti sektor aneka industri, industri barang konsumsi, keuangan, dan lain sebagainya.
3. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan proksi penghindaran pajak yang lain, seperti *book tax gaap* maupun melalui aktivitas *tax shelter* untuk dijadikan perbandingan.

5.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penghindaran pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat lebih konsisten dalam penerapan dan pengungkapan informasi *corporate governance*, tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan. Sehingga kedepannya perilaku penghindaran pajak dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.
2. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan membantu pihak manajemen perusahaan dalam memberikan keputusan tentang bagaimana mencegah perilaku penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan.
3. Bagi investor sebaiknya sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi, investor memerlukan pengkajian terlebih dahulu mengenai kinerja perusahaan dan tetap memenuhi peraturan tentang perpajakan, walaupun penghindaran pajak diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ikhsan. 2020. "Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman." Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 20, No. 1.
- Aditya, Rifan. 2021. "Jenis Teknik Pengumpulan Data." www.suara.com. Diakses pada 6 Mei 2022
- Amaliah, N., dan Tanjung, A. H. 2021. "*The Influence of Institutional Ownership and Firm Size on Tax Avoidance.*" *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 318-328.
- Andriyani, Jessica dan Francis Hutabarat. 2020. "Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Mediasi Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Property*." *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 5, No. 2.
- Anisa, Nuraini. 2021. "Peran Dewan Komisaris Independen Memoderasi Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan."
- Ardiyanto dan Marfiana. 2021. "Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi pada Penghindaran Pajak Perusahaan."
- Armeida, Nelly. 2020. "Pengaruh kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan."
- Asfihan. Akbar. "Uji Asumsi Klasik."
- Astuti dan Aryani. 2017. "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014." *Jurnal Akuntansi*, Vol. 20, No. 3.
- ATPETS. 2022. "Memahami Arti *Tax Avoidance*." Asosiasi *Tax Center* Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. www.atpetsi.or.id. Diakses pada 1 April 2022.
- Aulia, Ismiani dan Endang Mahpudin. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*." *AKUNTABEL* 17 (2).
- Aulia, I., dan Mahpudin, E. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*." *Akuntabel*, 17(2), 289-300.

- Auliyam Asfahanni, Barkah, dan Annisa. 2021. “Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*.” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.
- Ayu, Putu Widiastari dan Gerianta Wirawan Yasa. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, *Free Cash Flow*, dan Ukuran Perusahaan pada Nilai Perusahaan.” ISSN: 2302- 8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23.2. Mei (2018): 957-981.
- Ayza, Bustamar. 2017. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Badoa, M. E. 2020. “Pengaruh *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen.” Di dalam: Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 (pp. 2.55.1-2.55.8). Jakarta: Universitas Trisakti.
- Cahyo. 2016. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan *Cross Listed* terhadap *Discretionary Accruals* Manajemen Laba Model Jones Modifikasi dengan Legal Sistem sebagai Variabel Pemoderasi.” MODUS, Vol. 28 (1).
- Cahyono, Deddy Dyas, Andini Rita dan Raharjo Kharis. 2016. “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*SIZE*), *Leverage* (*DER*) dan Profitabilitas (*ROA*) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013.” Jurnal Akuntansi, 2 (2): 1-10.
- Catrine. 2021. “Apa Bedanya *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*.” www.pajakku.com. Diakses pada 28 Maret 2022.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita dan Naniek Noviari. 2017. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 21.1.
- Dewi, Noor Mita. 2019. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).” Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 9 (1).
- Dewi, Sevi Lestya, and Rachmawati Meita Oktaviani. “Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Intitusional terhadap *Tax Avoidance*.” Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan 4.2 (2021): 179-194.

- Dewinta, Ida Ayu dan Putu Ery Setiawan. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance.” E-Jurnal Akuntansi, Vol. 14, No. 3.
- Dharma, I., & Ardiana, P. (2016). “Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance.” E-Jurnal Akuntansi, 15(1), 584-613.
- Dwiyani, S. A., I. D. N. Badera, dan I. P. Sudana. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Penyajian Laporan Keuangan.” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 6 No. 4: 1451-1480.
- Edison, Acep. 2017. “Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).” Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 11, No. 2.
- Effendi. Muh. Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance* Teori dan Implementasi. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadillah, Haqi, Monang Situmorang, dan Desy Saraswati. 2019. “Pengaruh Leverage dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2018.” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, Vol 6, No. 1.
- Febrianto, Naufal. 2020. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan.” Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia Jakarta.
- Feranika, Ayu. 2017. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Tax Avoidance.”
- Fisipol. 2022. “Teknik Pengambilan Sampel pada Penelitian.” www.ilmukomunikasi.uma.ac.id. Diakses pada 5 Mei 2022.
- Fitria, Giawan Nur. 2018. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, dan Size terhadap Tax Avoidance.” Komunikasi Ilmiak Akuntansi dan Perpajakan, Vil. 11, No. 3.
- Fury. K. 2016. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Set Kesempatan Investasi, dan Arus Kas Bebas terhadap Utang.” Jurnal Hasil Riset.

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gita, Indiva. 2021 "Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*."
- Handayani, Ririn. 2020. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Harnida, Muthia. 2016. "*Factors Determining the Submission's Promptness of Financial Statement*." Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 9, No. 1.
- Hayati, Rina. 2022. "Variabel Terikat dan Bebas dalam Penelitian." www.penelitianilmiah.com.
- Hayati, Rina. 2022. "Analisis Korelasi." www.penelitianilmiah.com.
- Hidayat, Anwar. 2016. "Regresi Linear Sederhana dengan SPSS." www.statistikian.com. Diakses pada 20 Mei 2022.
- Hudha, Bill dan Dwi Cahyo Utomo. 2021. "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 10, No. 1.
- Indriani, Mita Devi dan Juniarti. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- I Wayan Purwanta Suta, Putu Ayu, I Nyoman Sugiarta. 2016. "Pengaruh kebijakan utang pada nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (studi pada perusahaan manufaktur di BEI)." Jurnal Akuntansi. Vol.12, No. 3. Politeknik Negeri Bali.
- Jasmine, Ulfa. 2017. "Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak." JOM Fekom, Vol. 4, No. 1.

- Junaedi, I. K., Sudiartana, I. M., dan Dicriyani, N. L. G. M. 2021. “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.” KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1).
- Khadir, A. 2016. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta.” Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 12(1).
- Khairani, Siti. 2019. “Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Tax Avoidance.” Jurnal Akuntansi.
- Kimsen, Kismanah, I., dan Masitoh, S. 2018. “Profitability, Leverage, and Size of Company Towards Tax Avoidance.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 4(1), 29–36.
- Komang, Ayu Krinadewi. 2017. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen pada Manajemen Laba.” E-Jurnal Akuntansi. Bali: Universitas Udayana.
- Kreshna, dan Kompyurini. 2016. “Memprediksi Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak.” InFestasi 12(2)
- Kurniasih, Diantari, P. R., dan Ulupui, I. A. 2016. “Pengaruh Komite audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance.” Vol 16, 702–732.
- Mahdiana, Maria Qibti dan Muhammad Nuryatno Amin. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance.” Jurnal AKuntansi Trisakti, Vol. 7, No. 1.
- Mahulae, Endang Endari, Pratomo Budi dan Nurbaiti Annisa. 2016. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 -2014).” Jurnal Manajemen, 3 (2): 1626-1633
- Manis. 2020. “Ukuran Perusahaan (Pengertian, Jenis, Kriteria, dan Indikator).” www.ekonomibunghatta.ac.id. Diakses pada 30 April 2020.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Mekari. 2021. “Pajak Penghasilan Badan.” www.mekari.com. Diakses pada 30 Maret 2022.

- Moeljono. 2020. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.” Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol 5, No. 1.
- Mulyana, Yusep, Sri Mulyati, dan indah Umiyati. 2020. “Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Pertumbuhan Aset terhadap Penghindaran Pajak.” Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan, Vol 4, No. 2.
- Nisa, H. 2017. “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Free Cash Flow Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2011-2015.” JOM Fekon, 4(1), 387–401.
- Novianti, Dewi Ratna, Praptiningsih, dan Noegrahini Lastiningsih. 2019. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Capital Intensity terhadap Effective Tax Rate (ETR).” Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 21, No. 2.
- Noviari, Naniek. 2016. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” E-Jurnal Akuntansi Universitas udayana, 17 (3).
- Novriyanti, Indah, and Winanda Wahana Warga Dalam. 2020. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.” *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5 (1): 24–35.
- Nulansari, Listya Ayu. 2021. “Komisaris Independen dan Direksi Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Intervening pada Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia.” STIE Malangkeucecwara thesis.
- Palepu, K. G., Healy, P. M., & Peek, E. 2019. “Business Analysis and Valuation: IFRS Standards Edition (5th editio).” *Cengage Learning*
- Pasaribu, M.Y., Topowijono., dan Sulasmiyati, Sri. 2016 “Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014.” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, No. 1, Juni, hal. 154-164.
- Pintek. 2021, “Teknik Pengumpulan data Kualitatif dan Kuantitatif.”
- Pohan dan Anwar. C. 2017. Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis). (edisi revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Prasetyo, Irwan dan Bambang Agus Pramuka. 2018. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.” Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol 20, No. 02.
- Pratama. 2021. “Teknik Pengumpulan Data.”
- Pratomo, Dudi dan Risa Aulia Rana. 2021. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.” Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 1.
- Prawiro. 2019. “Hipotesis: Arti, Fungsi, Jenis, dan Contoh Hipotesis.”
- Press, B. H. 2019. Landasan Teori Serta Mengembangkan Hipotesis. Iv (3), 1–11.
- Pritono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. www.eprints.binadarma.ac.id. Diakses pada 1 Mei 2022.
- Puspita, Deanna dan Meiriska Febrianti. 2017. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 19, No. 1.
- Putriningsih, Dewi., Eko Suyono., dan Eliada Herwiyanti. 2018. “Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan.” Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 20, No. 2: 77-92.
- Qothrunnada, Kholida. 2021. “Pengertian *Mean*, Median, Modus, dan Cara Menghitungnya.” www.detik.com. Diakses pada 10 Mei 2022.
- Rabbani, Aletheia. 2020. “Pengertian Unit Analisis, Jenis, dan Kesalahan Unit Analisis.”
- Rachmawati, N. 2021. “Pengaruh *Tax Haven* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi.” JAMA 2021, 5, 60-74.
- Rahmayani, Melia Wida, Wulan Riyadi, dan Yogi Ginanjar. 2021. “Pengaruh *Return on Assets*, *Debt to Equity Ratio*, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.” Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol XII, No. 1.
- Randi. 2016. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance*.”

- Rani, Puspita. 2017. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 6, No. 2.
- Riadi, Muchlis. 2019. “Struktur Kepemilikan (Institusional, Manajerial, dan Publik).” www.kajianpustaka.com. Diakses pada 30 April 2022.
- Riadi, Muchlis. 2020. “Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan, dan Rumus.” www.kajianpustaka.com. Diakses pada 2 Mei 2022.
- Rombe, A., Rahardjo, H., & Hartanto, S. 2017. “Analisis Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015)”. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 9(2).
- Rosalia, Y dan Sapari. 2017. “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 ISSN: 2460-0585
- Rozak, Tresna Syah et al. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017).” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Rusdiono. 2021. “Akuntansi Perpajakan.” www.rusdionoconsulting.com. Diakses pada 28 Maret 2022.
- Saragih, Afni Eliana dan Bernardus Baharui Halawa. 2022. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.” JRAK Vol. 8, No. 1.
- Saragih, M. Rizal, Debby Nurul. 2021. “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas, Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.” SAKUNTALA, Vol. 1, No. 1.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. “*Research Methods for Business, A Skill-Building Approach Seventh Edition.*” www.wileypluslearningspace.com.
- Setiawan, Doddy. 2018. “Karakteristik Dewan Komisaris dan Manajemen Laba: Bukti pada Peristiwa Penawaran Saham Perdana.” Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 22, No. 2, 164 – 181.
- Satibi, Iwan. 2017. Teknik Penulisan Skripsi, Thesis dan Disertasi. Bandung: Ceplas.

- Silaen, Sofar., 2018. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, In Media, Bandung
- Simorangkir, Parissan dan Nurul Aisyah Rachmawati. 2020. “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi.
- Sinambela, Tongam. 2019. “Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).” Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular, Vol 1, No. 1: GOODWILL.
- Sinurat, Shanya Saytama. 2021. “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Resiko Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2019).”
- Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).” Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).” Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).” Bandung: CV Alfabeta.
- Subrata, Agus. 2019. “Peran Komisaris Independen di Perusahaan Asuransi.”
- Sulaeman, R. 2021. “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).” *Syntax Idea*, 3(2), 354-367.
- Sulistiono, E. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik.” Vol. 13 No. 1 Januari: 87-110, ISSN: 2685-6441.
- Sunarsih, Fahmi Yahya, dan Slamet Haryono. 2019. “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Tercatat di *Jakarta Islamic Index*.” Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 13, No. 1.

- Suparlan. 2019. “Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (ALIANSI), Vol. 2, No. 1.
- Tamara, Monica dan Rudy Herdianto Saragih. 2021. “Pengaruh Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2014-2018.” Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol 2, No. 2.
- Tandean, Vivi Adeyani. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi.” Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol 9, No. 2.
- Tandiontong, Mathius. 2016. Kualitas Audit dan Pengukurannya. Bandung.
- Ulum dan Utomo, C. 2019. “Tax Avoidance, Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index.” Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 214–225.
- Veronika, Juliani dan Irvan N. 2020. “Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Properti dan Bangunan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Juliani. 2018. “Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi.” Riset Akuntansi dan Manajemen.
- Wardani, Ida Ayu Dewi Kusuma., Cipta, Wayan, dan Suwendra, I.W. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur.” E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, 4(1): 1-11.
- Wardoyo, Dwi U, Shovia Krismelina, dan Syaffina Aulya. 2022. “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Profitabilitas pada Tax Avoidance.” Jurnal Akuntansi, Universitas Telkom.
- Widyasari, Permata Ayu, Stefani Arif Juntara, dan Irene Natalia. 2021. “Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019).” Jurnal Akuntansi, Vol. 11, No. 3.
- Wijayani, R. D. 2016. “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia.” Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 181-192.

Wijayanti, Yoanis Carrica, dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati. 2017. “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, vol. 20.1.

Yuniati, Mei, Kharis Raharjo, dan Abrar Oemar. 2016. “Pengaruh Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2014.” *Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 2, Universitas Pandanaran Semarang.

Situs lain:

www.pajak.go.id

www.ayo.pajak.com

www.ojk.go.id

www.idx.co.id

www.bps.go.id

LAMPIRAN

Daftar Hadir Bimbingan

Tahun Akademik	2021/2022
Per	2
Kelas	Karyawan
NIM	371942005
Nama Mahasiswa	YOANE ASTRIA
Judul Penelitian	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran Pajak
Pembimbing 1	Ferdiansyah, SE., M.Ak.
Pembimbing 2	
IPK	3.83

Tanggal	Materi	Lampiran	Rekomendasi
23/02/2022	Pengarahan perdana dan penjelesan teknis bimbingan skripsi		Siapkan outline rencana penelitian
02/03/2022	Konsultasi topik dan judul skripsi		- judul skripsi yang disetujui: Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak - ganti sektor yg ditelitinya, jgn sektor pertanian. Cari sektor yg populasinya besar dan pembayaran pajaknya besar - siapkan bab 1 nya
09/03/2022	Bab 1		1. Tata tulis dan estetika penulisan 2. Referensi diperbaharui (5 thn terakhir) 3. Sumber referensi cantumkan 4. UU yg terbaru gunakan 5. Proporsi komisaris indendepen tidak ada dalam penelitian terdahulunya 6. Alasan mengapa kepemilikan institusional bisa mempengaruhi penghindaran pajak 7. Tambahkan masalah penelitiannya (inkonsistensi penelitoan terdahulu) 8. Butuh data pendukung bahwa sektor

			penghasil bahan baku memsrikan kontribusi yg tinggi
16/03/2022	Bab 1		1. Bab 1 acc dengan catatan 2. Catatan perbaikannya : referensi thn 2013 dan 2014 ganti dgn yang terbaru, susuna kalimat pd masalah penelitian diperbaiki (gunakan kata sambung untuk menunjukkan pertentangan/inkonsistensi) 3. Tgl 23 Maret 2022 siapkan jg bab 2 nya
24/03/2022	Bab 1 & Bab 2		1. Bab 1 ACC 2. Eksplorasi tentang pajak 3. Eksplorasi tentang penghindaran pajak 4. Uraikan lebih lengkap pengukuran penghindaran pajak. Akan lebih bagus kalau bisa dibandingkan keunggulan dan kelemahan dari masing pengukuran tsb. 5. Eksplorasi variabel komisrasi independen dan pengukurannya 6. Eksplorasi variabel kepemilikan institusional dan pengukurannya 7. Eksplorasi variabel ukuran perusahaan dan pengukurannya 8. Penelitian terdahulu hanya mencantumkan yang hasilnya sesuai dengan arah hipotesis 9. Kerangka teoritis menggunakan kalimat sendiri, tidak mengutip 10. Kerangka teoriti untuk kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak masih jelas 11. ARah hipotesis harus disebutkan
31/03/2022	Bab 2		Bab 2 acc dengan catatan kerangka teoritis untuk hub antara ukuran prsh dgn penghindaran diberikan penjelasan lebih lengkap.
07/04/2022	Bab 2 dan bab 3		1. Bab 2 ACC 2. Bab 3 sedikit perbaiki : - estetika penulisan - beberapa bagian perlu dihilangkan - krtiteria sampel ditambah - hipotesis statistik pada uji t diperbaiki
14/04/2022	Bab 3		Bab 3 acc, silahkan lanjut ke bab 4

18/05/2022	Bab 4		1. Hati-hati dengan kriteria sampling no. 3. Pastikan bahwa laporan keuangan/tahunan memang tidak ditemukan 2. Bersihkan data outlier untuk variabel kepemilikan institusional dan penghindaran pajak
31/05/2022	Bab 4		ACC bab 4. Siapkan bab 5 nya
05/06/2022	Bab 5		Bab 5 ACC
06/06/2022	Draft overall skripsi		Disetujui untuk mendaftat sidang skripsi

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2016

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	PT JAYA AGRA WATTIE Tbk AND SUBSIDIARIES STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2016 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)			
2016	Catatan/ Notes	2015	ASSETS	
ASET			ASSETS	
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS	
Kas dan bank	5.988.482.405	4,34,35	22.003.007.811	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	19.002.511.790	5,34,35	17.099.681.270	Trade receivables
Piutang lain-lain	7.528.438.554	34,35	15.226.517.784	Other receivables
Persediaan	51.018.292.210	6	53.654.344.188	Inventories
Pajak dibayar dimuka	43.887.763.378	7,29	42.795.107.327	Prepaid taxes
Piutang plasma	58.996.626.211	8,34,35	44.008.944.952	Plasma receivables
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	3.876.740.532		15.716.017.735	Advances and prepaid expenses
Total Aset Lancar	190.298.855.080		210.503.621.067	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NONCURRENT ASSETS	
Bibitan	10.020.896.872		15.868.389.553	Nurseries
Tanaman perkebunan		9		Plantations
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 228.703.959.000 tanggal 31 Desember 2016 dan Rp 187.137.505.390 tanggal 31 Desember 2015	918.525.850.264		917.939.998.390	Mature plantations - net of accumulated depreciation of Rp 228,703,959,000 as of December 31, 2016 and Rp 187,137,505,390 as of December 31, 2015
Tanaman belum menghasilkan	1.046.700.809.892		1.058.048.730.288	Immature plantations
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 288.606.919.648 tanggal 31 Desember 2016 dan Rp 226.353.312.748 tanggal 31 Desember 2015	1.051.238.712.526	10	1.088.906.180.040	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 288,606,919,648 as of December 31, 2016 and Rp 226,353,312,748 as of December 31, 2015
Uang muka perolehan aset	38.227.291.459	11	40.095.527.467	Advances for purchase of assets
Goodwill	17.979.322.415	30	17.979.322.415	Goodwill
Aset pajak tangguhan	5.143.641.454	29	931.466.489	Deferred tax assets
Aset lain-lain	12.981.511.916		17.876.526.560	Other assets
Total Aset Tidak Lancar	3.100.818.036.798		3.157.648.141.202	Total Noncurrent Assets
TOTAL ASET	3.291.116.891.878		3.368.151.762.269	TOTAL ASSETS

Catatan lampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
AND SUBSIDIARIES
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2016	Catatan/ Notes	2015	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	210.727.000.000	12,34,35	155.500.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha	91.014.949.215	13,34,35	76.516.365.182	Trade payables
Utang lain-lain	69.348.797.556	14,34,35	60.882.571.896	Other payables
Utang muka penjualan	22.239.562.017		-	Sales advance
Utang pajak	18.299.917.492	15	6.309.266.416	Taxes payable
Akrua	49.766.886.196	16,34,35	25.167.589.784	Accruals
Utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	184.556.020.132	17,34,35	127.122.723.630	Current maturity of long-term bank loans
Total Liabilitas Jangka Pendek	645.953.132.608		451.498.516.908	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.432.540.199.262	17,34,35	1.486.851.598.972	Long-term bank loans - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja	88.525.167.955	18	65.214.081.924	Post-employment benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	73.778.894.633	29	74.646.765.088	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.594.844.261.850		1.626.712.445.984	Total Noncurrent Liabilities
TOTAL LIABILITAS	2.240.797.394.458		2.078.210.962.892	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 100.000.000.000 saham				Authorized - 100,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.774.685.500 saham	377.468.550.000	19	377.468.550.000	Issued and fully paid - 3,774,685,500 shares
Tambahan modal disetor	433.917.673.015	20	433.917.673.015	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Dicadangkan	29.709.895.542		29.709.895.542	Appropriated
Belum dicadangkan	203.456.750.796		425.977.392.391	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	(21.580.734.189)		(7.355.348.602)	Other component of equity
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.022.972.135.164		1.259.718.162.346	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali	27.347.362.256	22	30.222.637.031	Non - controlling interest
TOTAL EKUITAS	1.050.319.497.420		1.289.940.799.377	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.291.116.891.878		3.368.151.762.269	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2017	Catatan/ Notes	2016	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	6.789.351.300	4,33,34	5.988.482.405	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - neto	12.034.881.971	5,33,34	19.002.511.790	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	8.582.527.122	33,34	7.528.438.554	Other receivables
Persediaan	51.647.297.880	6	51.018.292.210	Inventories
Pajak dibayar dimuka	30.072.597.723	7,28	43.887.763.378	Prepaid taxes
Piutang plasma	79.204.115.670	8,33,34	58.996.626.211	Plasma receivables
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	7.170.062.822		3.876.740.532	Advances and prepaid expenses
Total Aset Lancar	195.500.834.488		190.298.855.080	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Bibitan	9.770.352.545		10.020.896.872	Nurseries
Tanaman perkebunan				Plantations
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 271.487.943.583 tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 228.703.959.000 tanggal 31 Desember 2016	900.225.378.359	9	918.525.850.264	Mature plantations - net of accumulated depreciation of Rp 271,487,943,583 as of December 31, 2017 and Rp 228,703,959,000 as of December 31, 2016
Tanaman belum menghasilkan	1.109.777.678.509	9	1.046.700.809.892	Immature plantations
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 350.591.647.328 tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 288.606.919.648 tanggal 31 Desember 2016	1.034.432.840.213	10	1.051.238.712.526	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 350,591,647,328 as of December 31, 2017 and Rp 288,606,919,648 as of December 31, 2016
Uang muka perolehan aset	23.063.390.042	11	38.227.291.459	Advances for purchase of assets
Goodwill	17.979.322.415	29	17.979.322.415	Goodwill
Aset pajak tangguhan	9.337.963.817	28	5.143.641.454	Deferred tax assets
Aset lain-lain	12.394.231.270		12.981.511.916	Other assets
Total Aset Tidak Lancar	3.116.981.157.170		3.100.818.036.798	Total Noncurrent Assets
TOTAL ASET	3.312.481.991.638		3.291.116.891.878	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT JAYA AGRA WATTIE Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	2017	Catatan/ Notes	2016
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	131.500.000.000	12,33,34	210.727.000.000
Utang usaha	70.262.052.976	13,33,34	91.014.949.215
Utang lain-lain	621.361.862.940	14,33,34	69.348.797.556
Uang muka penjualan	21.181.616.614		22.239.562.017
Utang pajak	13.659.388.045	15	18.299.917.492
Akrual	51.071.945.681	16,33,34	49.766.886.196
Utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	365.577.366.889	17,33,34	184.556.020.132
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.274.614.033.145		645.953.132.608
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NONCURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.049.141.729.366	17,33,34	1.432.540.199.262
Liabilitas imbalan pasca kerja	110.165.198.938	18	88.525.167.955
Liabilitas pajak tangguhan	38.581.587.452	28	73.778.894.633
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.197.888.515.756		1.594.844.261.850
TOTAL LIABILITAS	2.472.502.548.901		2.240.797.394.458
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham			Authorized - 10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.774.685.500 saham	377.468.550.000	19	Issued and fully paid - 3,774,685,500 shares
Tambahan modal disetor	434.217.673.015	20	Additional paid-in capital 433.917.673.015
Perubahan ekuitas entitas anak	1.967.067.833	28	-
Saldo laba			Change in equity of subsidiaries
Dicadangkan	29.709.895.542		Retained earnings 29.709.895.542
Belum dicadangkan	6.120.915.901		Appropriated 203.456.750.796
Komponen ekuitas lainnya	(34.064.449.100)		Unappropriated (21.580.734.189)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	815.419.653.191		Other component of equity
Kepentingan non pengendali	24.559.789.546	21	Total equity attributable to owners of the parent entity 1.022.972.135.164
TOTAL EKUITAS	839.979.442.737		Non - controlling interest 27.347.362.256
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.312.481.991.638		TOTAL EQUITY
			TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017/ (Disajikan kembali - Catatan 35/ As restated - Note 35)	1 Januari/ January 1, 2017/ 31 Desember/ December 31, 2016 (Disajikan kembali - Catatan 35/ As restated - Note 35)	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2f,4,31,32	12.769.513.214	6.789.351.300	5.988.482.405	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	2f,2g,5,31,32	19.686.891.717	12.034.881.971	19.002.511.790	Trade receivables - third parties - net
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	2f,2g,31,32	7.127.563.664	8.582.527.122	7.528.438.554	Other receivables - third parties - net
Persediaan	2i,6	78.873.799.255	51.847.297.860	51.018.292.210	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2v,26	24.448.671.409	30.072.597.723	43.887.783.378	Prepaid taxes
Piutang plasma	2f,2h,7,31,32,34	138.560.127.315	79.204.115.670	58.996.626.211	Plasma receivables
Aset biologis	2n,8	28.322.251.362	20.096.342.140	31.575.382.907	Biological assets
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2j	14.301.302.970	7.170.062.821	3.876.740.531	Advances and prepaid expenses
Total Aset Lancar		324.090.120.906	215.597.176.607	221.874.237.986	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NONCURRENT ASSETS
Bibitan	2k	14.733.067.369	9.770.352.545	10.020.896.872	Nurseries
Tanaman produktif	2i,9				Bearer plants
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 315.019.459.852 tanggal 31 Desember 2018, Rp 271.487.943.563 tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 228.703.959.000 tanggal 31 Desember 2016		891.446.880.010	900.225.378.359	918.525.850.264	Mature plantations - net of accumulated depreciation of Rp 315,019,459,852 as of December 31, 2018, Rp 271,487,943,563 as of December 31, 2017 and Rp 228,703,959,000 as of December 31, 2016
Tanaman belum menghasilkan		1.163.260.672.941	1.109.777.678.509	1.046.700.809.892	Immature plantations
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 412.262.785.782 tanggal 31 Desember 2018, Rp 350.591.647.326 tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 288.606.919.648 tanggal 31 Desember 2016		989.910.852.049	1.034.432.840.213	1.051.238.712.526	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 412,262,785,782 as of December 31, 2018, Rp 350,591,647,326 as of December 31, 2017 and Rp 288,606,919,648 as of December 31, 2016
Uang muka perolehan aset	11	24.397.700.042	23.063.390.042	38.227.291.459	Advances for purchase of assets
Goodwill	24,27	17.979.322.415	17.979.322.415	17.979.322.415	Goodwill
Aset pajak tangguhan	26	4.717.393.110	9.337.963.817	5.143.641.454	Deferred tax assets
Aset lain-lain		11.857.930.031	12.394.231.271	12.981.511.917	Other assets
Total Aset Tidak Lancar		3.118.303.617.967	3.116.981.157.171	3.100.818.036.799	Total Noncurrent Assets
TOTAL ASET		3.442.393.738.873	3.332.578.333.778	3.322.692.274.785	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

		31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017/ (Disajikan kembali - Catatan 35/ As restated - Note 35)	1 Januari/ January 1, 2017/ 31 Desember/ December 31, 2016 (Disajikan kembali - Catatan 35/ As restated - Note 35)	
	Catatan/ Notes				
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2f,2r,12,31,32	90.000.000.000	131.500.000.000	210.727.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	2f,2q,13,31,32	77.157.361.718	70.262.052.976	91.014.949.215	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	2f,14,31,32	67.077.890.202	621.361.662.940	69.348.797.556	Other payables
Uang muka penjualan		24.699.887.204	21.181.616.614	22.239.562.017	Sales advances
Utang pajak	2v,26	25.527.530.163	13.659.388.045	18.299.917.492	Taxes payables
Akrual	2f,15,31,32	75.479.957.129	51.071.945.681	49.766.886.196	Accruals
Utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	2f,2r,16,31,32	-	365.577.366.889	184.556.020.132	Current maturity of long-term bank loans
Total Liabilitas Jangka Pendek		359.942.626.416	1.274.614.033.145	645.953.132.608	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NONCURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2f,2r,16,31,32,33	2.213.927.459.279	1.049.141.729.366	1.432.540.199.262	Long-term bank loans - net of current maturities
Utang lain-lain - pihak berelasi	2e,2f,30	151.544.522.468	-	-	Other payable - related party
Liabilitas imbalan pasca kerja	2u,17	12.074.463.754	110.165.198.938	88.525.167.955	Post-employment benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	2v,26	30.954.066.250	43.605.672.987	81.672.740.360	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang		2.408.500.511.751	1.202.912.601.291	1.602.738.107.577	Total Noncurrent Liabilities
TOTAL LIABILITAS		2.768.443.138.167	2.477.526.634.436	2.248.691.240.185	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham					Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham					Authorized - 10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.774.685.500 saham	18	377.468.550.000	377.468.550.000	377.468.550.000	Issued and fully paid - 3,774,685,500 shares
Tambahan modal disetor	19	528.499.784.799	434.217.673.015	433.917.673.015	Additional paid-in capital
Perubahan ekuitas entitas anak	26	1.640.927.303	1.967.067.833	-	Change in equity of subsidiaries
Saldo laba					Retained earnings
Dicadangkan		29.709.895.542	29.709.895.542	29.709.895.542	Appropriated
Belum dicadangkan		(277.366.112.033)	21.106.208.454	227.003.402.921	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya		(1.367.360.077)	(34.112.370.103)	(21.580.734.189)	Other component of equity
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		658.585.685.534	830.357.024.741	1.046.518.787.289	Net equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali	20	15.364.915.172	24.694.674.601	27.482.247.311	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		673.950.600.706	855.051.699.342	1.074.001.034.600	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		3.442.393.738.873	3.332.578.333.778	3.322.692.274.785	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	6.172.482.989	2g,4,31,32	12.789.513.214	<i>Cash on hand and in banks</i>
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	20.219.450.221	2g,2h,5,31,32	19.686.891.717	<i>Trade receivables - third parties - net</i>
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	6.870.361.184	2g,2h,31,32	7.127.563.684	<i>Other receivables - third parties - net</i>
Persediaan	72.520.106.685	2j,6	78.873.799.255	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	29.365.623.393	2w,26	24.448.671.409	<i>Prepaid taxes</i>
Aset biologis	22.328.370.671	2n,7	28.322.251.362	<i>Biological assets</i>
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	17.046.501.749	2k	14.301.302.970	<i>Advances and prepaid expenses</i>
Total Aset Lancar	174.522.896.892		185.529.993.591	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Piutang plasma	186.473.368.681	2i,8,35	138.560.127.315	<i>Plasma receivables</i>
Bibitan	15.657.542.937	2l	14.733.067.369	<i>Nurseries</i>
Tanaman produktif		2m,9		<i>Bearer plants</i>
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 364.106.252.345 tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 315.019.459.850 tanggal 31 Desember 2018	957.593.883.169		891.446.680.010	<i>Mature plantations - net of accumulated depreciation of Rp 364,106,252,345 as of December 31, 2019 and Rp 315,019,459,850 as of December 31, 2018</i>
Tanaman belum menghasilkan	1.144.496.871.948		1.163.260.672.941	<i>Immature plantations</i>
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 473.938.395.183 tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 412.262.785.782 tanggal 31 Desember 2018	942.684.941.298	2o,2p,10	989.910.852.049	<i>Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 473,938,395,183 as of December 31, 2019 and Rp 412,262,785,782 as of December 31, 2018</i>
Uang muka perolehan aset	26.374.317.542	11	24.397.700.042	<i>Advances for purchase of assets</i>
Goodwill	17.979.322.415	2f,27	17.979.322.415	<i>Goodwill</i>
Aset pajak tangguhan	7.485.498.336	2w,26	4.717.393.110	<i>Deferred tax assets</i>
Aset lain-lain	16.508.172.910		11.857.930.031	<i>Other assets</i>
Total Aset Tidak Lancar	3.315.253.919.236		3.256.863.745.282	Total Noncurrent Assets
TOTAL ASET	3.489.776.816.128		3.442.393.738.873	TOTAL ASSETS

Catatan lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2019	Catatan/ Notes	2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	125.000.000.000	2g,2s,12,31,32	90.000.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha - pihak ketiga	88.949.996.023	2g,2r,13,31,32	77.157.361.718	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	23.674.161.919	2g,14,31,32	66.710.710.638	Other payables - third parties
Uang muka penjualan	79.825.782.914		24.699.887.204	Sales advances
Utang pajak	24.445.500.812	2w,26	25.527.530.163	Taxes payables
Akrual	83.281.300.094	2g,15,31,32	75.479.957.129	Accruals
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun		2g,31,32		Current maturity of long-term liabilities
Utang bank	17.052.533.386	2s,16	-	Bank loan
Sewa pembiayaan	128.494.408	2q	109.750.072	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	442.357.769.556		359.685.196.924	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun		2g,31,32,33		Long-term bank loan - net of current maturities
Utang bank	2.436.434.615.574	2s,16	2.213.927.459.279	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	90.522.795	2q	257.429.492	Lease liabilities
Utang lain-lain		2g,31,32		Other payables
Pihak ketiga	19.800.000.000	14	-	Third party
Pihak berelasi	172.341.227.987	2ab,30	151.544.522.468	Related party
Liabilitas imbalan pasca kerja	27.923.889.982	2v,17	12.074.463.754	Post-employment benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	707.426.716	2w,26	30.954.066.250	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.657.297.683.054		2.408.757.941.243	Total Noncurrent Liabilities
TOTAL LIABILITAS	3.099.655.452.610		2.768.443.138.167	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham				Authorized - 10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.774.685.500 saham	3.774.685.500.000	18	3.774.685.500.000	Issued and fully paid - 3,774,685,500 shares
Tambahan modal disetor	528.499.784.799	19	528.499.784.799	Additional paid-in capital
Perubahan ekuitas entitas anak	1.640.927.303	26	1.640.927.303	Change in equity of subsidiaries
Saldo laba (defisit)				Retained earnings (deficit)
Dicadangkan	29.709.895.542		29.709.895.542	Appropriated
Belum dicadangkan	(558.412.920.255)		(277.366.112.033)	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	(2.482.293.869)		(1.367.360.077)	Other component of equity
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	376.413.943.520		658.585.685.534	Net equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali	13.707.419.998	20	15.364.915.172	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS	390.121.363.518		673.950.600.706	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.489.776.816.128		3.442.393.738.873	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019 *)	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	8.382.731.968	2g,4,31,32	6.172.482.989	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	17.872.216.544	2g,2h,5,31,32	20.219.450.221	Trade receivables - third parties - net
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	4.779.094.300	2g,2h,31,32	6.870.361.184	Other receivables - third parties - net
Persediaan	41.411.063.094	2j,6	72.520.106.685	Inventories
Pajak dibayar dimuka	35.420.935.181	2v,26	29.365.623.393	Prepaid taxes
Aset biologis	38.145.323.819	2n,7,31	22.328.370.671	Biological assets
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	20.076.368.406	2k	17.046.501.749	Advances and prepaid expenses
Total Aset Lancar	166.087.733.312		174.522.896.892	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Piutang plasma	225.977.717.717	2i,8,34	186.473.368.681	Plasma receivables
Bibitan	14.800.707.106	2l	15.657.542.937	Nurseries
Tanaman produktif		2m,9		Bearer plants
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 412.519.696.390 tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 364.106.252.345 tanggal 31 Desember 2019	910.964.173.005		957.593.883.169	Mature plantations - net of accumulated depreciation of Rp 412,519,696,390 as of December 31, 2020 and Rp 364,106,252,345 as of December 31, 2019
Tanaman belum menghasilkan	1.204.705.213.692		1.144.496.871.948	Immature plantations
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 535.866.987.759 tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 473.938.395.183 tanggal 31 Desember 2019	892.132.938.272	2o,2p,10	942.684.941.298	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 535,866,987,759 as of December 31, 2020 and Rp 473,938,395,183 as of December 31, 2019
Uang muka perolehan aset	26.374.317.542	11	26.374.317.542	Advances for purchase of assets
Goodwill	17.979.322.415	2f,27	17.979.322.415	Goodwill
Aset pajak tangguhan	18.955.800.829	2v,26	7.485.498.336	Deferred tax assets
Aset lain-lain	15.749.458.237		16.508.172.910	Other assets
Total Aset Tidak Lancar	3.327.639.448.815		3.315.253.919.236	Total Noncurrent Assets
TOTAL ASET	3.493.727.182.127		3.489.776.816.128	TOTAL ASSETS

*) Direklasifikasi. Lihat Catatan 37.

*) As reclassified. See Note 37.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2020	Catatan/ Notes	2019 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	125.000.000.000	2g,2s,12,31,32	125.000.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha - pihak ketiga	93.468.844.950	2g,2r,13,31,32	88.949.996.023	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	17.478.407.248	2g,14,31,32	23.674.161.919	Other payables - third parties
Utang muka penjualan	37.398.640.983		79.825.782.914	Sales advances
Utang pajak	29.888.956.685	2v,26	24.445.500.812	Taxes payables
Akrual	73.793.534.426	2g,15,31,32	83.281.300.094	Accruals
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun		2g,31,32		Current maturity of long-term liabilities
Utang bank	138.919.046.286	2s,16	17.052.533.386	Bank loan
Sewa pembiayaan	85.698.437	2q	128.494.408	Finance lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	516.033.129.015		442.357.769.556	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun		2g,31,32,33		Long-term bank loan - net of current maturities
Utang bank	2.326.074.900.956	2s,16	2.436.434.615.574	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	-	2q	90.522.795	Finance lease liabilities
Utang lain-lain jangka panjang		2g,31,32		Long-term other payables
Pihak ketiga	-	14	19.800.000.000	Third party
Pihak berelasi	364.386.618.098	2aa,30	172.341.227.987	Related party
Liabilitas imbalan kerja	43.207.974.597	2u,17	27.923.889.982	Employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	-	2v,26	707.426.716	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.733.669.493.651		2.657.297.683.054	Total Noncurrent Liabilities
TOTAL LIABILITAS	3.249.702.622.666		3.099.655.452.610	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham				Authorized - 10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.774.685.500 saham	377.468.550.000	18	377.468.550.000	Issued and fully paid - 3,774,685,500 shares
Tambahan modal disetor	434.217.673.015	19	434.217.673.015	Additional paid-in capital
Perubahan ekuitas entitas anak	1.640.927.303	26	1.640.927.303	Change in equity of subsidiaries
Saldo laba (defisit)				Retained earnings (deficit)
Dicadangkan	29.709.895.542		29.709.895.542	Appropriated
Belum dicadangkan	(864.284.939.096)		(558.412.920.255)	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	253.326.963.289	26	91.789.817.915	Other component of equity
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	232.079.070.053		376.413.943.520	Net equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali	11.945.489.408	20	13.707.419.998	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS	244.024.559.461		390.121.363.518	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.493.727.182.127		3.489.776.816.128	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Direklasifikasi. Lihat Catatan 37.

*) As reclassified. See Note 37.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Laba Rugi Tahun 2016

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

	2016	Catatan/ Notes	2015	
PT JAYA AGRA WATTIE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				PT JAYA AGRA WATTIE Tbk AND SUBSIDIARIES STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For The Period Ended December 31, 2016 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
PENJUALAN BERSIH	590.138.302.043	23	658.308.935.085	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	520.568.097.445	24	511.343.018.542	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	69.570.204.598		146.965.916.543	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	(18.359.766.701)	25	(23.371.272.981)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(47.107.000.781)	26	(47.001.000.557)	General and administrative expenses
Total Beban Usaha	(65.466.767.482)		(70.372.273.538)	Total Operating Expenses
LABA USAHA	4.103.437.116		76.593.643.005	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Pendapatan operasi lain	19.586.593.812	27	22.442.018.580	Other operating income
Beban operasi lain	(246.245.934.667)	28	(101.834.349.918)	Other operating expenses
Beban Lain-Lain - neto	(226.659.340.855)		(79.392.331.338)	Other Charges - net
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(222.555.903.739)		(2.798.688.333)	LOSS BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		29		INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini	(2.392.406.319)		(4.733.238.827)	Current tax
Pajak tangguhan	(184.330.030)		(4.183.576.000)	Deferred tax
Beban Pajak Penghasilan - neto	(2.576.736.349)		(8.916.814.827)	Income Tax Expense - net
RUGI NETO	(225.132.640.088)		(11.715.503.160)	NET LOSS
Pendapatan (rugi) komprehensif lain	(19.753.037.320)		(6.166.410.418)	Other comprehensive loss
Manfaat pajak tangguhan terkait	5.264.375.451		1.769.473.205	Related deferred tax income
Rugi Komprehensif Lain - Setelah Pajak	(14.488.661.869)		(4.396.937.213)	Other Comprehensive Loss - Net of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(239.621.301.957)		(16.112.440.373)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE PERIOD
LABA (RUGI) BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(222.525.065.593)		(11.820.997.843)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(2.607.574.495)		105.494.683	Non-controlling interest
Total	(225.132.640.088)		(11.715.503.160)	Total
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(236.744.611.231)		(15.993.930.680)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(2.876.690.726)		(118.509.693)	Non-controlling interest
Total	(239.621.301.957)		(16.112.440.373)	Total
RUGI BERSIH PER SAHAM - DASAR	(59)	31	(3)	BASIC LOSS PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Laba Rugi Tahun 2017

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Year Ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ Notes	2016	
PENJUALAN BERSIH	555.139.580.764	22	590.138.302.043	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	493.697.284.516	23	520.568.097.445	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	61.442.296.248		69.570.204.598	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	(16.910.098.132)	24	(18.359.766.701)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(43.110.014.186)	25	(47.107.000.781)	General and administrative expenses
Total Beban Usaha	(60.020.112.318)		(65.466.767.482)	Total Operating Expenses
LABA USAHA	1.422.183.930		4.103.437.116	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Pendapatan operasi lain	2.683.524.192	26	19.586.593.812	Other operating income
Beban operasi lain	(238.356.714.422)	27	(246.245.934.667)	Other operating expenses
Beban Lain-Lain - neto	(235.673.190.230)		(226.659.340.855)	Other Charges - net
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(234.251.006.300)		(222.555.903.739)	LOSS BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		28		INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini	(2.269.200.731)		(2.392.406.319)	Current tax
Pajak tangguhan	36.591.129.581		(184.330.030)	Deferred tax
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	34.321.928.850		(2.576.736.349)	Income Tax Benefit (Expense) - net
RUGI NETO	(199.929.077.450)		(225.132.640.088)	NET LOSS
RUGI KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:				Not to be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Penilaian kembali atas imbalan pasca kerja	(15.634.400.940)		(19.753.037.320)	Remeasurements on post-employment benefits
Manfaat pajak tangguhan terkait	2.908.423.707		5.264.375.451	Related deferred income tax benefit
Rugi Komprehensif Lain - Setelah Pajak	(12.725.977.233)		(14.488.661.869)	Other Comprehensive Loss - Net of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF	(212.655.054.683)		(239.621.301.957)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
RUGI NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(197.335.834.895)		(222.525.065.593)	Owners of the parent
Keperluan nonpengendali	(2.593.242.555)		(2.607.574.495)	Non-controlling interest
Total	(199.929.077.450)		(225.132.640.088)	Total
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(209.819.549.806)		(236.744.811.231)	Owners of the parent
Keperluan nonpengendali	(2.835.504.877)	21	(2.876.690.726)	Non-controlling interest
Total	(212.655.054.683)		(239.621.301.957)	Total
RUGI PER SAHAM - DASAR	(52)	30	(59)	BASIC LOSS PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Laba Rugi Tahun 2018

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2018	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2017/ (Disajikan kembali - Catatan 35/ As restated - Note 35)	
PENJUALAN NETO	745.508.896.455	2s,21	555.139.580.764	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	730.074.322.122	2s,22	493.697.284.516	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	15.434.574.333		61.442.296.248	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	(22.618.417.851)	2s,23	(16.910.098.132)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(46.764.618.899)	2s,24	(43.110.014.186)	General and administrative expenses
Total Beban Usaha	(69.383.036.750)		(60.020.112.318)	Total Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA	(53.948.462.417)		1.422.183.930	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan	(207.182.364.176)		(164.158.285.721)	Finance cost
Penghasilan keuangan	1.204.470.842		114.894.244	Interest income
Kerugian lain-lain - neto	(44.371.806.035)	25	(83.108.839.520)	Other losses - net
Beban Lain-Lain - neto	(250.349.699.369)		(247.152.230.997)	Other Charges - net
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(304.298.161.786)		(245.730.047.067)	LOSS BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		2v,26		INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini	(126.114.947)		(2.269.200.731)	Current tax
Pajak tangguhan	4.277.281.981		39.460.889.773	Deferred tax
Manfaat Pajak Penghasilan - neto	4.151.167.034		37.191.689.042	Income Tax Benefit - net
RUGI NETO	(300.146.994.752)		(208.538.358.025)	NET LOSS
RUGI KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:				<i>Not to be reclassified to profit or loss in subsequent period:</i>
Penilaian kembali atas imbalan pasca kerja	32.995.387.083	2u,17	(15.634.400.940)	Remeasurements on post-employment benefits
Manfaat pajak tangguhan terkait	-	2v,26	2.908.423.707	Related deferred income tax benefit
Rugi Komprehensif Lain - Setelah Pajak	32.995.387.083		(12.725.977.233)	Other Comprehensive Loss - Net of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF	(267.151.607.669)		(221.264.335.258)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
RUGI NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(298.472.320.487)		(205.897.194.467)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(1.674.674.265)		(2.641.163.558)	Non-controlling interest
Total	(300.146.994.752)		(208.538.358.025)	Total
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(265.727.310.461)		(218.428.830.381)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(1.424.297.208)	20	(2.835.504.877)	Non-controlling interest
Total	(267.151.607.669)		(221.264.335.258)	Total
RUGI PER SAHAM - DASAR	(79,07)	2y,30	(54,55)	BASIC LOSS PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Laba Rugi Tahun 2019

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENJUALAN NETO	723.317.737.664	2t,21	745.508.896.455	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	704.289.832.096	2t,22	730.074.322.122	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	<u>19.027.905.568</u>		<u>15.434.574.333</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	(23.571.661.943)	2t,23	(22.618.417.851)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(44.277.881.775)	2t,24	(46.764.618.899)	General and administrative expenses
Total Beban Usaha	<u>(67.849.543.718)</u>		<u>(69.383.036.750)</u>	Total Operating Expenses
RUGI USAHA	<u>(48.821.638.150)</u>		<u>(53.948.462.417)</u>	OPERATING LOSS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan	(239.499.964.746)		(207.182.364.176)	Finance cost
Penghasilan keuangan	174.129.492		1.204.470.842	Interest income
Kerugian lain-lain - neto	(28.666.753.027)	25	(44.371.806.035)	Other losses - net
Beban Lain-Lain - neto	(267.992.588.281)		(250.349.699.369)	Other Charges - net
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>(316.814.226.431)</u>		<u>(304.298.161.786)</u>	LOSS BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		2w,26		INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini	(46.125.459)		(126.114.947)	Current tax
Pajak tangguhan	34.161.116.467		4.277.281.981	Deferred tax
Manfaat Pajak Penghasilan - neto	<u>34.114.991.008</u>		<u>4.151.167.034</u>	Income Tax Benefit - net
RUGI NETO	<u>(282.699.235.423)</u>		<u>(300.146.994.752)</u>	NET LOSS
RUGI KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:				Not to be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Penilaian kembali atas imbalan pasca kerja	(1.475.725.328)	2v,17	32.995.387.083	Remeasurements on post-employment benefits
Manfaat pajak tangguhan terkait	345.723.563	2w,26	-	Related deferred income tax benefit
Rugi Komprehensif Lain - Setelah Pajak	<u>(1.130.001.765)</u>		<u>32.995.387.083</u>	Other Comprehensive Loss - Net of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF	<u>(283.829.237.188)</u>		<u>(267.151.607.669)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
RUGI NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(281.046.808.222)		(298.472.320.487)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(1.652.427.201)		(1.674.674.265)	Non-controlling interest
Total	<u>(282.699.235.423)</u>		<u>(300.146.994.752)</u>	Total
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(282.171.742.014)		(265.727.310.461)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(1.657.495.174)	20	(1.424.297.208)	Non-controlling interest
Total	<u>(283.829.237.188)</u>		<u>(267.151.607.669)</u>	Total
RUGI PER SAHAM - DASAR	<u>(74,48)</u>	2y,28	<u>(79,07)</u>	BASIC LOSS PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Laba Rugi Tahun 2020

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PT JAYA AGRA WATTIE TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				PT JAYA AGRA WATTIE TBK AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For The Year Ended December 31, 2020 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
PENJUALAN NETO	461.342.540.054	21,21	723.317.737.664	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	485.484.208.884	21,22	704.289.832.096	COST OF GOODS SOLD
LABA (RUGI) KOTOR	(24.141.668.830)		19.027.905.568	GROSS PROFIT (LOSS)
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	(14.427.680.411)	21,23	(23.571.661.943)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(41.074.571.860)	21,24	(44.277.881.775)	General and administrative expenses
Total Beban Usaha	(55.502.252.271)		(67.849.543.718)	Total Operating Expenses
RUGI USAHA	(79.643.921.101)		(48.821.638.150)	OPERATING LOSS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan	(225.184.092.193)	14,16	(239.499.964.746)	Finance cost
Penghasilan keuangan	105.459.210		174.129.492	Interest income
Kerugian lain-lain - neto	(15.357.673.764)	25	(28.666.753.027)	Other losses - net
Beban Lain-Lain - neto	(240.436.306.747)		(267.992.588.281)	Other Charges - net
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(320.080.227.848)		(316.814.226.431)	LOSS BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		2v,26		INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini	(1.756.980)		(46.125.459)	Current tax
Pajak tangguhan	12.438.748.768		34.161.116.467	Deferred tax
Manfaat Pajak Penghasilan - neto	12.436.991.788		34.114.991.008	Income Tax Benefit - net
RUGI NETO	(307.643.236.060)		(282.699.235.423)	NET LOSS
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				Items not to be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Penilaian kembali atas imbalan pasca kerja	1.183.983.492	2v,17	(1.475.725.328)	Remeasurements on post-employment benefits
Manfaat pajak tangguhan terkait Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	(261.219.559)	2v,26	345.723.563	Related deferred income tax benefit
	922.763.933		(1.130.001.765)	Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF	(306.720.472.127)		(283.829.237.188)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
RUGI NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(305.872.018.841)		(281.046.808.222)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(1.771.217.219)		(1.652.427.201)	Non-controlling interest
Total	(307.643.236.060)		(282.699.235.423)	Total
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(304.958.541.537)		(282.171.742.014)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(1.761.930.590)	20	(1.657.495.174)	Non-controlling interest
Total	(306.720.472.127)		(283.829.237.188)	Total
RUGI PER SAHAM - DASAR	(81,03)	2x,28	(74,46)	BASIC LOSS PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Arus Kas Tahun 2016

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

	2016	Catatan/ Notes	2015	
PT JAYA AGRA WATTIE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN				
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
PT JAYA AGRA WATTIE Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS				
For The Year Ended December 31, 2016 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	610.475.033.540		660.235.086.919	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lain-lain	<u>(415.510.784.322)</u>		<u>(487.907.668.124)</u>	Cash paid to suppliers, employees and others
Kas dihasilkan dari operasi	194.964.249.218		172.327.418.795	Cash generated from operations
Pembayaran beban bunga	<u>(149.989.161.455)</u>		<u>(147.756.372.616)</u>	Interest paid
Penerimaan atas pajak lebih bayar dari kantor pajak	1.297.225.764		160.429.836	Receipt of overpayment from the tax office
Pembayaran pajak penghasilan	<u>(244.306.490)</u>		<u>(15.778.339.566)</u>	Income tax paid
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>46.028.007.037</u>		<u>8.953.136.449</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	83.921.287		326.118.034	Interest received
Penambahan bibit	-		(7.710.636.154)	Increase in nurseries
Penambahan tanaman belum menghasilkan	<u>(38.914.984.631)</u>	9	<u>(167.748.867.145)</u>	Increase in immature plantations
Perolehan aset tetap	<u>(29.887.916.301)</u>	10	<u>(172.095.773.360)</u>	Acquisition of fixed assets
Penambahan beban tangguhan	-		(1.158.726.096)	Increase in deferred charges
Penjualan investasi jangka panjang lainnya	-		2.000.000.000	Sale of other long term investment
Hasil penjualan aset	<u>2.730.796.806</u>	10	<u>13.502.000.000</u>	Proceeds from sale of assets
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(65.988.182.840)</u>		<u>(332.885.884.721)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Perolehan utang bank	55.227.000.000	12	49.000.000.000	Proceeds from bank loans
Perolehan utang bank jangka panjang	26.409.000.000	17	399.069.000.000	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	<u>(62.702.668.344)</u>	17	<u>(148.498.362.000)</u>	Payment of long-term bank loans
Pembayaran dividen	-		(5.049.801.620)	Payment of dividend
Penerimaan dividen	-		2.184.915.326	Proceeds of dividend
Pembayaran kepada plasma	<u>(14.987.681.259)</u>	8	<u>(23.126.944.118)</u>	Payment to plasma
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-		(106.880.572)	Payment of obligation under finance lease
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	<u>3.945.650.397</u>		<u>273.471.927.016</u>	Net Cash Provided by Financing Activities
PENURUNAN NETO KAS DAN BANK	(16.014.525.406)		(50.460.821.256)	NET DECREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	22.003.007.811		72.463.829.067	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u>5.988.482.405</u>		<u>22.003.007.811</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Arus Kas Tahun 2017

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT JAYA AGRA WATTIE Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For The Year Ended December 31, 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	2017	Catatan/ Notes	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	561.049.265.180		610.475.033.540	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lain-lain	(527.060.391.656)		(415.510.784.322)	Cash paid to suppliers, employees and others
Kas dihasilkan dari operasi	33.988.873.524		194.964.249.218	Cash generated from operations
Pembayaran beban bunga	(191.053.295.844)		(149.989.161.455)	Interest paid
Penerimaan atas pajak lebih bayar dari kantor pajak	3.222.022.293		1.297.225.764	Receipt of overpayment from the tax office
Pembayaran pajak penghasilan	(2.389.190.153)		(244.306.490)	Income tax paid
Kas Neto Diperoleh (Digunakan untuk) dari Aktivitas Operasi	(156.231.590.180)		46.028.007.037	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan tanaman belum menghasilkan	(52.475.274.844)	9	(38.914.984.631)	Increase in immature plantations
Perolehan aset tetap	(31.528.790.858)	10	(29.887.916.301)	Acquisition of fixed assets
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(1.130.000.000)		-	Addition advances for purchases of fixed assets
Penerimaan bunga	114.894.244		83.921.287	Interest received
Hasil penjualan aset	-	10	2.730.796.805	Proceeds from sale of assets
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(85.019.171.458)		(65.988.182.840)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang lain-lain	560.287.547.028	14	-	Proceeds of other payable
Pembayaran utang bank jangka panjang	(259.618.229.423)	17	(62.702.668.344)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran utang bank	(79.227.000.000)	12	-	Payment from bank loans
Perolehan utang bank jangka panjang	40.816.802.387	17	26.409.000.000	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran kepada plasma	(20.207.489.459)	8	(14.987.681.259)	Payment to plasma
Perolehan utang bank	-	12	55.227.000.000	Proceeds from bank loans
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	242.051.630.533		3.945.650.397	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	800.868.895		(16.014.525.406)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	5.988.482.405		22.003.007.811	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	6.789.351.300		5.988.482.405	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Arus Kas Tahun 2018

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	714.070.236.030		561.049.265.180	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, dan lain-lain	(554.494.070.173)		(432.353.867.564)	Cash paid to suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(262.762.613.733)		(94.706.524.092)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	(103.186.447.876)		33.988.873.524	Cash generated from (used in) operations
Pembayaran beban bunga	(207.182.364.176)		(191.053.295.844)	Interest paid
Pembayaran pajak penghasilan	(150.562.278)		(2.389.190.153)	Income tax paid
Penerimaan atas pajak lebih bayar dari kantor pajak	-		3.222.022.293	Receipt of overpayment from the tax office
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(310.519.374.330)		(156.231.590.180)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan tanaman belum menghasilkan	(43.836.265.258)		(52.475.274.844)	Disbursements for development of immature plantations
Perolehan aset tetap	(17.149.150.292)	10	(31.528.790.858)	Acquisition of fixed assets
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(1.334.310.000)		(1.130.000.000)	Additional advances for purchases of fixed assets
Penerimaan bunga	1.204.470.842		114.894.244	Interest received
Penambahan bibit	(4.048.819.190)		-	Disbursements for development of nurseries
Pembelian saham dari non-pengendali	(8.231.602.751)		-	Acquisition of shares from non-controlling interest
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(73.395.676.649)		(85.019.171.458)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (pembayaran) utang lain-lain	(554.283.772.738)	14	560.287.547.028	Proceeds from (payments of) other payable - net
Pembayaran utang bank jangka panjang	(1.508.679.861.412)		(259.618.229.423)	Payments of long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	(131.500.000.000)	12	(79.227.000.000)	Payments of short-term bank loans
Perolehan utang bank jangka panjang	2.307.888.224.436		40.816.802.387	Proceeds from long-term bank loans
Penerimaan utang pihak berelasi	245.826.634.252		-	Proceeds from other payable related parties
Pembayaran kepada plasma	(59.356.011.645)	7	(20.207.489.459)	Payment to plasma
Perolehan utang bank jangka pendek	90.000.000.000	12	-	Proceeds from short-term bank loans
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	389.895.212.893		242.051.630.533	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	5.980.161.915		800.868.895	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	6.789.351.300		5.988.482.405	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	12.769.513.214	4	6.789.351.300	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Arus Kas Tahun 2019

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PT JAYA AGRA WATTIE TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PT JAYA AGRA WATTIE TBK AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For The Year Ended December 31, 2019 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	777.911.074.870		741.375.157.299	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, dan lain-lain	(478.861.840.785)		(662.899.569.001)	Cash paid to suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(182.079.192.099)		(164.671.878.550)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	117.170.041.986		(86.196.290.252)	Cash generated from (used in) operations
Pembayaran beban bunga	(251.497.926.227)		(223.368.953.453)	Interest paid
Pembayaran pajak penghasilan	(43.886.863)		(150.562.278)	Income tax paid
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(134.371.771.104)		(309.715.805.983)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan tanaman belum menghasilkan	(47.458.927.478)		(44.639.833.605)	Disbursements for development of immature plantations
Perolehan aset tetap	(14.449.898.650)	10	(16.569.450.292)	Acquisition of fixed assets
Perolehan hak guna usaha	(5.315.971.600)		-	Acquisition of landright
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(1.976.617.500)		(1.334.310.000)	Additional advances for purchases of fixed assets
Penerimaan bunga	174.129.492		1.204.470.842	Interest received
Penambahan bibit	(1.220.800.390)		(4.048.819.190)	Disbursements for development of nurseries
Pembelian saham dari non-pengendali	-		(8.231.602.751)	Acquisition of shares from non-controlling interest
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(70.247.886.126)		(73.619.544.996)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Perolehan utang bank jangka panjang	234.727.030.732		2.307.888.224.436	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	35.000.000.000		(131.500.000.000)	Payments of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	-		(1.508.679.861.412)	Payments of long-term bank loans
Penerimaan utang pihak berelasi	-		245.826.634.252	Proceeds from other payable related parties
Perolehan utang bank jangka pendek	-	12	90.000.000.000	Proceeds from short-term bank loans
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(148.162.361)		(280.206.436)	Payments of lease liabilities
Pembayaran utang lain-lain	(23.843.000.000)		(554.583.268.302)	Payments of other payable - net
Pembayaran kepada plasma	(47.913.241.366)	8	(59.356.011.645)	Payment to plasma
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	198.022.627.005		389.315.512.893	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(6.597.030.225)		5.980.161.914	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	12.789.513.214		6.789.351.300	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	6.172.482.989	4	12.769.513.214	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Laporan Arus Kas Tahun 2020

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT JAYA AGRA WATTIE TBK AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For The Year Ended December 31, 2020 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	2020	Catatan/ Notes	2019 *)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	421.262.631.800		777.911.074.870	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, dan lain-lain	(268.541.822.825)		(522.104.840.785)	Cash paid to suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(141.348.850.515)		(182.079.192.099)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	11.371.958.860		73.727.041.986	Cash generated from (used in) operations
Pembayaran beban bunga	(259.024.772.522)		(251.497.926.227)	Interest paid
Pembayaran pajak penghasilan	-		(43.886.863)	Income tax paid
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(247.652.813.862)		(177.814.771.104)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTAS				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran kepada plasma	(39.504.349.036)		(47.913.241.366)	Payments to plasma
Penambahan tanaman belum menghasilkan	(19.976.834.923)	9,33a	(47.458.927.478)	Disbursements for development of immature plantations
Perolehan aset tetap	(11.376.589.550)	10	(14.449.898.650)	Acquisition of fixed assets
Perolehan hak guna usaha	-		(5.315.971.600)	Acquisition of landright
Penambahan bibit	(221.799.346)		(1.220.800.390)	Disbursements for development of nurseries
Penerimaan bunga	105.459.210		174.129.492	Interest received
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	-		(1.976.617.500)	Increase in advances for the purchase of fixed assets
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(70.974.113.645)		(118.161.127.492)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang pihak berelasi	335.100.000.000		-	Proceeds from related party loan
Perolehan utang bank jangka panjang	5.670.495.252		234.727.030.732	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	-		35.000.000.000	Payments of short-term bank loans
Penerimaan (pembayaran) utang lain-lain	(19.800.000.000)		19.800.000.000	Proceeds (payments) of other payable - net
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(133.318.786)		(148.162.361)	Payments of finance lease liabilities
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	320.837.176.486		289.378.868.371	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	2.210.248.979		(6.597.030.225)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	6.172.482.989		12.769.513.214	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	8.382.731.968	4	6.172.482.989	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

*) Direklasifikasi. Lihat Catatan 37.

*) As reclassified. See Note 37.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2016

2016 dan/and 2015		
Dewan Komisaris dan Direksi		Boards of Commissioners and Directors
Komisaris Utama	Soetikno Soedarjo	President Commissioner
Komisaris	Soedarniati Harnyoto Sudrajat	Commissioner
Komisaris Independen	Ratna Widjaja	Independent Commissioner
Direktur Utama	Harijadi Soedarjo	President Director
Direktur	Bambang Sugianto Ibrahim Andi Hariyanto Rohadi	Directors
Direktur Independen	Marcellinus Hendro Restanto Sudarmanto	Independent Director
Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Ratna Widjaja	Chairman
Anggota	Yeti Suhandi Nia Budhiyanti	Members

Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2017

	2017	2016	
Dewan Komisaris dan Direksi			Boards of Commissioners and Directors
Komisaris Utama	Bambang Sugianto Ibrahim	Soetikno Soedarjo	President Commissioner
Komisaris	Soedarniati Harnyoto	Soedarniati Harnyoto	Commissioner
Komisaris Independen	Ratna Widjaja	Ratna Widjaja	Independent
Direktur Utama	Harijadi Soedarjo	Harijadi Soedarjo	President Director
Direktur	Harli Wijayadi Muhadi Rohadi	Bambang Sugianto Ibrahim Andi Hariyanto Rohadi	Directors
Direktur Independen	Sudarmanto	Marcellinus Hendro Sudarmanto	Independent Director
Komite Audit			Audit Committee
Ketua	Ratna Widjaja	Ratna Widjaja	Chairman
Anggota	Yeti Suhandi Nia Budhiyanti	Yeti Suhandi Nia Budhiyanti	Members

Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2018

2018 dan/and 2017		
Dewan Komisaris dan Direksi		Boards of Commissioners and Directors
Komisaris Utama	Bambang Sugianto Ibrahim	President Commissioner
Komisaris	Soedarniati Harnyoto Sudrajat	Commissioner
Komisaris Independen	Ratna Widjaja	Independent
Direktur Utama	Harijadi Soedarjo	President Director
Direktur	Harli Wijayadi Muhadi Rohadi	Directors
Direktur Independen	Sudarmanto	Independent Director
Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Ratna Widjaja	Chairman
Anggota	Yeti Suhandi Nia Budhiyanti	Members

Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2019

	2019	2018	
Dewan Komisaris dan Direksi			Boards of Commissioners and Directors
Komisaris Utama	Rohadi Muhadi	Bambang Sugianto Ibrahim Soedarniati Harnyoto	<i>President Commissioner</i>
Komisaris			<i>Commissioner</i>
Komisaris Independen	Ratna Widjaja	Ratna Widjaja	<i>Independent Commissioner</i>
Direktur Utama	Harijadi Soedarjo	Harijadi Soedarjo	<i>President Director</i>
Direktur	Harli Wijayadi Ryan Nurfitriandy	Harli Wijayadi Muhadi Rohadi	<i>Directors</i>
Direktur Independen	-	Sudarmanto	<i>Independent Director</i>
Komite Audit			<i>Audit Committee</i>
Ketua	Ratna Widjaja	Ratna Widjaja	<i>Chairman</i>
Anggota	Yeti Suhandi Nia Budhiyanti	Yeti Suhandi Nia Budhiyanti	<i>Members</i>

Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2020

	2020	2019	
Dewan Komisaris dan Direksi			Boards of Commissioners and Directors
Komisaris Utama	Rohadi Muhadi	Rohadi Muhadi	<i>President Commissioner</i>
Komisaris			<i>Commissioner</i>
Komisaris Independen	Connie Teresianti H.	Ratna Widjaja	<i>Independent Commissioner</i>
Direktur Utama	Harijadi Soedarjo	Harijadi Soedarjo	<i>President Director</i>
Direktur	Harli Wijayadi Ryan Nurfitriandy	Harli Wijayadi Ryan Nurfitriandy	<i>Directors</i>
Komite Audit			<i>Audit Committee</i>
Ketua	Connie Teresianti H.	Ratna Widjaja	<i>Chairman</i>
Anggota	Hamdi Effendi Jap. Budi Yarfani S.	Yeti Suhandi Nia Budhiyanti	<i>Members</i>

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL SAHAM

19. CAPITAL STOCK

Nama Pemegang Saham	2016		Total Modal Disetor/ Total Paid-in Capital	Name of Stockholder
	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		
PT Sinar Kasih Abadi	2.661.438.000	70,51%	266.143.800.000	PT Sinar Kasih Abadi
Tn. Harijadi Soedarjo	13.560.000	0,36%	1.356.000.000	Mr. Harijadi Soedarjo
Tn. Bambang Sugianto Ibrahim	2.500.000	0,07%	250.000.000	Mr. Bambang Sugianto Ibrahim
Tn. Andi Hariyanto	800.000	0,02%	80.000.000	Mr. Andi Hariyanto
Tn. Marcellinus Hendra Restanto	237.500	0,01%	23.750.000	Mr. Marcellinus Hendra Restanto
Tn. Rohadi	132.500	0,00%	13.250.000	Mr. Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.096.017.500	29,03%	109.601.750.000	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,00%	377.468.550.000	Total

Nama Pemegang Saham	2015		Total Modal Disetor/ Total Paid-in Capital	Name of Stockholder
	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		
PT Sinar Kasih Abadi	2.661.438.000	70,51%	266.143.800.000	PT Sinar Kasih Abadi
RBC (Asia) Ltd-Client A/C	191.465.900	5,07%	19.146.590.000	RBC (Asia) Ltd-Client A/C
Tn. Harijadi Soedarjo	13.560.000	0,36%	1.356.000.000	Mr. Harijadi Soedarjo
Tn. Bambang Sugianto Ibrahim	2.500.000	0,07%	250.000.000	Mr. Bambang Sugianto Ibrahim
Tn. Andi Hariyanto	800.000	0,02%	80.000.000	Mr. Andi Hariyanto
Tn. Marcellinus Hendra Restanto	237.500	0,01%	23.750.000	Mr. Marcellinus Hendra Restanto
Tn. Rohadi	132.500	0,00%	13.250.000	Mr. Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	904.551.600	23,96%	90.455.160.000	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,00%	377.468.550.000	Total

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL SAHAM

19. CAPITAL STOCK

Nama pemegang saham	2017			Name of stockholders
	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in capital	
PT Sarana Agro Investama	3.280.244.585	86,90%	328.024.458.500	PT Sarana Agro Investama
Tn. Harijadi Soedarjo	13.560.000	0,36%	1.356.000.000	Tn. Harijadi Soedarjo
Tn. Rohadi	132.500	0,00%	13.250.000	Tn. Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	480.748.415	12,74%	48.074.841.500	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,00%	377.468.550.000	Total

Nama pemegang saham	2016			Name of stockholders
	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in capital	
PT Sinar Kasih Abadi	2.661.438.000	70,51%	266.143.800.000	PT Sinar Kasih Abadi
Tn. Harijadi Soedarjo	13.560.000	0,36%	1.356.000.000	Mr. Harijadi Soedarjo
Tn. Bambang Sugianto Ibrahim	2.500.000	0,07%	250.000.000	Mr. Bambang Sugianto Ibrahim
Tn. Andi Hariyanto	800.000	0,02%	80.000.000	Mr. Andi Hariyanto
Tn. Marcellinus Hendra Restanto	237.500	0,01%	23.750.000	Mr. Marcellinus Hendra Restanto
Tn. Rohadi	132.500	0,00%	13.250.000	Mr. Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.096.017.500	29,03%	109.601.750.000	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,00%	377.468.550.000	Total

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM

18. CAPITAL STOCK

Nama pemegang saham	2018 dan/and 2017			Name of stockholders
	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in capital	
PT Sarana Agro Investama	3.280.244.585	86,90%	328.024.458.500	PT Sarana Agro Investama
Harijadi Soedarjo	13.560.000	0,36%	1.356.000.000	Harijadi Soedarjo
Rohadi	132.500	0,00%	13.250.000	Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	480.748.415	12,74%	48.074.841.500	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,00%	377.468.550.000	Total

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM

18. CAPITAL STOCK

Nama pemegang saham	2019			Name of stockholders
	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in capital	
PT Sarana Agro Investama	3.019.748.385	80,00%	301.974.838.500	PT Sarana Agro Investama
Harijadi Soedarjo	13.560.000	0,36%	1.356.000.000	Harijadi Soedarjo
Rohadi	132.500	0,00%	13.250.000	Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	741.244.615	19,64%	74.124.461.500	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,00%	377.468.550.000	Total

Nama pemegang saham	2018			Name of stockholders
	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in capital	
PT Sarana Agro Investama	3.280.244.585	86,90%	328.024.458.500	PT Sarana Agro Investama
Harijadi Soedarjo	13.560.000	0,36%	1.356.000.000	Harijadi Soedarjo
Rohadi	132.500	0,00%	13.250.000	Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	480.748.415	12,74%	48.074.841.500	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,00%	377.468.550.000	Total

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM

18. CAPITAL STOCK

2020				
Nama pemegang saham	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in capital	Name of stockholders
PT Sarana Agro Investama	3.019.748.385	79,999%	301.974.838.500	PT Sarana Agro Investama
Rohadi	132.500	0,004%	13.250.000	Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	754.804.615	19,997%	75.480.461.500	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,000%	377.468.550.000	Total
2019				
Nama pemegang saham	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in capital	Name of stockholders
PT Sarana Agro Investama	3.019.748.385	80,00%	301.974.838.500	PT Sarana Agro Investama
Harijadi Soedarjo	13.560.000	0,36%	1.356.000.000	Harijadi Soedarjo
Rohadi	132.500	0,00%	13.250.000	Rohadi
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	741.244.615	19,64%	74.124.461.500	Public (each below 5%)
Total	3.774.685.500	100,00%	377.468.550.000	Total

Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan

No.	Kode	Nama Perusahaan
Pertanian (Agriculture)		
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2.	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
3.	BISI	BISI International Tbk.
4.	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.
5.	DSFI	Dharma Samudera Fishing Indust
6.	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
7.	GZCO	Gozco Plantations Tbk.
8.	JAWA	Jaya Agra Wattie Tbk.
9.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb
10.	PALM	Provident Agro Tbk.
11.	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
12.	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk.
13.	SMAR	Smart Tbk.
14.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
15.	UNSP	Bakrie Sumatera Plantations Tb
Pertambangan (Mining)		
16.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
17.	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
18.	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk.
19.	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk
20.	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk.
21.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
22.	BYAN	Bayan Resources Tbk.
23.	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.
24.	CTTH	Citatah Tbk.
25.	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.
26.	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk
27.	ELSA	Elnusa Tbk.
28.	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
29.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
30.	HRUM	Harum Energy Tbk.
31.	INCO	Vale Indonesia Tbk.
32.	INDY	Indika Energy Tbk.
33.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
34.	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk
35.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
36.	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.

Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan

No.	Kode	Nama Perusahaan
37.	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
38.	MTFN	Capitalinc Investment Tbk.
39.	MYOH	Samindo Resources Tbk.
40.	PTRO	Petrosea Tbk.
41.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
42.	SMRU	SMR Utama Tbk.
43.	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.

Data Hasil Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

No.	Kode	Proporsi Komisaris Independen					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (<i>Agriculture</i>)							
1	AALI	0.400	0.400	0.500	0.500	0.600	0.480
2	ANJT	0.250	0.250	0.250	0.286	0.286	0.264
3	BISI	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
4	BWPT	0.500	0.400	0.400	0.500	0.333	0.427
5	DSFI	0.500	0.500	0.500	0.400	0.400	0.460
6	DSNG	0.375	0.300	0.333	0.333	0.333	0.335
7	GZCO	0.250	0.333	0.250	0.333	0.333	0.300
8	JAWA	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
9	LSIP	0.333	0.333	0.333	0.400	0.400	0.360
10	PALM	0.500	0.400	0.400	0.400	0.333	0.407
11	SGRO	0.333	0.333	0.333	0.333	0.500	0.367
12	SIMP	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
13	SMAR	0.500	0.500	0.429	0.429	0.429	0.457
14	SSMS	0.333	0.333	0.250	0.250	0.250	0.283
15	UNSP	0.500	0.400	0.400	0.400	0.400	0.420
Pertambangan (<i>Mining</i>)							
16	ADRO	0.400	0.400	0.250	0.400	0.400	0.370
17	ANTM	0.333	0.333	0.400	0.333	0.333	0.347
18	APEX	0.667	0.333	0.333	0.333	0.333	0.400
19	ARTI	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
20	BRMS	0.333	0.667	0.667	0.667	0.333	0.533
21	BSSR	0.375	0.500	0.375	0.375	0.375	0.400
22	BYAN	0.400	0.400	0.333	0.400	0.400	0.387
23	CITA	0.333	0.333	0.333	0.400	0.500	0.380
24	CTTH	0.333	0.500	0.500	0.500	0.333	0.433

Data Hasil Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

No.	Kode	Proporsi Komisaris Independen					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
25	DOID	0.571	0.667	0.571	0.571	0.571	0.590
26	DSSA	0.500	0.500	0.500	0.600	0.600	0.540
27	ELSA	0.400	0.400	0.400	0.400	0.500	0.420
28	ENRG	0.500	0.500	0.400	0.600	0.600	0.520
29	GEMS	0.500	0.500	0.500	0.500	0.400	0.480
30	HRUM	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
31	INCO	0.300	0.300	0.333	0.200	0.300	0.287
32	INDY	0.500	0.500	0.400	0.400	0.400	0.440
33	ITMG	0.400	0.286	0.400	0.500	0.429	0.403
34	KKGI	0.400	0.400	0.400	0.333	0.400	0.387
35	MBAP	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
36	MDKA	0.500	0.500	0.333	0.333	0.333	0.400
37	MEDC	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
38	MTFN	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
39	MYOH	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
40	PTRO	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
41	RUIS	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
42	SMRU	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
43	TOBA	0.667	0.400	0.400	0.667	0.667	0.560
	Max	0.667	0.667	0.667	0.667	0.667	0.590
	Min	0.250	0.250	0.250	0.200	0.250	0.264
	Mean	0.324	0.319	0.306	0.322	0.317	0.318

Data Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional

No.	Kode	Kepemilikan Institusional					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (Agriculture)							
1	AALI	0.797	0.797	0.797	0.797	0.797	0.797
2	ANJT	0.817	0.817	0.817	0.817	0.817	0.817
3	BISI	0.541	0.541	0.541	0.541	0.541	0.541
4	BWPT	0.691	0.746	0.747	0.747	0.747	0.736
5	DSFI	0.740	0.740	0.740	0.693	0.693	0.721
6	DSNG	0.550	0.559	0.559	0.560	0.560	0.557
7	GZCO	0.626	0.284	0.284	0.284	0.284	0.352
8	JAWA	0.705	0.869	0.869	0.800	0.800	0.809
9	LSIP	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596
10	PALM	0.883	0.890	0.890	0.890	0.890	0.889

Data Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional

No.	Kode	Kepemilikan Institusional					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
11	SGRO	0.728	0.727	0.725	0.725	0.670	0.715
12	SIMP	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785
13	SMAR	0.972	0.924	0.924	0.924	0.924	0.934
14	SSMS	0.674	0.666	0.640	0.658	0.682	0.664
15	UNSP	0.031	0.031	0.264	0.173	0.186	0.137
Pertambangan (Mining)							
16	ADRO	0.439	0.439	0.439	0.439	0.439	0.439
17	ANTM	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650
18	APEX	0.840	0.821	0.829	0.840	0.870	0.840
19	ARTI	0.654	0.447	0.447	0.447	0.424	0.484
20	BRMS	0.945	0.807	0.798	0.877	0.887	0.863
21	BSSR	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
22	BYAN	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
23	CITA	0.968	0.974	0.974	0.973	0.977	0.973
24	CTTH	0.519	0.522	0.464	0.528	0.530	0.513
25	DOID	0.392	0.382	0.379	0.379	0.379	0.382
26	DSSA	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599
27	ELSA	0.560	0.560	0.560	0.560	0.560	0.560
28	ENRG	0.319	0.146	0.438	0.438	0.399	0.348
29	GEMS	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
30	HRUM	0.755	0.779	0.781	0.834	0.799	0.789
31	INCO	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795
32	INDY	0.687	0.684	0.684	0.684	0.684	0.685
33	ITMG	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651
34	KKGI	0.649	0.649	0.649	0.649	0.649	0.649
35	MBAP	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900
36	MDKA	0.757	0.610	0.514	0.456	0.434	0.554
37	MEDC	0.808	0.724	0.720	0.716	0.732	0.740
38	MTFN	0.515	0.396	0.448	0.448	0.396	0.441
39	MYOH	0.636	0.636	0.590	0.590	0.590	0.608
40	PTRO	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
41	RUIS	0.280	0.322	0.380	0.382	0.382	0.349
42	SMRU	0.490	0.501	0.589	0.589	0.604	0.555
43	TOBA	0.931	0.933	0.933	0.933	0.933	0.932
	Max	0.972	0.974	0.974	0.973	0.977	0.973
	Min	0.031	0.031	0.264	0.173	0.186	0.137
	Mean	0.523	0.505	0.514	0.513	0.511	0.513

Data Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan

No.	Kode	Ukuran Perusahaan					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (<i>Agriculture</i>)							
1	AALI	30.818	30.847	30.922	30.926	30.955	30.894
2	ANJT	29.591	29.666	29.798	29.793	29.824	29.734
3	BISI	28.513	28.595	28.648	28.710	28.701	28.633
4	BWPT	30.419	30.403	30.414	30.391	30.343	30.394
5	DSFI	26.518	26.624	26.727	26.693	26.647	26.642
6	DSNG	29.733	29.752	30.094	30.084	30.281	29.989
7	GZCO	28.897	28.889	28.699	28.297	28.393	28.635
8	JAWA	28.822	28.829	28.867	28.881	28.882	28.856
9	LSIP	29.878	29.908	29.937	29.956	30.022	29.940
10	PALM	28.982	28.678	28.320	28.477	29.028	28.697
11	SGRO	29.751	29.745	29.830	29.879	29.908	29.823
12	SIMP	31.113	31.140	31.177	31.184	31.198	31.162
13	SMAR	30.895	30.931	31.009	30.956	31.187	30.996
14	SSMS	29.600	29.895	30.055	30.103	30.179	29.966
15	UNSP	30.319	30.262	30.224	29.759	29.656	30.044
Pertambangan (<i>Mining</i>)							
16	ADRO	32.110	32.154	32.259	32.239	32.130	32.178
17	ANTM	31.032	31.033	31.137	31.039	31.088	31.066
18	APEX	29.847	29.689	29.639	29.572	29.188	29.587
19	ARTI	28.593	28.550	28.621	28.211	27.472	28.289
20	BRMS	30.308	30.092	29.935	29.924	29.745	30.001
21	BSSR	28.536	28.677	28.898	28.880	28.943	28.787
22	BYAN	30.036	30.119	30.444	30.508	30.760	30.374
23	CITA	28.634	28.616	28.815	28.982	29.050	28.820
24	CTTH	27.146	27.275	27.324	27.333	27.265	27.269
25	DOID	30.109	30.179	30.474	30.429	30.250	30.288
26	DSSA	31.093	31.297	31.510	31.604	31.355	31.372
27	ELSA	29.064	29.211	29.364	29.549	29.654	29.368
28	ENRG	30.295	29.958	29.991	29.876	30.109	30.046
29	GEMS	29.317	29.711	29.948	30.016	30.071	29.812
30	HRUM	29.407	29.513	29.531	29.485	29.595	29.506
31	INCO	31.031	31.023	31.088	31.061	31.112	31.063
32	INDY	30.534	31.224	31.234	28.916	31.185	30.619

Data Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan

No.	Kode	Ukuran Perusahaan					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
33	ITMG	30.419	30.544	30.670	30.453	30.425	30.502
34	KKGI	27.913	27.984	28.161	28.194	28.058	28.062
35	MBAP	28.078	28.410	28.552	28.615	28.574	28.446
36	MDKA	29.045	29.243	30.079	30.212	30.217	29.759
37	MEDC	31.515	31.876	31.963	32.055	32.051	31.892
38	MTFN	26.454	27.371	27.750	27.428	27.309	27.262
39	MYOH	28.313	28.243	28.416	28.432	28.388	28.358
40	PTRO	29.290	29.409	29.704	29.668	29.642	29.543
41	RUIS	27.610	27.590	27.621	27.855	27.928	27.721
42	SMRU	28.517	28.339	28.277	28.147	27.885	28.233
43	TOBA	28.888	29.183	29.614	30.083	30.019	29.557
	Max	32.110	32.154	32.259	32.239	32.130	32.178
	Min	26.454	26.624	26.727	26.693	26.647	26.642
	Mean	23.036	23.103	23.195	23.143	23.176	23.131

Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

No.	Kode	Penghindaran Pajak (ETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (Agriculture)							
1	AALI	0.043	0.281	0.311	0.631	0.389	0.331
2	ANJT	0.525	0.352	1.074	1.610	0.853	0.883
3	BISI	0.260	0.223	0.201	0.242	0.245	0.234
4	BWPT	-0.164	-0.131	0.165	0.192	0.036	0.020
5	DSFI	0.253	0.263	0.247	0.233	0.161	0.231
6	DSNG	0.253	0.291	0.293	0.364	0.312	0.303
7	GZCO	0.029	0.196	0.159	0.063	0.178	0.125
8	JAWA	-0.012	0.147	0.014	0.108	0.039	0.059
9	LSIP	0.239	0.241	0.210	0.284	0.189	0.233
10	PALM	0.126	0.096	-0.286	0.012	-0.003	-0.011
11	SGRO	-0.722	0.370	0.555	0.770	2.909	0.777
12	SIMP	0.563	0.417	1.861	-2.257	0.666	0.250
13	SMAR	-0.817	0.018	0.148	0.229	0.262	-0.032
14	SSMS	0.302	0.277	0.745	0.922	0.354	0.520
15	UNSP	-0.888	-0.299	0.058	-0.017	-0.201	-0.270
Pertambangan (Mining)							
16	ADRO	0.377	0.423	0.418	0.340	0.287	0.369
17	ANTM	0.727	0.700	0.309	0.718	0.300	0.551

Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

No.	Kode	Penghindaran Pajak (ETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
18	APEX	0.232	0.045	0.055	0.270	-0.014	0.118
19	ARTI	-3.527	0.121	0.283	0.000	-0.038	-0.632
20	BRMS	0.110	-0.436	0.000	-0.029	0.708	0.071
21	BSSR	0.230	0.259	0.260	0.263	0.253	0.253
22	BYAN	0.389	0.195	0.247	0.248	0.193	0.255
23	CITA	0.003	-0.014	0.088	0.225	0.228	0.106
24	CTTH	0.220	0.321	0.443	0.033	-0.119	0.179
25	DOID	0.389	0.461	0.299	0.413	0.038	0.320
26	DSSA	0.337	0.330	0.379	0.461	-9.685	-1.636
27	ELSA	0.244	0.232	0.215	0.236	0.278	0.241
28	ENRG	-0.083	0.839	1.654	0.723	0.461	0.719
29	GEMS	0.007	0.282	0.258	0.335	0.246	0.226
30	HRUM	0.388	0.237	0.166	0.215	0.060	0.213
31	INCO	0.631	0.337	0.268	0.356	0.209	0.360
32	INDY	0.094	-0.072	0.631	0.908	-0.043	0.304
33	ITMG	0.319	0.302	0.296	0.320	0.479	0.343
34	KKGI	0.346	0.316	0.575	0.326	0.073	0.327
35	MBAP	0.250	0.255	0.256	0.272	0.265	0.260
36	MDKA	0.572	0.316	0.333	0.362	0.486	0.414
37	MEDC	0.241	0.473	0.921	1.113	-0.736	0.403
38	MTFN	-0.001	0.201	0.258	0.307	-0.189	0.115
39	MYOH	0.278	0.277	0.254	0.253	0.223	0.257
40	PTRO	-0.110	0.230	0.329	0.228	0.085	0.152
41	RUIS	0.525	0.462	0.393	0.347	0.427	0.431
42	SMRU	0.071	3.443	0.163	-0.013	0.060	0.745
43	TOBA	0.439	0.313	0.300	0.304	0.149	0.301
	Max	0.727	3.443	1.861	1.610	2.909	0.883
	Min	-3.527	-0.436	-0.286	-2.257	-9.685	-1.636
	Mean	0.067	0.247	0.287	0.235	0.020	0.171

Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

No.	Kode	Penghindaran Pajak (CETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian (Agriculture)							
1	AALI	0.361	0.318	0.494	0.353	-0.383	0.229
2	ANJT	0.735	0.159	3.948	1.094	0.349	1.257
3	BISI	0.220	0.255	0.248	0.325	0.319	0.274

Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

No.	Kode	Penghindaran Pajak (CETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	BWPT	-0.221	-0.303	-0.128	-0.011	-0.001	-0.133
5	DSFI	0.519	0.316	0.433	0.283	0.000	0.310
6	DSNG	0.493	0.148	0.497	1.107	0.154	0.480
7	GZCO	-0.012	-0.060	0.000	-0.008	0.250	0.034
8	JAWA	-0.001	-0.010	0.000	0.000	0.000	-0.002
9	LSIP	0.164	0.269	0.487	0.134	0.085	0.228
10	PALM	0.025	0.594	-0.116	-0.174	0.000	0.066
11	SGRO	0.729	0.252	1.307	0.611	0.357	0.651
12	SIMP	0.349	0.578	2.719	-1.561	0.222	0.461
13	SMAR	0.258	0.230	0.420	0.162	0.073	0.229
14	SSMS	0.217	0.274	1.210	1.913	0.269	0.777
15	UNSP	-0.625	-0.094	-0.020	-0.005	-0.009	-0.151
Pertambangan (Mining)							
16	ADRO	0.284	0.555	0.496	0.466	0.811	0.522
17	ANTM	0.421	0.431	0.436	1.069	0.204	0.512
18	APEX	-0.124	-0.020	-0.023	0.025	0.009	-0.026
19	ARTI	-5.051	1.729	0.387	-0.002	-0.001	-0.588
20	BRMS	-0.017	-0.023	-0.103	0.275	0.034	0.033
21	BSSR	0.562	0.221	0.424	0.605	0.174	0.397
22	BYAN	1.152	0.101	0.219	0.683	0.141	0.459
23	CITA	0.165	0.143	0.045	0.546	0.718	0.323
24	CTTH	0.239	1.003	0.410	-0.026	-0.031	0.319
25	DOID	0.340	0.461	0.344	0.793	0.756	0.539
26	DSSA	0.085	0.121	0.389	0.379	-5.222	-0.850
27	ELSA	0.364	0.430	0.610	0.502	0.744	0.530
28	ENRG	-0.096	1.464	3.968	0.521	0.567	1.285
29	GEMS	0.100	0.108	0.521	0.421	0.168	0.263
30	HRUM	0.047	0.189	0.578	0.574	0.059	0.290
31	INCO	6.550	-0.650	0.440	0.792	0.403	1.507
32	INDY	-0.215	0.163	1.028	4.264	-1.295	0.789
33	ITMG	0.339	0.165	0.297	0.599	0.864	0.453
34	KKGI	0.208	0.314	4.290	0.062	-0.175	0.940
35	MBAP	0.382	0.290	0.365	0.213	0.065	0.263
36	MDKA	-0.872	0.000	0.334	0.474	0.638	0.115
37	MEDC	0.090	0.565	0.849	1.176	-1.472	0.242
38	MTFN	0.000	2.263	0.431	0.012	-0.128	0.516
39	MYOH	0.325	0.434	0.202	0.292	0.230	0.297

Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

No.	Kode	Penghindaran Pajak (CETR)					Mean
		2016	2017	2018	2019	2020	
40	PTRO	-0.553	0.180	0.091	0.319	0.425	0.092
41	RUIS	0.426	0.611	0.377	0.395	0.423	0.447
42	SMRU	0.200	2.620	0.935	-0.036	0.173	0.778
43	TOBA	0.503	0.219	0.278	0.280	0.147	0.285
	Max	6.550	2.620	4.290	4.264	0.864	1.507
	Min	-5.051	-0.650	-0.128	-1.561	-5.222	-0.850
	Mean	0.165	0.309	0.548	0.362	0.020	0.281

Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Kode	Tahun	Proporsi Komisaris Independen		KI
		Komisaris Independen	Dewan Komisaris	
AALI	2016	2	5	0.400
	2017	2	5	0.400
	2018	2	4	0.500
	2019	2	4	0.500
	2020	3	5	0.600
ANJT	2016	2	8	0.250
	2017	2	8	0.250
	2018	2	8	0.250
	2019	2	7	0.286
	2020	2	7	0.286
BISI	2016	1	3	0.333
	2017	1	3	0.333
	2018	1	3	0.333
	2019	1	3	0.333
	2020	1	3	0.333
BWPT	2016	2	4	0.500
	2017	2	5	0.400
	2018	2	5	0.400
	2019	2	4	0.500
	2020	1	3	0.333
DSFI	2016	1	2	0.500
	2017	1	2	0.500
	2018	1	2	0.500
	2019	2	5	0.400
	2020	2	5	0.400
DSNG	2016	3	8	0.375

Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Kode	Tahun	Proporsi Komisaris Independen		KI
		Komisaris Independen	Dewan Komisaris	
	2017	3	10	0.300
	2018	3	9	0.333
	2019	3	9	0.333
	2020	3	9	0.333
GZCO	2016	1	4	0.250
	2017	1	3	0.333
	2018	1	4	0.250
	2019	1	3	0.333
	2020	1	3	0.333
JAWA	2016	1	3	0.333
	2017	1	3	0.333
	2018	1	3	0.333
	2019	1	3	0.333
	2020	1	3	0.333
LSIP	2016	2	6	0.333
	2017	2	6	0.333
	2018	2	6	0.333
	2019	2	5	0.400
	2020	2	5	0.400
PALM	2016	3	6	0.500
	2017	2	5	0.400
	2018	2	5	0.400
	2019	2	5	0.400
	2020	1	3	0.333
SGRO	2016	1	3	0.333
	2017	1	3	0.333
	2018	1	3	0.333
	2019	1	3	0.333
	2020	2	4	0.500
SIMP	2016	2	6	0.333
	2017	2	6	0.333
	2018	2	6	0.333
	2019	2	6	0.333
	2020	2	6	0.333
SMAR	2016	4	8	0.500
	2017	4	8	0.500
	2018	3	7	0.429

Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Kode	Tahun	Proporsi Komisaris Independen		KI
		Komisaris Independen	Dewan Komisaris	
	2019	3	7	0.429
	2020	3	7	0.429
SSMS	2016	1	3	0.333
	2017	1	3	0.333
	2018	1	4	0.250
	2019	1	4	0.250
	2020	1	4	0.250
UNSP	2016	3	6	0.500
	2017	2	5	0.400
	2018	2	5	0.400
	2019	2	5	0.400
	2020	2	5	0.400
ADRO	2016	2	5	0.400
	2017	2	5	0.400
	2018	1	4	0.250
	2019	2	5	0.400
	2020	2	5	0.400
ANTM	2016	2	6	0.333
	2017	2	6	0.333
	2018	2	5	0.400
	2019	2	6	0.333
	2020	2	6	0.333
APEX	2016	2	3	0.667
	2017	1	3	0.333
	2018	1	3	0.333
	2019	1	3	0.333
	2020	1	3	0.333
ARTI	2016	1	2	0.500
	2017	1	2	0.500
	2018	1	2	0.500
	2019	1	2	0.500
	2020	1	2	0.500
BRMS	2016	1	3	0.333
	2017	2	3	0.667
	2018	2	3	0.667
	2019	2	3	0.667
	2020	2	6	0.333

Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Kode	Tahun	Proporsi Komisaris Independen		KI
		Komisaris Independen	Dewan Komisaris	
BSSR	2016	3	8	0.375
	2017	3	6	0.500
	2018	3	8	0.375
	2019	3	8	0.375
	2020	3	8	0.375
BYAN	2016	2	5	0.400
	2017	2	5	0.400
	2018	2	6	0.333
	2019	2	5	0.400
	2020	2	5	0.400
CITA	2016	1	3	0.333
	2017	1	3	0.333
	2018	1	3	0.333
	2019	2	5	0.400
	2020	2	4	0.500
CTTH	2016	1	3	0.333
	2017	2	4	0.500
	2018	2	4	0.500
	2019	2	4	0.500
	2020	1	3	0.333
DOID	2016	4	7	0.571
	2017	4	6	0.667
	2018	4	7	0.571
	2019	4	7	0.571
	2020	4	7	0.571
DSSA	2016	2	4	0.500
	2017	2	4	0.500
	2018	2	4	0.500
	2019	3	5	0.600
	2020	3	5	0.600
ELSA	2016	2	5	0.400
	2017	2	5	0.400
	2018	2	5	0.400
	2019	2	5	0.400
	2020	2	4	0.500
ENRG	2016	2	4	0.500
	2017	2	4	0.500

Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Kode	Tahun	Proporsi Komisaris Independen		KI
		Komisaris Independen	Dewan Komisaris	
	2018	2	5	0.400
	2019	3	5	0.600
	2020	3	5	0.600
GEMS	2016	3	6	0.500
	2017	3	6	0.500
	2018	3	6	0.500
	2019	3	6	0.500
	2020	2	5	0.400
HRUM	2016	2	6	0.333
	2017	2	6	0.333
	2018	2	6	0.333
	2019	2	6	0.333
	2020	2	6	0.333
INCO	2016	3	10	0.300
	2017	3	10	0.300
	2018	2	6	0.333
	2019	1	5	0.200
	2020	3	10	0.300
INDY	2016	2	4	0.500
	2017	2	4	0.500
	2018	2	5	0.400
	2019	2	5	0.400
	2020	2	5	0.400
ITMG	2016	2	5	0.400
	2017	2	7	0.286
	2018	2	5	0.400
	2019	3	6	0.500
	2020	3	7	0.429
KKGI	2016	2	5	0.400
	2017	2	5	0.400
	2018	2	5	0.400
	2019	2	6	0.333
	2020	2	5	0.400
MBAP	2016	1	3	0.333
	2017	1	3	0.333
	2018	1	3	0.333
	2019	1	3	0.333

Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Kode	Tahun	Proporsi Komisaris Independen		KI
		Komisaris Independen	Dewan Komisaris	
	2020	1	3	0.333
MDKA	2016	2	4	0.500
	2017	2	4	0.500
	2018	2	6	0.333
	2019	2	6	0.333
	2020	2	6	0.333
MEDC	2016	2	5	0.400
	2017	2	5	0.400
	2018	2	5	0.400
	2019	2	5	0.400
	2020	2	5	0.400
MTFN	2016	1	2	0.500
	2017	1	2	0.500
	2018	1	2	0.500
	2019	1	2	0.500
	2020	1	2	0.500
MYOH	2016	1	3	0.333
	2017	1	3	0.333
	2018	1	3	0.333
	2019	1	3	0.333
	2020	1	3	0.333
PTRO	2016	2	5	0.400
	2017	2	5	0.400
	2018	2	5	0.400
	2019	2	5	0.400
	2020	2	5	0.400
RUIS	2016	1	3	0.333
	2017	1	3	0.333
	2018	1	3	0.333
	2019	1	3	0.333
	2020	1	3	0.333
SMRU	2016	1	2	0.500
	2017	1	2	0.500
	2018	1	2	0.500
	2019	1	2	0.500
	2020	1	2	0.500
TOBA	2016	2	3	0.667

Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Kode	Tahun	Proporsi Komisaris Independen		KI
		Komisaris Independen	Dewan Komisaris	
	2017	2	5	0.400
	2018	2	5	0.400
	2019	2	3	0.667
	2020	2	3	0.667

Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kode	Tahun	Kepemilikan Institusional		INST
		Saham Institusional	Total Saham	
AALI	2016	1,533,682,440	1,924,688,333	0.797
	2017	1,533,682,440	1,924,688,333	0.797
	2018	1,533,682,440	1,924,688,333	0.797
	2019	1,533,682,440	1,924,688,333	0.797
	2020	1,533,682,440	1,924,688,333	0.797
ANJT	2016	2,740,101,524	3,354,175,000	0.817
	2017	2,740,101,524	3,354,175,000	0.817
	2018	2,740,101,524	3,354,175,000	0.817
	2019	2,740,101,524	3,354,175,000	0.817
	2020	2,740,101,524	3,354,175,000	0.817
BISI	2016	1,622,344,000	3,000,000,000	0.541
	2017	1,622,344,000	3,000,000,000	0.541
	2018	1,622,344,000	3,000,000,000	0.541
	2019	1,624,312,500	3,000,000,000	0.541
	2020	1,624,312,500	3,000,000,000	0.541
BWPT	2016	21,778,073,086	31,525,291,000	0.691
	2017	23,529,984,486	31,525,291,000	0.746
	2018	23,550,479,186	31,525,291,000	0.747
	2019	23,550,479,186	31,525,291,000	0.747
	2020	23,550,479,186	31,525,291,000	0.747
DSFI	2016	1,374,952,750	1,857,135,500	0.740
	2017	1,374,952,750	1,857,135,500	0.740
	2018	1,374,952,750	1,857,135,500	0.740
	2019	1,286,896,450	1,857,135,500	0.693
	2020	1,286,896,450	1,857,135,500	0.693
DSNG	2016	5,832,182,608	10,599,842,400	0.550
	2017	5,924,900,208	10,599,842,400	0.559
	2018	5,924,900,208	10,599,842,400	0.559
	2019	5,930,776,208	10,599,842,400	0.560
	2020	5,930,776,208	10,599,842,400	0.560
GZCO	2016	3,754,390,000	6,000,000,000	0.626

Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kode	Tahun	Kepemilikan Institusional		INST
		Saham Institusional	Total Saham	
	2017	1,702,000,000	6,000,000,000	0.284
	2018	1,702,000,000	6,000,000,000	0.284
	2019	1,702,000,000	6,000,000,000	0.284
	2020	1,702,000,000	6,000,000,000	0.284
	2020	1,702,000,000	6,000,000,000	0.284
JAWA	2016	2,661,438,000	3,774,685,500	0.705
	2017	3,280,244,585	3,774,685,500	0.869
	2018	3,280,244,585	3,774,685,500	0.869
	2019	3,019,748,385	3,774,685,500	0.800
	2020	3,019,748,385	3,774,685,500	0.800
LSIP	2016	4,065,995,310	6,822,863,965	0.596
	2017	4,065,995,310	6,822,863,965	0.596
	2018	4,065,995,310	6,822,863,965	0.596
	2019	4,065,995,310	6,822,863,965	0.596
	2020	4,065,995,310	6,822,863,965	0.596
PALM	2016	6,288,401,782	7,119,540,356	0.883
	2017	6,339,109,910	7,119,540,356	0.890
	2018	6,339,109,910	7,119,540,356	0.890
	2019	6,339,109,910	7,119,540,356	0.890
	2020	6,339,109,910	7,119,540,356	0.890
SGRO	2016	1,375,484,800	1,890,000,000	0.728
	2017	1,374,638,700	1,890,000,000	0.727
	2018	1,370,114,200	1,890,000,000	0.725
	2019	1,370,102,200	1,890,000,000	0.725
	2020	1,267,217,500	1,890,000,000	0.670
SIMP	2016	12,423,051,400	15,816,310,000	0.785
	2017	12,423,051,400	15,816,310,000	0.785
	2018	12,423,051,400	15,816,310,000	0.785
	2019	12,423,051,400	15,816,310,000	0.785
	2020	12,423,051,400	15,816,310,000	0.785
SMAR	2016	2,791,897,571	2,872,193,366	0.972
	2017	2,653,897,571	2,872,193,366	0.924
	2018	2,653,897,571	2,872,193,366	0.924
	2019	2,653,897,571	2,872,193,366	0.924
	2020	2,653,897,571	2,872,193,366	0.924
SSMS	2016	6,420,000,000	9,525,000,000	0.674
	2017	6,344,113,500	9,525,000,000	0.666
	2018	6,093,682,900	9,525,000,000	0.640
	2019	6,267,969,879	9,525,000,000	0.658
	2020	6,493,410,000	9,525,000,000	0.682
UNSP	2016	430,000,000	13,720,471,386	0.031

Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kode	Tahun	Kepemilikan Institusional		INST
		Saham Institusional	Total Saham	
	2017	43,000,000	1,372,047,144	0.031
	2018	660,104,100	2,500,162,344	0.264
	2019	433,038,700	2,500,162,338	0.173
	2020	463,790,732	2,500,162,338	0.186
ADRO	2016	14,045,425,500	31,985,962,000	0.439
	2017	14,045,425,500	31,985,962,000	0.439
	2018	14,045,425,500	31,985,962,000	0.439
	2019	14,045,425,500	31,985,962,000	0.439
	2020	14,045,425,500	31,985,962,000	0.439
ANTM	2016	15,620,000,000	24,030,764,725	0.650
	2017	15,620,000,000	24,030,764,725	0.650
	2018	15,620,000,000	24,030,764,725	0.650
	2019	15,620,000,000	24,030,764,725	0.650
	2020	15,620,000,000	24,030,764,725	0.650
APEX	2016	2,233,455,517	2,659,850,000	0.840
	2017	2,183,112,837	2,659,850,000	0.821
	2018	2,204,658,341	2,659,850,000	0.829
	2019	2,233,728,108	2,659,850,000	0.840
	2020	2,313,526,608	2,659,850,000	0.870
ARTI	2016	5,129,508,636	7,840,000,000	0.654
	2017	3,506,776,837	7,840,000,000	0.447
	2018	3,506,776,837	7,840,000,000	0.447
	2019	3,506,776,837	7,840,000,000	0.447
	2020	3,326,779,837	7,840,000,000	0.424
BRMS	2016	24,174,817,800	25,570,150,644	0.945
	2017	50,313,350,575	62,322,456,902	0.807
	2018	49,763,168,475	62,322,456,902	0.798
	2019	54,635,465,983	62,322,456,902	0.877
	2020	62,979,568,915	71,007,759,834	0.887
BSSR	2016	2,374,242,774	2,616,500,000	0.907
	2017	2,374,242,774	2,616,500,000	0.907
	2018	2,374,242,774	2,616,500,000	0.907
	2019	2,374,242,774	2,616,500,000	0.907
	2020	2,374,242,774	2,616,500,000	0.907
BYAN	2016	1,000,000,200	3,333,333,500	0.300
	2017	1,000,004,700	3,333,333,500	0.300
	2018	1,000,004,700	3,333,333,500	0.300
	2019	1,000,004,700	3,333,333,500	0.300
	2020	1,000,004,700	3,333,333,500	0.300
CITA	2016	3,264,317,380	3,370,734,900	0.968

Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kode	Tahun	Kepemilikan Institusional		INST
		Saham Institusional	Total Saham	
	2017	3,282,667,880	3,370,734,900	0.974
	2018	3,282,667,880	3,370,734,900	0.974
	2019	3,280,687,080	3,370,734,900	0.973
	2020	3,870,471,542	3,960,361,250	0.977
CTTH	2016	638,867,152	1,230,839,821	0.519
	2017	642,704,152	1,230,839,821	0.522
	2018	571,241,478	1,230,839,821	0.464
	2019	649,920,078	1,230,839,821	0.528
	2020	652,241,478	1,230,839,821	0.530
DOID	2016	3,264,000,000	8,325,016,732	0.392
	2017	3,264,000,000	8,553,342,132	0.382
	2018	3,264,000,000	8,611,686,432	0.379
	2019	3,264,000,000	8,619,817,982	0.379
	2020	3,264,000,000	8,619,817,982	0.379
DSSA	2016	461,552,320	770,552,320	0.599
	2017	461,552,320	770,552,320	0.599
	2018	461,552,320	770,552,320	0.599
	2019	461,552,320	770,552,320	0.599
	2020	461,552,320	770,552,320	0.599
ELSA	2016	4,087,407,500	7,298,500,000	0.560
	2017	4,087,407,500	7,298,500,000	0.560
	2018	4,087,407,500	7,298,500,000	0.560
	2019	4,087,407,500	7,298,500,000	0.560
	2020	4,087,407,500	7,298,500,000	0.560
ENRG	2016	15,666,485,375	49,106,783,762	0.319
	2017	898,278,476	6,138,347,972	0.146
	2018	4,527,024,848	10,342,179,272	0.438
	2019	4,527,024,973	10,342,179,272	0.438
	2020	4,129,634,648	10,342,179,272	0.399
GEMS	2016	5,705,882,500	5,882,353,000	0.970
	2017	5,705,882,500	5,882,353,000	0.970
	2018	5,705,882,500	5,882,353,000	0.970
	2019	5,705,882,500	5,882,353,000	0.970
	2020	5,705,882,500	5,882,353,000	0.970
HRUM	2016	1,992,488,700	2,640,491,700	0.755
	2017	2,004,594,700	2,573,765,300	0.779
	2018	2,004,594,700	2,566,637,900	0.781
	2019	2,140,596,200	2,566,637,900	0.834
	2020	2,159,774,800	2,703,620,000	0.799
INCO	2016	7,899,991,840	9,936,338,720	0.795

Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kode	Tahun	Kepemilikan Institusional		INST
		Saham Institusional	Total Saham	
	2017	7,899,991,840	9,936,338,720	0.795
	2018	7,899,991,840	9,936,338,720	0.795
	2019	7,899,991,840	9,936,338,720	0.795
	2020	7,899,991,840	9,936,338,720	0.795
INDY	2016	3,578,859,800	5,210,192,000	0.687
	2017	3,565,859,800	5,210,192,000	0.684
	2018	3,565,859,800	5,210,192,000	0.684
	2019	3,565,859,800	5,210,192,000	0.684
	2020	3,565,859,800	5,210,192,000	0.684
ITMG	2016	736,071,000	1,129,925,000	0.651
	2017	736,071,000	1,129,925,000	0.651
	2018	736,071,000	1,129,925,000	0.651
	2019	736,071,000	1,129,925,000	0.651
	2020	736,071,000	1,129,925,000	0.651
KKG I	2016	648,883,500	1,000,000,000	0.649
	2017	3,244,417,500	5,000,000,000	0.649
	2018	3,243,916,900	5,000,000,000	0.649
	2019	3,243,916,900	5,000,000,000	0.649
	2020	3,242,677,500	5,000,000,000	0.649
MBAP	2016	1,104,544,752	1,227,271,952	0.900
	2017	1,104,544,752	1,227,271,952	0.900
	2018	1,104,544,752	1,227,271,952	0.900
	2019	1,104,544,752	1,227,271,952	0.900
	2020	1,104,544,752	1,227,271,952	0.900
MDKA	2016	2,700,922,152	3,569,587,140	0.757
	2017	2,178,824,048	3,569,587,140	0.610
	2018	2,138,796,794	4,164,518,330	0.514
	2019	9,985,125,170	21,897,591,650	0.456
	2020	9,498,788,487	21,897,591,650	0.434
MEDC	2016	2,693,851,806	3,332,451,450	0.808
	2017	12,831,826,563	17,728,923,467	0.724
	2018	12,831,826,563	17,829,347,601	0.720
	2019	12,831,826,563	17,916,081,914	0.716
	2020	18,397,178,195	25,136,231,252	0.732
MTFN	2016	16,407,682,850	31,842,082,852	0.515
	2017	12,624,500,000	31,842,082,852	0.396
	2018	14,265,609,500	31,842,082,852	0.448
	2019	14,265,609,500	31,842,082,852	0.448
	2020	12,624,500,000	31,842,082,852	0.396
MYOH	2016	1,402,479,275	2,206,312,500	0.636

Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kode	Tahun	Kepemilikan Institusional		INST
		Saham Institusional	Total Saham	
	2017	1,402,479,275	2,206,312,500	0.636
	2018	1,302,479,275	2,206,312,500	0.590
	2019	1,302,479,275	2,206,312,500	0.590
	2020	1,302,479,275	2,206,312,500	0.590
PTRO	2016	704,014,200	1,008,605,000	0.698
	2017	704,014,200	1,008,605,000	0.698
	2018	704,014,200	1,008,605,000	0.698
	2019	704,014,200	1,008,605,000	0.698
	2020	704,014,200	1,008,605,000	0.698
RUIS	2016	215,500,800	770,000,000	0.280
	2017	248,095,500	770,000,000	0.322
	2018	292,494,200	770,000,000	0.380
	2019	293,832,800	770,000,000	0.382
	2020	293,832,800	770,000,000	0.382
SMRU	2016	6,123,730,065	12,499,385,782	0.490
	2017	6,262,578,065	12,499,385,782	0.501
	2018	7,364,018,419	12,499,385,782	0.589
	2019	7,364,018,419	12,499,385,782	0.589
	2020	7,551,378,419	12,499,385,782	0.604
TOBA	2016	1,874,455,000	2,012,491,000	0.931
	2017	1,876,886,800	2,012,491,000	0.933
	2018	1,876,886,800	2,012,491,000	0.933
	2019	7,507,547,200	8,049,964,000	0.933
	2020	7,507,747,200	8,049,964,000	0.933

Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan	SIZE
		Total Asset	
AALI	2016	Rp 24,226,122,000,000	30.818
	2017	Rp 24,935,426,000,000	30.847
	2018	Rp 26,856,967,000,000	30.922
	2019	Rp 26,974,124,000,000	30.926
	2020	Rp 27,781,231,000,000	30.955
ANJT	2016	Rp 7,096,049,675,676	29.591
	2017	Rp 7,655,728,945,946	29.666
	2018	Rp 8,727,607,478,261	29.798
	2019	Rp 8,690,390,333,333	29.793
	2020	Rp 8,959,772,000,000	29.824

Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan	SIZE
		Total Asset	
BISI	2016	Rp 2,416,177,000,000	28.513
	2017	Rp 2,622,336,000,000	28.595
	2018	Rp 2,765,010,000,000	28.648
	2019	Rp 2,941,056,000,000	28.710
	2020	Rp 2,914,979,000,000	28.701
BWPT	2016	Rp 16,254,353,000,000	30.419
	2017	Rp 15,991,148,000,000	30.403
	2018	Rp 16,163,267,000,000	30.414
	2019	Rp 15,796,470,000,000	30.391
	2020	Rp 15,060,968,000,000	30.343
DSFI	2016	Rp 328,714,732,282	26.518
	2017	Rp 365,398,170,105	26.624
	2018	Rp 404,997,860,246	26.727
	2019	Rp 391,479,346,685	26.693
	2020	Rp 373,757,193,361	26.647
DSNG	2016	Rp 8,183,318,000,000	29.733
	2017	Rp 8,336,065,000,000	29.752
	2018	Rp 11,738,892,000,000	30.094
	2019	Rp 11,620,821,000,000	30.084
	2020	Rp 14,151,383,000,000	30.281
GZCO	2016	Rp 3,547,023,000,000	28.897
	2017	Rp 3,517,586,000,000	28.889
	2018	Rp 2,910,873,000,000	28.699
	2019	Rp 1,946,438,000,000	28.297
	2020	Rp 2,143,393,000,000	28.393
JAWA	2016	Rp 3,291,116,891,878	28.822
	2017	Rp 3,312,481,991,638	28.829
	2018	Rp 3,442,393,738,873	28.867
	2019	Rp 3,489,776,816,128	28.881
	2020	Rp 3,493,727,182,127	28.882
LSIP	2016	Rp 9,459,088,000,000	29.878
	2017	Rp 9,744,381,000,000	29.908
	2018	Rp 10,037,294,000,000	29.937
	2019	Rp 10,225,322,000,000	29.956
	2020	Rp 10,922,788,000,000	30.022
PALM	2016	Rp 3,860,775,779,000	28.982
	2017	Rp 2,849,094,080,000	28.678

Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan		SIZE
		Total Asset		
	2018	Rp	1,992,544,414,000	28.320
	2019	Rp	2,330,315,741,000	28.477
	2020	Rp	4,043,604,072,000	29.028
SGRO	2016	Rp	8,328,480,337,000	29.751
	2017	Rp	8,284,699,367,000	29.745
	2018	Rp	9,018,844,952,000	29.830
	2019	Rp	9,466,942,773,000	29.879
	2020	Rp	9,744,680,000,000	29.908
SIMP	2016	Rp	32,537,592,000,000	31.113
	2017	Rp	33,397,766,000,000	31.140
	2018	Rp	34,666,506,000,000	31.177
	2019	Rp	34,910,838,000,000	31.184
	2020	Rp	35,395,264,000,000	31.198
SMAR	2016	Rp	26,141,410,000,000	30.895
	2017	Rp	27,124,101,000,000	30.931
	2018	Rp	29,310,310,000,000	31.009
	2019	Rp	27,787,527,000,000	30.956
	2020	Rp	35,026,171,000,000	31.187
SSMS	2016	Rp	7,162,970,110,000	29.600
	2017	Rp	9,623,672,614,000	29.895
	2018	Rp	11,296,112,298,000	30.055
	2019	Rp	11,845,204,657,000	30.103
	2020	Rp	12,775,930,059,000	30.179
UNSP	2016	Rp	14,700,318,360,000	30.319
	2017	Rp	13,883,992,000,000	30.262
	2018	Rp	13,363,483,000,000	30.224
	2019	Rp	8,399,862,000,000	29.759
	2020	Rp	7,576,090,000,000	29.656
ADRO	2016	Rp	88,138,608,108,108	32.110
	2017	Rp	92,083,067,567,568	32.154
	2018	Rp	102,329,782,608,696	32.259
	2019	Rp	100,237,569,444,444	32.239
	2020	Rp	89,881,211,267,606	32.130
ANTM	2016	Rp	29,981,535,812,000	31.032
	2017	Rp	30,014,273,452,000	31.033
	2018	Rp	33,306,390,807,000	31.137
	2019	Rp	30,194,907,730,000	31.039

Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan	SIZE
		Total Asset	
	2020	Rp 31,729,512,995,000	31.088
APEX	2016	Rp 9,171,696,774,194	29.847
	2017	Rp 7,827,027,032,520	29.689
	2018	Rp 7,448,270,593,343	29.639
	2019	Rp 6,964,203,741,307	29.572
	2020	Rp 4,742,757,588,152	29.188
ARTI	2016	Rp 2,616,795,546,996	28.593
	2017	Rp 2,506,049,820,550	28.550
	2018	Rp 2,692,455,709,206	28.621
	2019	Rp 1,785,484,025,749	28.211
	2020	Rp 852,964,580,558	27.472
BRMS	2016	Rp 14,535,071,175,676	30.308
	2017	Rp 11,711,092,540,541	30.092
	2018	Rp 10,010,988,159,420	29.935
	2019	Rp 9,902,865,750,000	29.924
	2020	Rp 8,283,709,464,789	29.745
BSSR	2016	Rp 2,471,980,942,760	28.536
	2017	Rp 2,846,942,226,792	28.677
	2018	Rp 3,549,090,674,776	28.898
	2019	Rp 3,485,059,307,660	28.880
	2020	Rp 3,714,298,561,354	28.943
BYAN	2016	Rp 11,080,489,977,196	30.036
	2017	Rp 12,041,640,420,720	30.119
	2018	Rp 16,665,660,005,571	30.444
	2019	Rp 17,766,035,749,823	30.508
	2020	Rp 22,846,221,435,310	30.760
CITA	2016	Rp 2,726,213,720,854	28.634
	2017	Rp 2,678,250,712,668	28.616
	2018	Rp 3,268,567,743,522	28.815
	2019	Rp 3,861,308,057,131	28.982
	2020	Rp 4,134,800,442,987	29.050
CTTH	2016	Rp 615,962,000,265	27.146
	2017	Rp 700,251,764,864	27.275
	2018	Rp 735,774,891,577	27.324
	2019	Rp 742,302,791,888	27.333
	2020	Rp 693,600,593,453	27.265
DOID	2016	Rp 11,922,644,648,649	30.109

Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan	SIZE
		Total Asset	
	2017	Rp 12,778,127,189,189	30.179
	2018	Rp 17,160,792,913,044	30.474
	2019	Rp 16,415,433,208,333	30.429
	2020	Rp 13,724,644,408,451	30.250
DSSA	2016	Rp 31,892,957,285,714	31.093
	2017	Rp 39,099,894,971,429	31.297
	2018	Rp 48,382,726,900,000	31.510
	2019	Rp 53,128,186,628,571	31.604
	2020	Rp 41,431,866,028,571	31.355
ELSA	2016	Rp 4,190,956,000,000	29.064
	2017	Rp 4,855,369,000,000	29.211
	2018	Rp 5,657,327,000,000	29.364
	2019	Rp 6,805,037,000,000	29.549
	2020	Rp 7,562,822,000,000	29.654
ENRG	2016	Rp 14,351,038,094,595	30.295
	2017	Rp 10,250,440,590,288	29.958
	2018	Rp 10,592,064,530,055	29.991
	2019	Rp 9,443,919,200,572	29.876
	2020	Rp 11,913,337,002,840	30.109
GEMS	2016	Rp 5,395,285,714,286	29.317
	2017	Rp 8,000,940,162,602	29.711
	2018	Rp 10,145,392,619,392	29.948
	2019	Rp 10,857,387,579,972	30.016
	2020	Rp 11,476,978,349,788	30.071
HRUM	2016	Rp 5,905,226,471,429	29.407
	2017	Rp 6,563,472,442,857	29.513
	2018	Rp 6,685,559,928,571	29.531
	2019	Rp 6,385,742,200,000	29.485
	2020	Rp 7,124,317,371,429	29.595
INCO	2016	Rp 29,966,249,780,000	31.031
	2017	Rp 29,734,032,549,000	31.023
	2018	Rp 31,719,713,704,000	31.088
	2019	Rp 30,888,695,136,000	31.061
	2020	Rp 32,507,056,952,000	31.112
INDY	2016	Rp 18,223,330,690,000	30.534
	2017	Rp 36,357,054,030,000	31.224
	2018	Rp 36,699,526,930,000	31.234

Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan	SIZE
		Total Asset	
	2019	Rp 3,616,163,065,000	28.916
	2020	Rp 34,937,028,570,000	31.185
ITMG	2016	Rp 16,254,765,312,000	30.419
	2017	Rp 18,407,166,324,000	30.544
	2018	Rp 20,892,144,168,000	30.670
	2019	Rp 16,806,878,941,000	30.453
	2020	Rp 16,342,462,045,000	30.425
KKGI	2016	Rp 1,326,250,765,000	27.913
	2017	Rp 1,423,266,145,704	27.984
	2018	Rp 1,698,117,665,301	28.161
	2019	Rp 1,756,454,418,837	28.194
	2020	Rp 1,533,048,231,715	28.058
MBAP	2016	Rp 1,564,190,309,140	28.078
	2017	Rp 2,178,233,377,176	28.410
	2018	Rp 2,512,587,623,022	28.552
	2019	Rp 2,676,321,844,389	28.615
	2020	Rp 2,566,730,603,710	28.574
MDKA	2016	Rp 4,110,507,540,541	29.045
	2017	Rp 5,011,776,675,676	29.243
	2018	Rp 11,562,454,753,623	30.079
	2019	Rp 13,211,849,486,111	30.212
	2020	Rp 13,280,094,828,571	30.217
MEDC	2016	Rp 48,609,873,013,514	31.515
	2017	Rp 69,740,349,418,919	31.876
	2018	Rp 76,121,648,492,754	31.963
	2019	Rp 83,424,144,305,556	32.055
	2020	Rp 83,110,182,464,789	32.051
MTFN	2016	Rp 308,063,941,040	26.454
	2017	Rp 771,042,697,125	27.371
	2018	Rp 1,126,221,625,219	27.750
	2019	Rp 815,864,709,200	27.428
	2020	Rp 724,610,168,897	27.309
MYOH	2016	Rp 1,978,508,264,232	28.313
	2017	Rp 1,843,448,925,300	28.243
	2018	Rp 2,191,353,225,138	28.416
	2019	Rp 2,226,686,478,948	28.432
	2020	Rp 2,131,390,456,195	28.388

Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan		SIZE
		Total Asset		
PTRO	2016	Rp	5,252,670,226,969	29.290
	2017	Rp	5,919,295,392,954	29.409
	2018	Rp	7,948,369,098,712	29.704
	2019	Rp	7,664,033,379,694	29.668
	2020	Rp	7,470,916,784,203	29.642
RUIS	2016	Rp	979,132,450,762	27.610
	2017	Rp	959,347,737,750	27.590
	2018	Rp	990,372,318,692	27.621
	2019	Rp	1,251,357,407,016	27.855
	2020	Rp	1,345,151,507,257	27.928
SMRU	2016	Rp	2,424,192,610,992	28.517
	2017	Rp	2,030,778,909,636	28.339
	2018	Rp	1,908,386,848,248	28.277
	2019	Rp	1,675,570,667,301	28.147
	2020	Rp	1,288,617,641,905	27.885
TOBA	2016	Rp	3,515,969,879,032	28.888
	2017	Rp	4,720,027,479,675	29.183
	2018	Rp	7,263,143,183,792	29.614
	2019	Rp	11,608,351,265,647	30.083
	2020	Rp	10,886,767,094,499	30.019

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		ETR
		Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	
AALI	2016	Rp 94,479,000,000	Rp 2,208,778,000,000	0.043
	2017	Rp 824,876,000,000	Rp 2,938,505,000,000	0.281
	2018	Rp 686,357,000,000	Rp 2,207,080,000,000	0.311
	2019	Rp 417,231,000,000	Rp 660,860,000,000	0.631
	2020	Rp 568,856,000,000	Rp 1,462,635,000,000	0.389
ANJT	2016	Rp 137,397,027,027	Rp 261,711,148,649	0.525
	2017	Rp 348,119,256,757	Rp 988,653,378,378	0.352
	2018	Rp 103,338,115,942	Rp 96,213,304,348	1.074
	2019	Rp 167,154,930,556	Rp 103,846,708,333	1.610
	2020	Rp 180,724,431,160	Rp 211,908,117,785	0.853
BISI	2016	Rp 117,875,000,000	Rp 454,095,000,000	0.260
	2017	Rp 115,910,000,000	Rp 519,197,000,000	0.223
	2018	Rp 101,629,000,000	Rp 505,499,000,000	0.201

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		ETR
		Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	
	2019	Rp 97,819,000,000	Rp 404,771,000,000	0.242
	2020	Rp 89,271,000,000	Rp 364,938,000,000	0.245
BWPT	2016	Rp 55,198,000,000	-Rp 336,169,000,000	-0.164
	2017	Rp 21,698,000,000	-Rp 166,093,000,000	-0.131
	2018	-Rp 91,398,000,000	-Rp 553,955,000,000	0.165
	2019	-Rp 276,589,000,000	-Rp 1,444,060,000,000	0.192
	2020	-Rp 41,671,000,000	-Rp 1,150,060,000,000	0.036
DSFI	2016	Rp 1,944,951,329	Rp 7,695,828,438	0.253
	2017	Rp 2,406,676,785	Rp 9,155,401,920	0.263
	2018	Rp 2,829,533,184	Rp 11,472,124,244	0.247
	2019	Rp 2,570,202,049	Rp 11,030,910,094	0.233
	2020	-Rp 1,129,005,127	-Rp 6,998,586,977	0.161
DSNG	2016	Rp 85,410,000,000	Rp 337,450,000,000	0.253
	2017	Rp 275,711,000,000	Rp 946,757,000,000	0.291
	2018	Rp 178,847,000,000	Rp 611,264,000,000	0.293
	2019	Rp 101,920,000,000	Rp 280,084,000,000	0.364
	2020	Rp 217,125,000,000	Rp 695,296,000,000	0.312
GZCO	2016	-Rp 45,941,000,000	-Rp 1,593,545,000,000	0.029
	2017	-Rp 41,173,000,000	-Rp 209,691,000,000	0.196
	2018	-Rp 66,984,000,000	-Rp 420,261,000,000	0.159
	2019	-Rp 39,316,000,000	-Rp 623,806,000,000	0.063
	2020	-Rp 39,498,000,000	-Rp 222,090,000,000	0.178
JAWA	2016	Rp 2,576,736,349	-Rp 222,555,903,739	-0.012
	2017	-Rp 34,321,928,850	-Rp 234,251,006,300	0.147
	2018	-Rp 4,151,167,034	-Rp 304,298,161,786	0.014
	2019	-Rp 34,114,991,008	-Rp 316,814,226,431	0.108
	2020	-Rp 12,436,991,788	-Rp 320,080,227,848	0.039
LSIP	2016	Rp 185,792,000,000	Rp 778,561,000,000	0.239
	2017	Rp 242,813,000,000	Rp 1,006,236,000,000	0.241
	2018	Rp 87,626,000,000	Rp 417,052,000,000	0.210
	2019	Rp 100,113,000,000	Rp 352,743,000,000	0.284
	2020	Rp 162,949,000,000	Rp 860,439,000,000	0.189
PALM	2016	Rp 31,551,166,000	Rp 250,650,733,000	0.126
	2017	Rp 7,270,138,000	Rp 75,485,829,000	0.096
	2018	Rp 24,811,597,000	-Rp 86,687,171,000	-0.286
	2019	-Rp 869,392,000	-Rp 71,595,408,000	0.012
	2020	-Rp 5,163,428,000	Rp 1,998,784,598,000	-0.003

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		ETR
		Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	
SGRO	2016	-Rp 192,532,480,000	Rp 266,823,639,000	-0.722
	2017	Rp 178,304,153,000	Rp 481,330,943,000	0.370
	2018	Rp 79,442,388,000	Rp 143,050,457,000	0.555
	2019	Rp 133,947,390,000	Rp 173,943,680,000	0.770
	2020	Rp 292,202,000,000	Rp 100,455,000,000	2.909
SIMP	2016	Rp 784,831,000,000	Rp 1,394,625,000,000	0.563
	2017	Rp 498,436,000,000	Rp 1,193,869,000,000	0.417
	2018	Rp 384,789,000,000	Rp 206,722,000,000	1.861
	2019	Rp 445,053,000,000	-Rp 197,149,000,000	-2.257
	2020	Rp 677,287,000,000	Rp 1,017,572,000,000	0.666
SMAR	2016	-Rp 1,168,737,000,000	Rp 1,430,802,000,000	-0.817
	2017	Rp 21,023,000,000	Rp 1,198,394,000,000	0.018
	2018	Rp 103,731,000,000	Rp 701,504,000,000	0.148
	2019	Rp 267,355,000,000	Rp 1,166,053,000,000	0.229
	2020	Rp 547,982,000,000	Rp 2,087,780,000,000	0.262
SSMS	2016	Rp 255,728,944,000	Rp 847,387,716,000	0.302
	2017	Rp 302,775,156,000	Rp 1,093,697,928,000	0.277
	2018	Rp 254,097,843,000	Rp 340,868,812,000	0.745
	2019	Rp 142,510,662,000	Rp 154,592,621,000	0.922
	2020	Rp 318,690,994,000	Rp 899,545,934,000	0.354
UNSP	2016	Rp 285,229,650,000	-Rp 321,172,056,000	-0.888
	2017	Rp 364,520,000,000	-Rp 1,218,203,000,000	-0.299
	2018	-Rp 113,515,000,000	-Rp 1,962,444,000,000	0.058
	2019	Rp 81,811,000,000	-Rp 4,811,327,000,000	-0.017
	2020	Rp 159,729,000,000	-Rp 794,386,000,000	-0.201
ADRO	2016	Rp 2,781,540,540,541	Rp 7,385,405,405,405	0.377
	2017	Rp 5,312,067,567,568	Rp 12,561,229,729,730	0.423
	2018	Rp 4,977,637,681,159	Rp 11,898,521,739,130	0.418
	2019	Rp 3,112,513,888,889	Rp 9,154,208,333,333	0.340
	2020	Rp 896,619,718,310	Rp 3,129,084,507,042	0.287
ANTM	2016	Rp 172,485,407,000	Rp 237,291,595,000	0.727
	2017	Rp 317,893,255,000	Rp 454,396,524,000	0.700
	2018	Rp 391,075,213,000	Rp 1,265,501,806,000	0.309
	2019	Rp 493,182,022,000	Rp 687,034,053,000	0.718
	2020	Rp 491,824,319,000	Rp 1,641,178,012,000	0.300
APEX	2016	-Rp 79,321,505,376	-Rp 342,450,685,484	0.232
	2017	-Rp 65,078,428,184	-Rp 1,454,277,195,122	0.045

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		ETR
		Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	
	2018	-Rp 87,528,784,370	-Rp 1,589,756,497,829	0.055
	2019	Rp 104,947,496,523	Rp 388,067,482,615	0.270
	2020	-Rp 8,380,084,626	Rp 619,398,504,937	-0.014
ARTI	2016	-Rp 7,190,501,695	Rp 2,038,622,270	-3.527
	2017	Rp 3,987,607,797	Rp 32,871,461,999	0.121
	2018	Rp 12,958,988,430	Rp 45,792,570,511	0.283
	2019	-Rp 418,210,471	-Rp 987,520,341,471	0.000
	2020	Rp 35,064,738,530	-Rp 922,128,824,292	-0.038
BRMS	2016	-Rp 768,674,594,595	-Rp 6,971,362,243,243	0.110
	2017	Rp 1,015,890,472,973	-Rp 2,329,500,621,622	-0.436
	2018	Rp 378,000,000	-Rp 1,498,763,927,536	0.000
	2019	-Rp 487,388,889	Rp 17,078,236,111	-0.029
	2020	Rp 138,069,464,789	Rp 194,945,647,887	0.708
BSSR	2016	Rp 109,781,229,608	Rp 478,217,538,180	0.230
	2017	Rp 391,152,938,076	Rp 1,513,156,692,168	0.259
	2018	Rp 351,747,523,892	Rp 1,351,793,730,090	0.260
	2019	Rp 150,822,633,116	Rp 574,393,563,186	0.263
	2020	Rp 145,539,407,616	Rp 576,008,645,980	0.253
BYAN	2016	Rp 154,343,040,336	Rp 396,398,398,124	0.389
	2017	Rp 1,111,824,396,552	Rp 5,691,281,408,604	0.195
	2018	Rp 2,496,857,448,519	Rp 10,089,380,030,832	0.247
	2019	Rp 1,076,133,306,793	Rp 4,331,904,268,370	0.248
	2020	Rp 1,159,089,334,585	Rp 6,017,695,800,935	0.193
CITA	2016	-Rp 900,013,595	-Rp 266,147,360,146	0.003
	2017	-Rp 665,585,119	Rp 46,827,759,377	-0.014
	2018	Rp 63,663,122,428	Rp 724,987,180,923	0.088
	2019	Rp 190,537,780,439	Rp 848,256,705,676	0.225
	2020	Rp 191,960,582,706	Rp 841,881,871,416	0.228
CTTH	2016	Rp 5,882,928,709	Rp 26,764,367,473	0.220
	2017	Rp 2,230,868,889	Rp 6,947,634,696	0.321
	2018	Rp 4,135,779,715	Rp 9,340,812,634	0.443
	2019	-Rp 861,064,378	-Rp 26,367,979,556	0.033
	2020	Rp 4,412,905,305	-Rp 37,058,577,820	-0.119
DOID	2016	Rp 319,196,729,730	Rp 820,401,932,432	0.389
	2017	Rp 539,937,891,892	Rp 1,171,658,175,676	0.461
	2018	Rp 467,522,594,203	Rp 1,563,802,304,348	0.299
	2019	Rp 199,959,500,000	Rp 484,412,152,778	0.413

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		ETR
		Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	
	2020	-Rp 13,043,859,155	-Rp 343,133,577,465	0.038
DSSA	2016	Rp 469,588,628,571	Rp 1,394,971,857,143	0.337
	2017	Rp 901,769,271,429	Rp 2,733,731,685,714	0.330
	2018	Rp 1,050,992,485,714	Rp 2,775,921,728,571	0.379
	2019	Rp 876,249,014,286	Rp 1,899,883,471,429	0.461
	2020	Rp 749,701,942,857	-Rp 77,405,814,286	-9.685
ELSA	2016	Rp 102,252,000,000	Rp 418,318,000,000	0.244
	2017	Rp 75,612,000,000	Rp 326,366,000,000	0.232
	2018	Rp 75,491,000,000	Rp 351,807,000,000	0.215
	2019	Rp 110,272,000,000	Rp 466,749,000,000	0.236
	2020	Rp 95,792,000,000	Rp 344,877,000,000	0.278
ENRG	2016	Rp 456,539,108,108	-Rp 5,512,580,189,189	-0.083
	2017	Rp 1,045,740,951,156	Rp 1,245,995,280,408	0.839
	2018	Rp 315,875,283,885	Rp 191,007,097,947	1.654
	2019	Rp 890,277,520,635	Rp 1,231,228,000,982	0.723
	2020	Rp 707,517,223,595	Rp 1,533,969,386,950	0.461
GEMS	2016	Rp 4,976,242,857	Rp 703,788,328,571	0.007
	2017	Rp 639,588,563,686	Rp 2,267,041,680,217	0.282
	2018	Rp 506,253,531,114	Rp 1,961,370,434,153	0.258
	2019	Rp 466,958,317,107	Rp 1,395,551,599,444	0.335
	2020	Rp 441,129,675,599	Rp 1,793,126,191,819	0.246
HRUM	2016	Rp 163,028,357,143	Rp 419,881,828,571	0.388
	2017	Rp 246,899,528,571	Rp 1,043,299,542,857	0.237
	2018	Rp 114,086,385,714	Rp 688,449,557,143	0.166
	2019	Rp 78,647,228,571	Rp 366,112,785,714	0.215
	2020	Rp 55,415,457,143	Rp 916,734,242,857	0.060
INCO	2016	Rp 43,882,435,000	Rp 69,546,725,000	0.631
	2017	-Rp 105,471,639,000	-Rp 313,325,220,000	0.337
	2018	Rp 318,356,210,000	Rp 1,189,850,034,000	0.268
	2019	Rp 441,035,192,000	Rp 1,238,722,992,000	0.356
	2020	Rp 306,524,344,000	Rp 1,469,634,380,000	0.209
INDY	2016	-Rp 107,762,570,000	-Rp 1,150,069,830,000	0.094
	2017	-Rp 215,171,120,000	Rp 3,001,160,450,000	-0.072
	2018	Rp 1,672,142,290,000	Rp 2,650,764,180,000	0.631
	2019	Rp 49,142,265,000	Rp 54,134,699,000	0.908
	2020	Rp 42,705,880,000	-Rp 991,771,860,000	-0.043
ITMG	2016	Rp 823,384,952,000	Rp 2,579,591,076,000	0.319

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		ETR
		Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	
	2017	Rp 1,481,500,896,000	Rp 4,905,121,140,000	0.302
	2018	Rp 1,572,737,967,000	Rp 5,319,783,603,000	0.296
	2019	Rp 825,802,806,000	Rp 2,584,307,108,000	0.320
	2020	Rp 489,796,125,000	Rp 1,023,360,065,000	0.479
	2016	Rp 68,339,876,136	Rp 197,373,160,500	0.346
KKGI	2017	Rp 83,957,389,536	Rp 266,042,170,836	0.316
	2018	Rp 9,329,282,883	Rp 16,216,446,483	0.575
	2019	Rp 36,353,311,358	Rp 111,618,218,510	0.326
	2020	-Rp 9,684,591,735	-Rp 131,946,943,310	0.073
	2016	Rp 121,768,548,387	Rp 486,200,470,430	0.250
MBAP	2017	Rp 272,140,816,584	Rp 1,066,537,280,184	0.255
	2018	Rp 250,674,972,372	Rp 979,224,248,034	0.256
	2019	Rp 182,813,538,407	Rp 673,345,868,264	0.272
	2020	Rp 139,725,625,130	Rp 527,154,515,160	0.265
	2016	-Rp 49,719,729,730	-Rp 86,996,000,000	0.572
MDKA	2017	Rp 269,701,635,135	Rp 852,581,608,108	0.316
	2018	Rp 418,883,550,725	Rp 1,257,542,884,058	0.333
	2019	Rp 544,690,013,889	Rp 1,506,546,305,556	0.362
	2020	Rp 390,182,371,429	Rp 802,920,700,000	0.486
	2016	Rp 848,403,648,649	Rp 3,517,542,878,378	0.241
MEDC	2017	Rp 1,889,641,067,568	Rp 3,993,008,445,946	0.473
	2018	Rp 2,655,148,513,514	Rp 2,881,686,811,594	0.921
	2019	Rp 2,769,072,916,667	Rp 2,488,140,611,111	1.113
	2020	Rp 1,019,062,112,676	-Rp 1,384,276,352,113	-0.736
	2016	Rp 1,715,087,060	-Rp 1,209,972,967,693	-0.001
MTFN	2017	Rp 3,612,521,362	Rp 17,941,586,011	0.201
	2018	Rp 3,043,318,328	Rp 11,779,940,857	0.258
	2019	Rp 5,525,229,556	Rp 18,002,349,327	0.307
	2020	Rp 5,248,272,647	-Rp 27,715,682,318	-0.189
	2016	Rp 110,095,511,084	Rp 395,729,459,992	0.278
MYOH	2017	Rp 63,815,361,168	Rp 230,541,872,256	0.277
	2018	Rp 152,323,684,065	Rp 600,201,667,449	0.254
	2019	Rp 122,699,720,383	Rp 485,493,981,912	0.253
	2020	Rp 91,345,757,230	Rp 409,183,059,740	0.223
	2016	Rp 12,977,303,071	-Rp 117,449,933,244	-0.110
PTRO	2017	Rp 33,644,986,450	Rp 146,260,162,602	0.230
	2018	Rp 162,432,045,780	Rp 493,848,354,793	0.329

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		ETR
		Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	
	2019	Rp 128,748,261,474	Rp 564,408,901,252	0.228
	2020	Rp 42,849,083,216	Rp 501,212,976,023	0.085
RUIS	2016	Rp 28,781,971,381	Rp 54,852,288,151	0.525
	2017	Rp 17,991,548,295	Rp 38,913,911,728	0.462
	2018	Rp 17,524,863,414	Rp 44,579,949,867	0.393
	2019	Rp 17,566,773,598	Rp 50,653,045,141	0.347
	2020	Rp 20,538,376,695	Rp 48,080,574,358	0.427
SMRU	2016	-Rp 17,199,934,168	-Rp 242,869,942,160	0.071
	2017	-Rp 46,006,975,800	-Rp 13,363,408,500	3.443
	2018	-Rp 13,502,140,242	-Rp 83,064,213,010	0.163
	2019	Rp 2,447,376,299	-Rp 184,842,122,179	-0.013
	2020	-Rp 20,507,121,095	-Rp 342,612,094,410	0.060
TOBA	2016	Rp 153,191,142,473	Rp 349,249,905,914	0.439
	2017	Rp 255,089,647,696	Rp 815,657,276,423	0.313
	2018	Rp 422,457,684,515	Rp 1,407,838,234,443	0.300
	2019	Rp 265,973,129,346	Rp 874,397,329,624	0.304
	2020	Rp 88,562,031,030	Rp 593,553,088,858	0.149

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		CETR
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	
AALI	2016	Rp 797,543,000,000	Rp 2,208,778,000,000	0.361
	2017	Rp 933,423,000,000	Rp 2,938,505,000,000	0.318
	2018	Rp 1,090,792,000,000	Rp 2,207,080,000,000	0.494
	2019	Rp 233,349,000,000	Rp 660,860,000,000	0.353
	2020	-Rp 560,293,000,000	Rp 1,462,635,000,000	-0.383
ANJT	2016	Rp 192,302,013,514	Rp 261,711,148,649	0.735
	2017	Rp 157,460,810,811	Rp 988,653,378,378	0.159
	2018	Rp 379,896,652,174	Rp 96,213,304,348	3.948
	2019	Rp 113,577,638,889	Rp 103,846,708,333	1.094
	2020	Rp 73,946,000,000	Rp 211,600,239,437	0.349
BISI	2016	Rp 99,744,000,000	Rp 454,095,000,000	0.220
	2017	Rp 132,536,000,000	Rp 519,197,000,000	0.255
	2018	Rp 125,607,000,000	Rp 505,499,000,000	0.248
	2019	Rp 131,563,000,000	Rp 404,771,000,000	0.325
	2020	Rp 116,455,000,000	Rp 364,938,000,000	0.319
BWPT	2016	Rp 74,268,000,000	-Rp 336,169,000,000	-0.221

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		CETR
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	
	2017	Rp 50,320,000,000	-Rp 166,093,000,000	-0.303
	2018	Rp 70,872,000,000	-Rp 553,955,000,000	-0.128
	2019	Rp 15,277,000,000	-Rp 1,444,060,000,000	-0.011
	2020	Rp 1,202,000,000	-Rp 1,150,060,000,000	-0.001
	2016	Rp 3,992,327,320	Rp 7,695,828,438	0.519
DSFI	2017	Rp 2,890,679,020	Rp 9,155,401,920	0.316
	2018	Rp 4,962,760,234	Rp 11,472,124,244	0.433
	2019	Rp 3,122,268,243	Rp 11,030,910,094	0.283
	2020	Rp -	-Rp 6,998,586,977	0.000
	2016	Rp 166,382,000,000	Rp 337,450,000,000	0.493
DSNG	2017	Rp 139,854,000,000	Rp 946,757,000,000	0.148
	2018	Rp 303,778,000,000	Rp 611,264,000,000	0.497
	2019	Rp 309,941,000,000	Rp 280,084,000,000	1.107
	2020	Rp 107,373,000,000	Rp 695,296,000,000	0.154
	2016	Rp 19,145,000,000	-Rp 1,593,545,000,000	-0.012
GZCO	2017	Rp 12,530,000,000	-Rp 209,691,000,000	-0.060
	2018	Rp -	-Rp 420,261,000,000	0.000
	2019	Rp 4,737,000,000	-Rp 623,806,000,000	-0.008
	2020	-Rp 55,467,000,000	-Rp 222,090,000,000	0.250
	2016	Rp 244,306,490	-Rp 222,555,903,739	-0.001
JAWA	2017	Rp 2,389,190,153	-Rp 234,251,006,300	-0.010
	2018	Rp 150,562,278	-Rp 304,298,161,786	0.000
	2019	Rp 43,886,863	-Rp 316,814,226,431	0.000
	2020	Rp -	-Rp 320,080,227,848	0.000
	2016	Rp 127,416,000,000	Rp 778,561,000,000	0.164
LSIP	2017	Rp 270,181,000,000	Rp 1,006,236,000,000	0.269
	2018	Rp 203,071,000,000	Rp 417,052,000,000	0.487
	2019	Rp 47,316,000,000	Rp 352,743,000,000	0.134
	2020	Rp 72,973,000,000	Rp 860,439,000,000	0.085
	2016	Rp 6,234,908,000	Rp 250,650,733,000	0.025
PALM	2017	Rp 44,842,779,000	Rp 75,485,829,000	0.594
	2018	Rp 10,054,412,000	-Rp 86,687,171,000	-0.116
	2019	Rp 12,438,154,000	-Rp 71,595,408,000	-0.174
	2020	Rp -	Rp 1,998,784,598,000	0.000
	2016	Rp 194,449,916,000	Rp 266,823,639,000	0.729
SGRO	2017	Rp 121,138,416,000	Rp 481,330,943,000	0.252
	2018	Rp 186,973,361,000	Rp 143,050,457,000	1.307

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		CETR
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	
	2019	Rp 106,300,968,000	Rp 173,943,680,000	0.611
	2020	Rp 35,897,000,000	Rp 100,455,000,000	0.357
SIMP	2016	Rp 486,574,000,000	Rp 1,394,625,000,000	0.349
	2017	Rp 689,776,000,000	Rp 1,193,869,000,000	0.578
	2018	Rp 562,117,000,000	Rp 206,722,000,000	2.719
	2019	Rp 307,806,000,000	-Rp 197,149,000,000	-1.561
	2020	Rp 225,984,000,000	Rp 1,017,572,000,000	0.222
SMAR	2016	Rp 369,038,000,000	Rp 1,430,802,000,000	0.258
	2017	Rp 275,482,000,000	Rp 1,198,394,000,000	0.230
	2018	Rp 294,731,000,000	Rp 701,504,000,000	0.420
	2019	Rp 189,223,000,000	Rp 1,166,053,000,000	0.162
	2020	Rp 151,630,000,000	Rp 2,087,780,000,000	0.073
SSMS	2016	Rp 183,688,919,000	Rp 847,387,716,000	0.217
	2017	Rp 299,255,062,000	Rp 1,093,697,928,000	0.274
	2018	Rp 412,427,460,000	Rp 340,868,812,000	1.210
	2019	Rp 295,782,473,000	Rp 154,592,621,000	1.913
	2020	Rp 241,987,946,000	Rp 899,545,934,000	0.269
UNSP	2016	Rp 200,598,806,000	-Rp 321,172,056,000	-0.625
	2017	Rp 115,077,000,000	-Rp 1,218,203,000,000	-0.094
	2018	Rp 40,121,000,000	-Rp 1,962,444,000,000	-0.020
	2019	Rp 26,199,000,000	-Rp 4,811,327,000,000	-0.005
	2020	Rp 6,824,000,000	-Rp 794,386,000,000	-0.009
ADRO	2016	Rp 2,101,000,000,000	Rp 7,385,405,405,405	0.284
	2017	Rp 6,965,702,702,703	Rp 12,561,229,729,730	0.555
	2018	Rp 5,903,840,579,710	Rp 11,898,521,739,130	0.496
	2019	Rp 4,263,097,222,222	Rp 9,154,208,333,333	0.466
	2020	Rp 2,538,507,042,254	Rp 3,129,084,507,042	0.811
ANTM	2016	Rp 99,862,217,000	Rp 237,291,595,000	0.421
	2017	Rp 195,949,984,000	Rp 454,396,524,000	0.431
	2018	Rp 551,348,245,000	Rp 1,265,501,806,000	0.436
	2019	Rp 734,464,694,000	Rp 687,034,053,000	1.069
	2020	Rp 335,390,894,000	Rp 1,641,178,012,000	0.204
APEX	2016	Rp 42,478,185,484	-Rp 342,450,685,484	-0.124
	2017	Rp 28,536,409,214	-Rp 1,454,277,195,122	-0.020
	2018	Rp 36,158,856,729	-Rp 1,589,756,497,829	-0.023
	2019	Rp 9,755,118,220	Rp 388,067,482,615	0.025
	2020	Rp 5,453,229,901	Rp 619,398,504,937	0.009

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		CETR
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	
ARTI	2016	-Rp 10,297,421,837	Rp 2,038,622,270	-5.051
	2017	Rp 56,828,119,780	Rp 32,871,461,999	1.729
	2018	Rp 17,725,599,296	Rp 45,792,570,511	0.387
	2019	Rp 1,584,422,983	-Rp 987,520,341,471	-0.002
	2020	Rp 989,004,314	-Rp 922,128,824,292	-0.001
BRMS	2016	Rp 121,641,608,108	-Rp 6,971,362,243,243	-0.017
	2017	Rp 54,307,527,027	-Rp 2,329,500,621,622	-0.023
	2018	Rp 154,193,159,420	-Rp 1,498,763,927,536	-0.103
	2019	Rp 4,702,666,667	Rp 17,078,236,111	0.275
	2020	Rp 6,708,394,366	Rp 194,945,647,887	0.034
BSSR	2016	Rp 268,579,540,056	Rp 478,217,538,180	0.562
	2017	Rp 335,064,448,392	Rp 1,513,156,692,168	0.221
	2018	Rp 573,053,243,556	Rp 1,351,793,730,090	0.424
	2019	Rp 347,567,593,494	Rp 574,393,563,186	0.605
	2020	Rp 99,988,194,640	Rp 576,008,645,980	0.174
BYAN	2016	Rp 456,579,222,952	Rp 396,398,398,124	1.152
	2017	Rp 572,896,905,888	Rp 5,691,281,408,604	0.101
	2018	Rp 2,208,134,459,583	Rp 10,089,380,030,832	0.219
	2019	Rp 2,957,571,352,511	Rp 4,331,904,268,370	0.683
	2020	Rp 850,786,871,025	Rp 6,017,695,800,935	0.141
CITA	2016	-Rp 43,812,044,622	-Rp 266,147,360,146	0.165
	2017	Rp 6,718,101,426	Rp 46,827,759,377	0.143
	2018	Rp 32,554,527,232	Rp 724,987,180,923	0.045
	2019	Rp 462,981,316,253	Rp 848,256,705,676	0.546
	2020	Rp 604,705,676,876	Rp 841,881,871,416	0.718
CTTH	2016	Rp 6,394,949,799	Rp 26,764,367,473	0.239
	2017	Rp 6,967,275,263	Rp 6,947,634,696	1.003
	2018	Rp 3,825,517,566	Rp 9,340,812,634	0.410
	2019	Rp 685,741,445	-Rp 26,367,979,556	-0.026
	2020	Rp 1,158,091,202	-Rp 37,058,577,820	-0.031
DOID	2016	Rp 279,276,621,622	Rp 820,401,932,432	0.340
	2017	Rp 540,655,756,757	Rp 1,171,658,175,676	0.461
	2018	Rp 537,400,927,536	Rp 1,563,802,304,348	0.344
	2019	Rp 384,123,875,000	Rp 484,412,152,778	0.793
	2020	-Rp 259,507,450,704	-Rp 343,133,577,465	0.756
DSSA	2016	Rp 117,887,928,571	Rp 1,394,971,857,143	0.085
	2017	Rp 331,568,785,714	Rp 2,733,731,685,714	0.121

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		CETR
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	
	2018	Rp 1,079,354,828,571	Rp 2,775,921,728,571	0.389
	2019	Rp 719,577,328,571	Rp 1,899,883,471,429	0.379
	2020	Rp 404,234,900,000	-Rp 77,405,814,286	-5.222
ELSA	2016	Rp 152,419,000,000	Rp 418,318,000,000	0.364
	2017	Rp 140,185,000,000	Rp 326,366,000,000	0.430
	2018	Rp 214,552,000,000	Rp 351,807,000,000	0.610
	2019	Rp 234,300,000,000	Rp 466,749,000,000	0.502
	2020	Rp 256,675,000,000	Rp 344,877,000,000	0.744
ENRG	2016	Rp 531,503,148,649	-Rp 5,512,580,189,189	-0.096
	2017	Rp 1,823,733,482,808	Rp 1,245,995,280,408	1.464
	2018	Rp 757,872,185,625	Rp 191,007,097,947	3.968
	2019	Rp 640,902,505,077	Rp 1,231,228,000,982	0.521
	2020	Rp 870,470,807,570	Rp 1,533,969,386,950	0.567
GEMS	2016	Rp 70,445,014,286	Rp 703,788,328,571	0.100
	2017	Rp 243,991,558,266	Rp 2,267,041,680,217	0.108
	2018	Rp 1,022,506,078,148	Rp 1,961,370,434,153	0.521
	2019	Rp 586,950,987,483	Rp 1,395,551,599,444	0.421
	2020	Rp 300,628,801,128	Rp 1,793,126,191,819	0.168
HRUM	2016	Rp 19,823,857,143	Rp 419,881,828,571	0.047
	2017	Rp 197,479,971,429	Rp 1,043,299,542,857	0.189
	2018	Rp 398,056,942,857	Rp 688,449,557,143	0.578
	2019	Rp 209,973,800,000	Rp 366,112,785,714	0.574
	2020	Rp 54,384,514,286	Rp 916,734,242,857	0.059
INCO	2016	Rp 455,547,880,000	Rp 69,546,725,000	6.550
	2017	Rp 203,702,226,000	-Rp 313,325,220,000	-0.650
	2018	Rp 523,483,896,000	Rp 1,189,850,034,000	0.440
	2019	Rp 981,350,552,000	Rp 1,238,722,992,000	0.792
	2020	Rp 592,558,492,000	Rp 1,469,634,380,000	0.403
INDY	2016	Rp 246,757,140,000	-Rp 1,150,069,830,000	-0.215
	2017	Rp 490,619,540,000	Rp 3,001,160,450,000	0.163
	2018	Rp 2,725,809,040,000	Rp 2,650,764,180,000	1.028
	2019	Rp 230,827,767,000	Rp 54,134,699,000	4.264
	2020	Rp 1,284,382,820,000	-Rp 991,771,860,000	-1.295
ITMG	2016	Rp 875,530,068,000	Rp 2,579,591,076,000	0.339
	2017	Rp 807,393,060,000	Rp 4,905,121,140,000	0.165
	2018	Rp 1,582,150,617,000	Rp 5,319,783,603,000	0.297
	2019	Rp 1,547,000,587,000	Rp 2,584,307,108,000	0.599

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		CETR
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	
	2020	Rp 884,679,705,000	Rp 1,023,360,065,000	0.864
KKGI	2016	Rp 41,109,645,504	Rp 197,373,160,500	0.208
	2017	Rp 83,637,561,900	Rp 266,042,170,836	0.314
	2018	Rp 69,566,912,253	Rp 16,216,446,483	4.290
	2019	Rp 6,963,511,336	Rp 111,618,218,510	0.062
	2020	Rp 23,086,386,960	-Rp 131,946,943,310	-0.175
MBAP	2016	Rp 185,795,537,634	Rp 486,200,470,430	0.382
	2017	Rp 309,549,716,760	Rp 1,066,537,280,184	0.290
	2018	Rp 357,390,732,456	Rp 979,224,248,034	0.365
	2019	Rp 143,148,828,136	Rp 673,345,868,264	0.213
	2020	Rp 34,372,502,710	Rp 527,154,515,160	0.065
MDKA	2016	Rp 75,887,324,324	-Rp 86,996,000,000	-0.872
	2017	Rp -	Rp 852,581,608,108	0.000
	2018	Rp 420,031,782,609	Rp 1,257,542,884,058	0.334
	2019	Rp 714,133,486,111	Rp 1,506,546,305,556	0.474
	2020	Rp 512,082,014,286	Rp 802,920,700,000	0.638
MEDC	2016	Rp 317,792,229,730	Rp 3,517,542,878,378	0.090
	2017	Rp 2,256,704,283,784	Rp 3,993,008,445,946	0.565
	2018	Rp 2,445,831,898,551	Rp 2,881,686,811,594	0.849
	2019	Rp 2,925,088,333,333	Rp 2,488,140,611,111	1.176
	2020	Rp 2,037,983,478,873	-Rp 1,384,276,352,113	-1.472
MTFN	2016	Rp -	-Rp 1,209,972,967,693	0.000
	2017	Rp 40,603,888,141	Rp 17,941,586,011	2.263
	2018	Rp 5,072,795,217	Rp 11,779,940,857	0.431
	2019	Rp 218,452,625	Rp 18,002,349,327	0.012
	2020	Rp 3,537,288,395	-Rp 27,715,682,318	-0.128
MYOH	2016	Rp 128,552,235,256	Rp 395,729,459,992	0.325
	2017	Rp 100,083,343,620	Rp 230,541,872,256	0.434
	2018	Rp 121,464,383,445	Rp 600,201,667,449	0.202
	2019	Rp 141,860,316,644	Rp 485,493,981,912	0.292
	2020	Rp 94,098,912,180	Rp 409,183,059,740	0.230
PTRO	2016	Rp 64,899,866,489	-Rp 117,449,933,244	-0.553
	2017	Rp 26,341,463,415	Rp 146,260,162,602	0.180
	2018	Rp 44,921,316,166	Rp 493,848,354,793	0.091
	2019	Rp 179,986,091,794	Rp 564,408,901,252	0.319
	2020	Rp 212,863,187,588	Rp 501,212,976,023	0.425
RUIS	2016	Rp 23,358,178,895	Rp 54,852,288,151	0.426

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

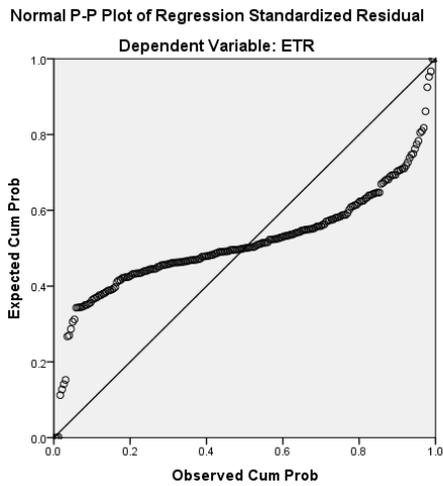
Kode	Tahun	Penghindaran Pajak		CETR
		Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	
	2017	Rp 23,784,526,011	Rp 38,913,911,728	0.611
	2018	Rp 16,807,022,696	Rp 44,579,949,867	0.377
	2019	Rp 20,031,687,650	Rp 50,653,045,141	0.395
	2020	Rp 20,355,500,678	Rp 48,080,574,358	0.423
SMRU	2016	-Rp 48,468,220,240	-Rp 242,869,942,160	0.200
	2017	-Rp 35,009,766,144	-Rp 13,363,408,500	2.620
	2018	-Rp 77,679,200,228	-Rp 83,064,213,010	0.935
	2019	Rp 6,608,343,849	-Rp 184,842,122,179	-0.036
	2020	-Rp 59,139,891,618	-Rp 342,612,094,410	0.173
TOBA	2016	Rp 175,583,723,118	Rp 349,249,905,914	0.503
	2017	Rp 178,842,994,580	Rp 815,657,276,423	0.219
	2018	Rp 391,962,879,884	Rp 1,407,838,234,443	0.278
	2019	Rp 244,733,059,805	Rp 874,397,329,624	0.280
	2020	Rp 87,314,301,834	Rp 593,553,088,858	0.147

Hasil Analisis Deskriptif

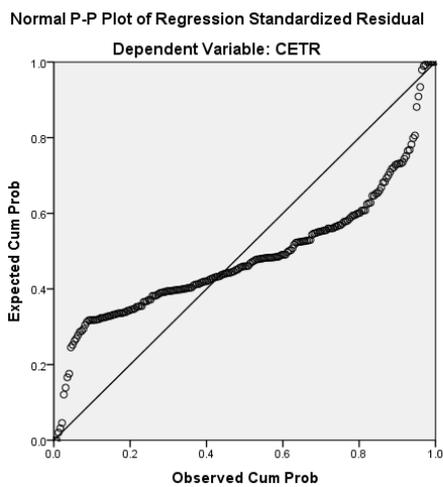
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	215	.200	.667	.40618	.096788
INST	215	.031	.977	.65637	.204463
SIZE	215	26.454	32.259	29.58571	1.271686
ETR	215	-9.685	3.443	.21896	.860451
CETR	215	-5.222	6.550	.35909	.986469
Valid N (listwise)	215				

Hasil Uji Normalitas (ETR)



Hasil Uji Normalitas (CETR)



Hasil Uji Multikolonieritas (ETR)

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KI	.997	1.003
INST	.992	1.008
SIZE	.995	1.005

b. Dependent Variable: ETR

**Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KI	.997	1.003
	INST	.992	1.008
	SIZE	.995	1.005

a. Dependent Variable: CETR

**Hasil Uji Autokorelasi (ETR)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.158 ^a	.025	.011	.855608	2.016

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: ETR

**Hasil Uji Autokorelasi (CETR)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.158 ^a	.025	.011	.981031	2.004

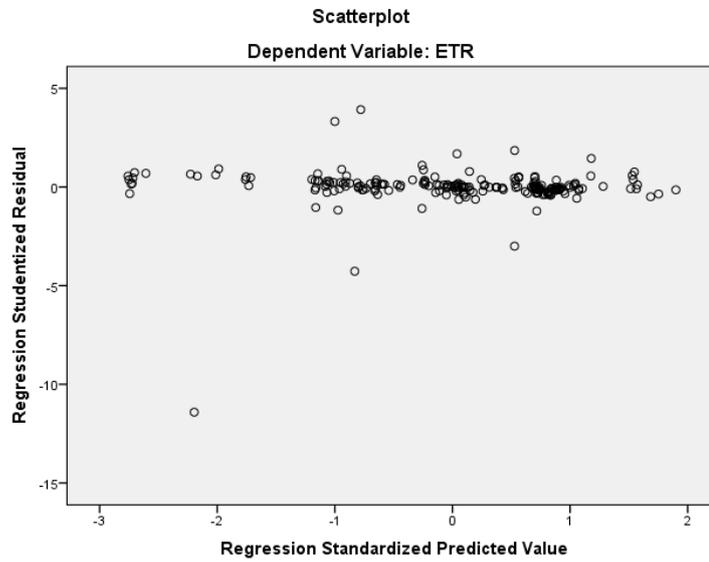
a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: CETR

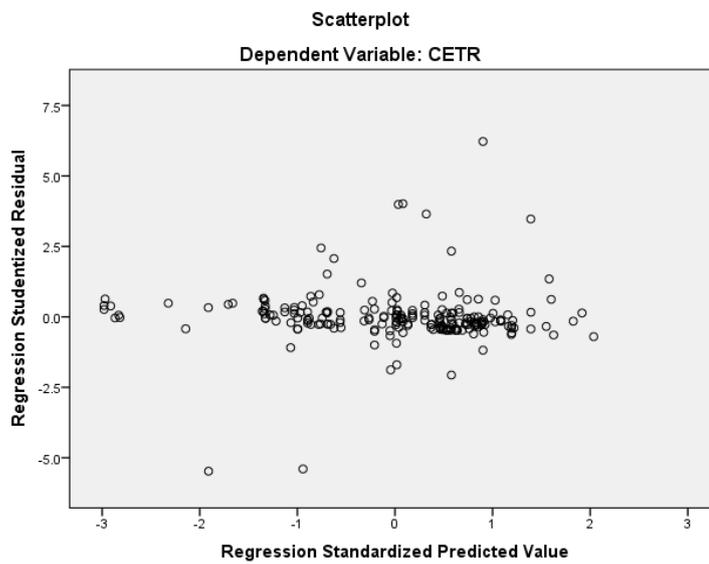
Durbin-Watson test Bound

	k=3	
N	dL	dU
215	1.747	1.790

Hasil Uji Heteroskedastisitas (ETR)



Hasil Uji Heteroskedastisitas (CETR)



Hasil Uji Korelasi

Correlations

		KI	INST	SIZE	ETR	CETR
KI	Pearson Correlation	1	-.051	-.001	-.156*	-.153*
	Sig. (2-tailed)		.456	.984	.022	.025
	N	215	215	215	215	215
INST	Pearson Correlation	-.051	1	.072	.002	-.031
	Sig. (2-tailed)	.456		.294	.975	.654
	N	215	215	215	215	215
SIZE	Pearson Correlation	-.001	.072	1	-.026	-.004
	Sig. (2-tailed)	.984	.294		.708	.954
	N	215	215	215	215	215
ETR	Pearson Correlation	-.156*	.002	-.026	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.022	.975	.708		.000
	N	215	215	215	215	215
CETR	Pearson Correlation	-.153*	-.031	-.004	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.025	.654	.954	.000	
	N	215	215	215	215	215

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Simultan (Uji F) ETR

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.974	3	1.325	1.810	.146 ^b
	Residual	154.466	211	.732		
	Total	158.440	214			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

Hasil Uji Simultan (Uji F) CETR

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.177	3	1.726	1.793	.150 ^b
	Residual	203.071	211	.962		
	Total	208.248	214			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

Hasil Uji Parsial (Uji T) ETR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.307	1.388		.942	.347
	KI	-1.391	.605	-.156	-2.298	.023
	INST	-.017	.287	-.004	-.058	.954
	SIZE	-.017	.046	-.026	-.376	.708

a. Dependent Variable: ETR

Hasil Uji Parsial (Uji T) CETR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.154	1.592		.725	.469
	KI	-1.578	.694	-.155	-2.275	.024
	INST	-.186	.329	-.039	-.565	.573
	SIZE	-.001	.053	-.001	-.020	.984

a. Dependent Variable: CETR

Hasil Uji Koefisien Determinasi (ETR)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.158 ^a	.025	.011	.855608

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

Hasil Uji Koefisien Determinasi (CETR)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.158 ^a	.025	.011	.981031

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: CETR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yoane Astria, Lahir pada tanggal 6 Mei 2000, di Bandung Provinsi Jawa Barat. Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Zakaria Matius dan Ibu Zefani Yanthi. Saat ini penulis bertempat tinggal di Taman Kopo Indah II, Blok I BI No. 4, RT 04, RW 14, Margaasih, Kab. Bandung. Pendidikan formal dimulai dari SDK Rehoboth yang lulus pada tahun 2013, di tahun yang sama melanjutkan di SMPK Pelita Bangsa yang lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan di SMAK Pelita Bangsa. Pada tahun 2020 penulis memutuskan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri dengan memilih program studi Akuntansi. Penulis bekerja sebagai staff admin cost control department di PT. Sanbe Farma pada tahun 2019 hingga sekarang.